

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jl. Jend. Gatot Subroto III – 5 Purwokerto
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....i

I. PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....2

1.3 Maksud Dan Tujuan4

1.3.1 Maksud..... 4

1.3.2 Tujuan 4

1.3.3 Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 4

1.4 Sistematika Penulisan5

II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH6

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....6

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 6

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah10

2.1.3 Kinerja Pelayanan SKPD11

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan23

2.1.5 Hal Lain Yang Dianggap Penting23

2.1.6 Kekuatan, Kelemahan, Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD23

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....25

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah25

A. Kondisi Umum Daerah.....25

B. Permasalahan Yang Dihadapi32

C. Kondisi Yang Diharapkan Dan Proyeksi Ke Depan35

2.3.1 Telaahan Renstra K/L / Propinsi.....37

3.2.1.1 Renstra Kementerian PUPR.....37

3.2.1.2 Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa tengah39

2.3.2 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis40

2.3.2.1 Struktur Ruang Kabupaten Banyumas40

2.3.2.2 Hasil Telaah Rencana Struktur Ruang57

2.3.2.3 Pola Ruang Kabupaten Banyumas.....59

2.3.2.4 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten.....70

2.3.2.5 Wilayah Rawan Bencana.....72

2.3.3 Penentuan Isu - Isu Strategis.....74

2.3.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah74

2.3.3.2 Usulan pemangku kepentingan77

2.3.3.3	Isu Strategis	80
III.	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	91
3.1	Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih.....	91
3.2	Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum	97
3.3	Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum	97
3.4	Strategi	99
3.5	Arah Kebijakan.....	99
3.6	Inovasi.....	101
IV.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	103
4.1.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	103
	Tabel 4.1a Rumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas Tahun 2025-2029.....	104
	Tabel 4.1b Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan serta Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas Tahun 2025-2029	146
	Tabel 4.1c Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.....	226
	Tabel 4.1d Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.....	227
V.	PENUTUP	232

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024 adalah untuk menyinkronkan agenda politik antara Pemilu dan Pilkada, sehingga kedepannya terdapat keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap dokumen perencanaan anggaran pemerintah pusat. Kabupaten Banyumas adalah salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024. Kepala pemerintahan yang baru akan mengemban tugas sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, melalui pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien disusun perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam suatu sistem perencanaan pembangunan nasional untuk memastikan pembangunan di daerah ikut mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, daerah memiliki kewajiban menyusun rencana pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka berkewajiban menyusun Dokumen Rencana Strategis 2025-2029.

Pada akhirnya, Renstra Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas, serta

menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas mendasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
9. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 66 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah:(9-221/2024), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 3 Seri E).;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 94).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 08 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas ini dimaksudkan :

- a) Memberikan gambaran arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Infrastruktur daerah bidang Pekerjaan Umum selama kurun waktu tahun lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
- b) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas pada setiap tahun anggaran;
- c) Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integritas Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dengan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
- d) Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas bertujuan untuk :

- a) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan.
- b) Acuan penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan (Renja) agar lebih terarah;
- c) Menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;

1.3.3 Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1. Rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan penyusunan awal renstra dengan selalu mengikuti proses-proses musyawarah rencana pembangunan sampai pada tingkat penetapan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Renstra selanjutnya menjadi acuan dan dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum, sehingga dokumen perencanaan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Bab II Gambar Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat uraian mengenai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, capaian kinerja selama periode sebelumnya, serta identifikasi permasalahan utama dan isu-isu strategis yang mempengaruhi kinerja perangkat daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, strategi yang akan digunakan untuk mencapainya, serta arah kebijakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, lengkap dengan indikator kinerja, target capaian, dan alokasi sumber daya. Penjabaran ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan keterpaduan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan dokumen Dinas Pekerjaan Umum serta memberikan arahan umum terkait implementasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Renstra selama periode 2025–2029, guna mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

A. Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Sumber Daya Air, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Jalan, dan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan jalan, bidang pemeliharaan dan monitoring evaluasi jalan, bidang sumber daya air dan irigasi, bidang drainase dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan jalan, bidang pemeliharaan dan monitoring evaluasi jalan, bidang sumber daya air dan irigasi, bidang drainase dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pembangunan jalan, bidang pemeliharaan dan monitoring evaluasi jalan, bidang sumber daya air dan irigasi, bidang drainase dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di DPU.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan,

- organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
3. penyiapan bahan pembinaan dan monitoring serta pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 4. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan; dan
 5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

C. Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan

Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

D. Bidang Pemeliharaan dan Monev Jalan

Bidang Pemeliharaan dan Monev Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

E. Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi

Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Sumber Daya Air yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

F. Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi

Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang sub urusan Drainase dan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

G. Bidang Penataan Bangunan

Bidang Penataan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

H. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas.

I. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

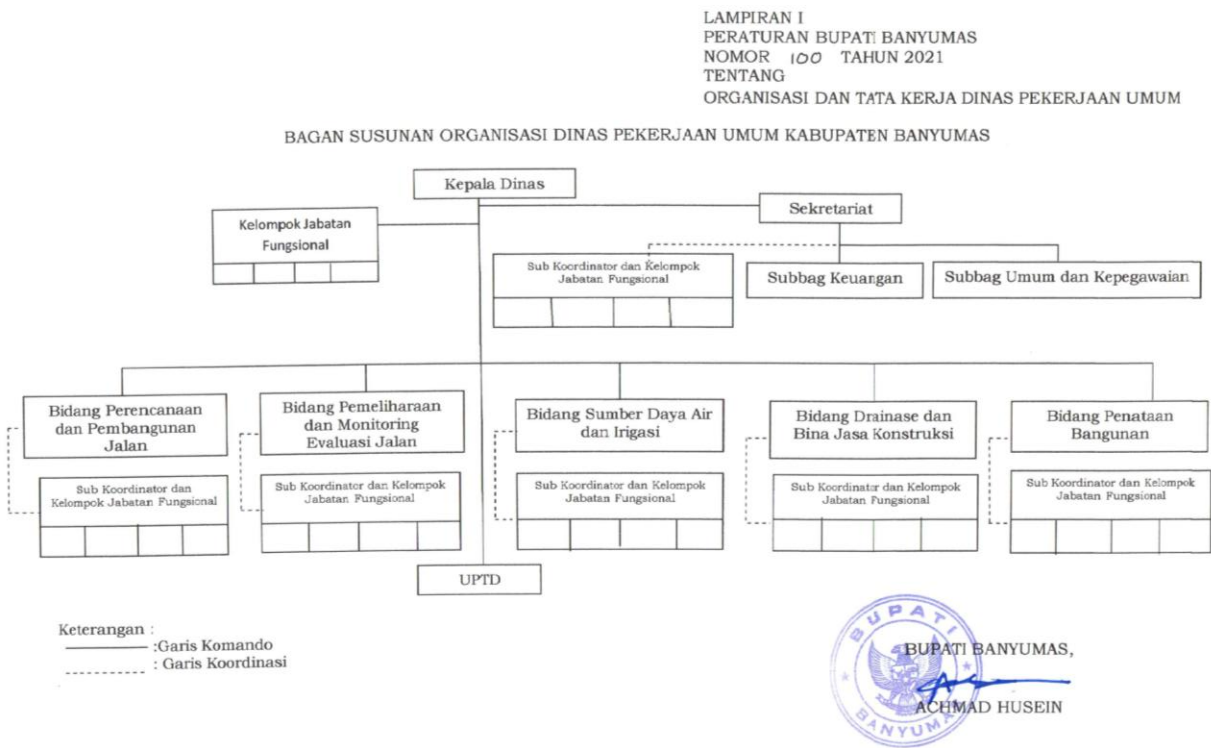
J. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) dan 100 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. sekretariat, terdiri dari :
 - a. sub bagian keuangan;
 - b. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - c. sub koordinator perencanaan;
3. bidang perencanaan dan pembangunan jalan, terdiri dari :
 - a. sub koordinator perencanaan jalan;
 - b. sub koordinator pembangunan jalan;
4. bidang pemeliharaan dan monitoring evaluasi jalan, terdiri dari:
 - a. sub koordinator pemeliharaan jalan;
 - b. sub koordinator monitoring evaluasi jalan;
5. bidang sumber daya air dan irigasi, terdiri dari:
 - a. sub koordinator pembangunan sumber daya air;
 - b. sub koordinator pembangunan irigasi;
 - c. sub koordinator operasi pemeliharaan sumber daya air dan irigasi;
6. bidang drainase dan bina jasa konstruksi, terdiri dari:
 - a. sub koordinator drainase;

- b. sub koordinator pembinaan jasa konstruksi;
- 7. bidang penataan bangunan, terdiri dari:
 - a. sub koordinator pengelolaan bangunan gedung;
 - b. sub koordinator penataan bangunan gedung dan lingkungan;
 - c. sub koordinator pengawasan dan pengendalian bangunan gedung;
- 8. UPTD;
- 9. Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Perbup Kabupaten Banyumas nomor 100 tahun 2021.



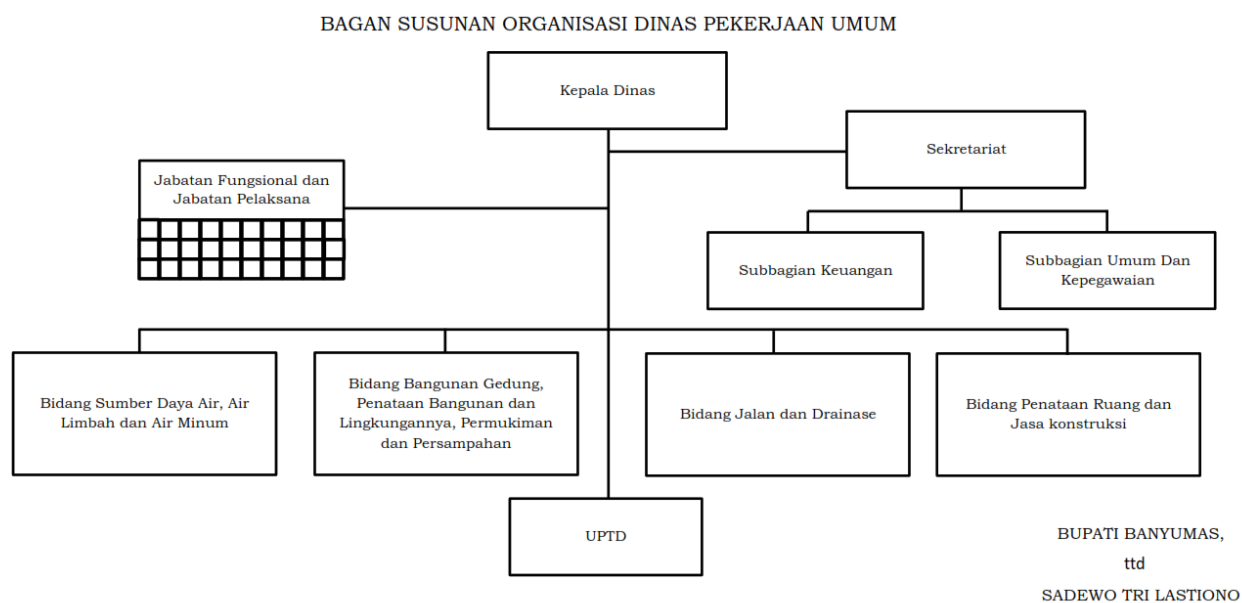
K. Rencana Perubahan Struktur Organisasi (Hasil Evaluasi)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 8 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga Peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), dan hasil evaluasi kelembagaan maka rencana perubahan Organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- Kepala Dinas;
- sekretariat, terdiri dari :
 - sub bagian keuangan;
 - sub bagian umum dan kepegawaian;
- Bidang Sumber Daya Air, Air Limbah dan Air Minum;
- Bidang Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, permukiman dan persampahan ;

- 5. Bidang Jalan dan drainase;
- 6. Bidang Penataan ruang dan Jasa Konstruksi;
- 7. UPTD;
- 8. Jabatan Fungsional.

**Rencana Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Hasil Evaluasi Kelembagaan.**



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.

Jumlah Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas pada akhir bulan Januari tahun 2025 adalah sejumlah 128 orang. Data kepegawaian dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 dapat di jabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai DPU Berdasarkan Golongan di Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah
		L	P	
1	Golongan I	10	0	10
2	Golongan II	33	4	37
3	Golongan III	53	17	70
4	Golongan IV	4	3	7
5	PPPK	3	1	4
		103	25	128

1. **Jumlah Pejabat Struktural**
- a. Eselon II B : 1 Orang
 - b. Eselon III A : 1 Orang
 - c. Eselon III B : 5 Orang
 - d. Eselon IV A : 8 Orang
 - e. Eselon IV B : 7 Orang
- JUMLAH** :22 Orang
2. **Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**
- a. Jumlah PNS Golongan IV : 7 Orang
 - b. Jumlah PNS Golongan III : 70 Orang
 - c. Jumlah PNS Golongan II : 37 Orang
 - d. Jumlah PNS Golongan I : 10 Orang
 - e. Jumlah PPPK : 4 Orang
- JUMLAH** :128Orang
3. **Jumlah Pegawai menurut jenjang pendidikan**
- a. Pendidikan Setingkat S3 : 0 Orang
 - b. Pendidikan Setingkat S2 : 6 Orang
 - c. Pendidikan Setingkat S1 :62 Orang
 - d. Pendidikan Setingkat D3 : 7 Orang
 - e. Pendidikan Setingkat SLTA :40 Orang
 - f. Pendidikan Setingkat SLTP : 6 Orang
 - g. Pendidikan Setingkat SD : 7 Orang
- JUMLAH** :128Orang

2.1.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan partisipatif. Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, maka sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah dan Bawah-Atas. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau

satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (*up-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Perencanaan Pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu : Penyusunan rencana; Penetapan rencana; Pengendalian pelaksanaan rencana, dan Evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan terhadap rencana yang telah ditentukan maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui :

- a. Perencanaan pengelolaan infrastruktur Daerah;
- b. Pelaksanaan pengelolaan infrastruktur Daerah;
- c. Pelaksanaan pengembangan infrastruktur Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan di bidang Pelayanan Umum khususnya bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Sumber Daya Air, irigasi, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan dan Jasa Konstruksi di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan kualitas yang digambarkan dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum dengan indikator dan capaian yang diperbarui.

A. Infrastruktur Jalan dan Drainase

Posisi strategis wilayah Kabupaten Banyumas sebagai penghubung wilayah Jawa bagian Barat dan Timur serta Jawa bagian Utara dan Selatan didukung dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan dengan wilayah lainnya.

Sistem jaringan jalan di Kabupaten Banyumas meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan lingkungan, dan jalan desa. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Banyumas di luar jalan desa dan jalan lingkungan adalah 1.587,12 km, dengan panjang jalan kewenangan Kabupaten Banyumas sepanjang 1.315 Km (sesuai SK Bupati Nomor 621/421/Tahun 2023 tanggal 07 Agustus 2023), jalan kewenangan Nasional sepanjang 172,66 Km, dan jalan kewenangan Provinsi sepanjang 69,46 Km. Selanjutnya berdasarkan data Potensi Desa 2018 di Kabupaten Banyumas tidak ada desa terpencil, semua tersedia telah akses jalan aspal/beton yang memadai.

Rasio panjang jalan kewenangan kabupaten terhadap luas wilayah adalah 0,99 km/km². Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah

terbesar adalah pada Kecamatan Purwokerto Timur 3,705 km/Km2, dengan panjang 31,197 Km dan luas 8,42 Km2, dari terkecil ada di Kecamatan Pekuncen 0,512 km/Km2, dengan panjang 47,45 Km dan luas 92,7 Km2.

Kondisi jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banyumas pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.3.a Kondisi Jalan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

Uraian / Kondisi	Capaian Kinerja Tiap Tahun (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang Jalan Kabupaten	1508	1508	1508	1315,347	1315,347
Kondisi Baik (%)	47,51%	51,21%	50,79%	50,59%	56,30%
Kondisi Sedang (%)	28,76%	28,61%	21,11%	21,70%	16,79%
Kondisi Rusak Ringan (%)	9,79%	9,93%	18,32%	15,69%	16,98%
Kondisi Rusak berat (%)	13,93%	10,24%	9,77%	12,02%	9,93%

Sumber : Bidang Pemeliharaan dan Monev Jalan, 2025

Di Kabupaten Banyumas terdapat 615 ruas jembatan dengan total panjang 6.357,86 m. Kondisi konstruksi jembatan di Kabupaten Banyumas sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.3.b Kondisi Jembatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2024

No	Konstruksi	Kondisi (Ruas)				
		Bangunan Atas	Bangunan Bawah	Fondasi	Lantai	Kondisi Jembatan Secara Umum
1	Baik	6	7	9	9	4
2	Rusak	337	134	76	179	409
3	Rusak Ringan	254	448	506	396	136
4	Rusak Berat	14	20	18	26	51
5	Kritis	3	5	5	4	14
6	Runtuh	1	1	1	1	1
	Jumlah	615	615	615	615	615

Sumber: Bidang Pemeliharaan dan Monev Jalan DPU Kabupaten Banyumas, 2025

Peningkatan kondisi jalan menjadi prioritas untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat, menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Sampai dengan Tahun 2024 jalan kondisi mantap mencapai 75,47%.

Bahaya bencana di Kabupaten Banyumas menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Pada kawasan rawan bencana infrastruktur dibutuhkan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Bencana tanah longsor seringkali menyebabkan kerusakan jalan di Kabupaten Banyumas. Lima puluh dua ruas jalan kabupaten dengan total sepanjang 82,48 Km diidentifikasi berada pada kawasan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas saat ini mengelola jaringan drainase sepanjang 818,401 km, yang terbentang di berbagai wilayah perkotaan dan pedesaan. Namun, dari total panjang tersebut, hanya 155,96 km (19,06%) yang berada dalam kondisi baik. Sisanya terbagi dalam kondisi sedang sepanjang 332,69 km (40,65%), rusak ringan 73,148 km (8,94%), dan rusak berat 34,409 km (4,20%), serta 222,19 km (27,15%) yang masih berupa saluran tanah dan belum ditangani secara teknis permanen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa lebih dari 80% jaringan drainase membutuhkan peningkatan kualitas atau rehabilitasi menyeluruh. Tidak terpenuhinya standar teknis dan kapasitas saluran drainase secara merata sangat rentan menimbulkan permasalahan serius, seperti genangan, banjir lokal, kerusakan jalan, hingga gangguan kesehatan lingkungan masyarakat.

Tabel 2.1.3.b Kondisi Drainase kewenangan Dinas PU Kabupaten Banyumas Tahun 2024

Kecamatan	Baik	Rusak sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Tidak Ada saluran
Ajibarang	7.169,00	51.145,00	3.784,00	4.227,00	32.501,00
Banyumas	7.895,00	53.028,00	2.694,00	6.633,00	38.045,00
Cilongok	2.932,00	106.986,00	8.662,00	7.979,00	46.131,00
Patikraja	1.913,00	44.887,00	1.021,00	2.911,00	39.709,00
Purwokerto Barat	20.652,80	6.029,14	9.409,64	1.404,10	2.226,25
Purwokerto Selatan	15.767,42	16.048,54	13.738,00	2.775,31	8.826,96
Purwokerto Timur	23.539,12	436,87	16.138,29	3.474,97	12.690,05
Purwokerto Utara	43.826,00	6.321,00	10.548,00	895,00	950,00
Sokaraja	29.277,89	8.429,48	5.318,15	2.005,82	225,55
sumpiuh	2.983,00	39.383,00	1.835,00	2.104,00	40.890,00
JUMLAH	155.955,23	332.694,03	73.148,08	34.409,20	222.194,81

Sumber : Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi Dinas PU Tahun 2025

B. Infrastruktur Sumber daya Air, Air Limbah dan Air Minum

Prasarana sumber daya air meliputi jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, sistem pengendali banjir, dan sistem jaringan air baku. Pembagian kewenangan dalam layanan penyediaan irigasi didasarkan pada luasan daerah irigasi dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Irigasi kewenangan Kabupaten Banyumas dengan luas layanan 23.716 ha.

Tabel 2.1.3.c Luas Daerah Irigasi di Kabupaten Banyumas

No	Kewenangan	Jumlah Daerah Irigasi	Luas (Ha)
1	Pusat	2	6.578
2	Provinsi Jawa Tengah	10	5.054
3	Kabupaten Banyumas	573	23.716
	Jumlah	585	35.378

Sumber: Permen PUPR, nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015

Dari total 573 Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Banyumas berdasarkan pendataan kondisi Daerah Irigasi yang dilakukan oleh DPU Kabupaten Banyumas terdapat 391 Daerah Irigasi dalam kondisi baik, 13 Daerah Irigasi dalam kondisi rusak ringan, dan 169 Daerah Irigasi dalam kondisi Rusak Sedang.

Adanya kerusakan pada Daerah Irigasi menyebabkan tidak optimalnya ketersediaan air yang berpengaruh pada produksi pertanian. Oleh karena itu Kondisi Daerah Irigasi menjadi faktor penting untuk ketahanan pangan. Berikut Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tahun 2020-2024 yang diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1.3d Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten	543.192	564.133	664.440	665.930	665.933
2	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	78,62	80,35	81,21	81,29	81,66
3	Panjang Jaringan Irigasi Kab. dalam kondisi rusak (%)	21,38	19,65	18,79	18,71	18,34
4	Rusak ringan (%)	13,50	12,62	12,04	11,98	11,80
5	Rusak sedang (%)	3,10	2,66	2,52	2,51	2,44
6	Rusak berat (%)	4,78	4,37	4,23	4,22	4,10
7	Panjang Jaringan Irigasi Primer Kabupaten dalam kondisi baik (%)	74,48	76,55	77,47	77,52	77,88
8	Panjang Jaringan Irigasi Sekunder Kabupaten dalam kondisi baik (%)	84,80	86,04	86,62	86,73	87,09
9	Panjang Jaringan Irigasi Primer Kabupaten dalam kondisi rusak (%)	25,52	23,45	22,53	22,48	22,48
10	Panjang Jaringan Irigasi Sekunder Kabupaten dalam kondisi rusak (%)	15,20	13,96	13,38	13,27	13,27

Sumber : Bidang SDAI, 2025

Guna mengetahui kondisi sistem irigasi di suatu Daerah Irigasi secara berkala dan berkesinambungan, yang akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan pengelolaan sistem irigasi maka diukur menggunakan pengukuran IKSI yaitu Indeks Kinerja Sistem irigasi.

Tabel 2.1.3e Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Kabupaten Banyumas
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Capaian	Kategori Kinerja**
1	2020	60,072	Kurang dan Perlu Perhatian
2	2021	59,925	Kurang dan Perlu Perhatian
3	2022	59,723	Kurang dan Perlu Perhatian
4	2023	59,482	Kurang dan Perlu Perhatian
5	2024	59,152*	Kurang dan Perlu Perhatian

Sumber: Bidang SDAI, 2025

**Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Kabupaten Banyumas memiliki potensi air baku yang melimpah, hal ini didukung oleh kondisi geografis Kabupaten Banyumas yang berada di lereng Gunung Slamet dan juga masuk ke dalam wilayah Daerah Aliran Sungai Serayu, Daerah Aliran Sungai Tipar, Daerah Aliran Sungai Ijo, dan Daerah Aliran Sungai Cimeneng. Dalam rangka memenuhi kebutuhan suplai air baku, baik untuk irigasi maupun rumah tangga, komersial, dan industri, sampai dengan Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memiliki 21 embung maupun bangunan penampung air baku lainnya. Tetapi dari 21 bangunan penampung air baku tersebut, hanya sebanyak 14 bangunan penampung air baku kondisinya baik, dan 7 unit dalam kondisi sedang dan rusak. Sehingga masih belum mencukupi kebutuhan air baku di Kabupaten Banyumas mengingat kebutuhan air baku masyarakat yang begitu besar dengan jumlah penduduk Kabupaten Banyumas sebanyak 1.896.754 jiwa (sumber: Dindukcapil Kab. Banyumas) menduduki posisi ke - 3 di Jawa Tengah. Berikut uraian kondisi bangunan penampung air baku di Kabupaten Banyumas :

Tabel 2.1.3f Kondisi Bangunan Penampung Air Baku Tahun 2024

No	Nama Embung	Lokasi		Luas (Ha)	Kedalaman (m)	Kondisi
		Desa/Kelurahan	Kecamatan			
1	Embung Situ Elok	Pernasidi	Cilongok	1,20	5,00	Baik
2	Embung Situ Bamban	Kedungwringin	Jatilawang	1,50	5,00	Baik
3	Embung Tapak Bima	Kemawi	Somagede	0,70	5,00	Baik

No	Nama Embung	Lokasi		Luas (Ha)	Kedalaman (m)	Kondisi
		Desa/Kelurahan	Kecamatan			
4	Embung Situ Randegan	Randegan	Wangon	1,00	4,00	Baik
5	Embung Telaga Kumpe	Gununglurah/Sambirata	Cilongok	2,00	1,50	Baik
6	Embung Banteran	Banteran	Sumbang	0,70	5,00	Baik
7	Embung Kendalisada	Kaliori	Kalibagor	0,20	3,00	Rusak
8	Embung Prembun	Buniayu	Tambak	0,40	3,00	Baik
9	Embung Kalisube	Kalisube	Banyumas	0,50	3,00	Baik
10	Embung Sidamulih	Sidamulih	Rawalo	0,20	2,50	Baik
11	Embung Klapagading	Klapagading	Wangon	0,30	3,00	Baik
12	Embung Datar	Datar	Sumbang	0,20	2,00	Baik
13	Embung Mini Wlahar Wetan	Wlahar Wetan	Kalibagor	1,00	2,50	Rusak
14	Embung Karanganyar	Karanganyar	Jatilawang	1,00	4,00	Baik
15	Embung Kemitug Lor	Kemitug Lor	Baturraden	1,20	3,00	Baik
16	Embung Karangnangka	Karangnangka	Kedungbanteng	0,90	3,00	Baik
17	Embung Sawangan	Sawangan	Kebasen	0,70	3,00	Baik
18	Embung Klapagading Kulon	Klapagading Kulon	Wangon	0,80	3,00	Baik
19	Embung Watuagung	Watuagung	Tambak	1,50	3,00	Baik
20	Kolam Retensi Purwokerto	Pasirmuncang	Purwokerto Barat	2,30	3,00	Baik
21	Kolam Retensi Mini Karangpucung	Karangpucung	Purwokerto Selatan	0,01	3,00	Baik

Sumber : Bidang SDAI, 2025

Dari sisi pelayanan air minum dan sanitasi cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak meningkat namun capaiannya baru mencapai sebesar 79,51% pada tahun 2024. Cakupan rumah tangga bersanitasi juga mengalami peningkatan, namun sampai dengan tahun 2024 baru mencapai 93,24%.

Tabel 2. 48
Perkembangan Kinerja Sub Urusan Air Limbah dan Air Minum
Kabupaten Banyumas Tahun 2019 -2023

No	Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase capaian air minum layak (%)	75,45	75,51	76,99	77,57	79,51
2	Persentase rumah tangga bersanitasi layak (%)	87,73	88,83	90	92	93,24

Sumber : Dinperkim Kabupaten Banyumas 2025

Selain menjadi program prioritas pembangunan daerah, beberapa program nasional dan dana stimulan dari Pemerintah Provinsi terkait pembangunan air minum dan sanitasi didesain untuk dapat mendorong capaian target universal access. Program tersebut antara lain Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), hibah air minum, sanitasi berbasis masyarakat, dan sebagainya. Program-program tersebut memberi dukungan mulai dari perencanaan hingga pembangunan fisik. Selain program tersebut Pemerintah Kabupaten Banyumas juga memperoleh alokasi dana DAK untuk air minum dan sanitasi Namun demikian berbagai peluang program tersebut belum mampu mempercepat capaian indikator pembangunan air minum dan sanitasi di Kabupaten Banyumas.

C. Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi

Potensi investasi yang akan dilakukan di Kabupaten Banyumas harus sesuai dengan rencana pola ruang yang ada di Kabupaten Banyumas, untuk saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas sedang dalam tahap revisi yang akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Revisi RTRW yang sekarang sudah diajukan ke Kementerian ATR/BPN dan menunggu persetujuan dari kementerian ATR/BPN, dalam revisi RTRW yang terbaru pola ruang Kabupaten Banyumas terdiri atas: Badan Air, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perkebunan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peternakan, dan Kawasan Tanaman Pangan

Gambar 2.1.3.C Peta Pola Ruang

No	Jenis Sertifikasi	Kode Kompetensi	Jumlah Peserta				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	6	7	8	9	10
7	Pengawas pekerjaan struktur bangunan gedung utama	Jenjang 6				84	
8	Pelaksana lapangan perkerasan jalan beton	Jenjang 6				12	
9	Pelaksana pemeliharaan jalan	Jenjang 6				20	
10	Manager lapangan pekerjaan gedung	Jenjang 6				28	
11	Bimbingan Teknis Penyedia Jasa	Jenjang 6		20		85	
12	Sertifikasi Analisis/ Teknisi/ Operator	Jenjang 6					50
	JUMLAH		82	50	92	316	50

Sumber : Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi, 2025

D. Bangunan Gedung, Penataan bangunan dan Lingkungannya, Persampahan dan Permukiman

Sampai dengan kurun waktu tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas mengelola bangunan gedung pemerintahan sebanyak 84 unit akan tetapi sebanyak 32 unit kondisinya rusak. Jumlah ini relatif besar dan akan meningkat jika tidak ada penanganan. Kerusakan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurangnya perencanaan penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan juga kurangnya rehabilitasi maupun pemeliharaan pada bangunan gedung pemerintahan. Dengan adanya kerusakan bangunan gedung pemerintah tentunya sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat, berikut rincian kondisi bangunan gedung pemerintah:

Tabel 2.1.3h Data Kondisi Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024

No	Jenis bangunan	Baik	Rusak Ringan	Rusak sedang	Rusak Berat	Jumlah
1	Kelurahan	9	16	4	1	30
2	Kecamatan	19	5	4	1	29
3	OPD	24	2	1	0	27
	JUMLAH	52	23	9	2	86

Sumber : Bidang Penataan Bangunan, 2025

Tabel 2.1.3i
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPU Kabupaten Banyumas

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-	Rasio Capaian Pada Tahun ke-
				2024	2025	2026	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kinerja infrastruktur PUPR di Dinas PU	IKU		79,782%	80,601%	81,419%	80,918%	101,42%
2	Persentase wilayah yang terhubung jaringan jalan kondisi mantap	IKK		98,187%	98,489	98,792	97,885%	99,69%
3	Tingkat kemantapan jalan kabupaten / kota	IKK		84,167%	85,626	87,085	71,440%	84,88%
4	Kinerja pelayanan irigasi	IKK		82,820%	83,820	84,820	81,290%	98,15%
5	Rasio jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana	IKK		0,520	0,528	0,536	0,522	100,38%
6	Rasio lokasi rawan longsor yang terlindungi turap	IKK		53,425%	54,297	55,168	53,896%	100,88%
7	Persentase peningkatan kawasan strategis yang tertata	IKK		83,043%	83,106	83,169	82,979%	99,92%
8	Persentase SDM jasa konstruksi tersertifikasi	IKK		77,603%	79,850	82,097	98,270%	126,63%
9	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang			100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.1.3j
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPU
Kabupaten Banyumas

Bidang	Anggaran Pada Tahun ke – (x1.000.000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke – (x1.000.000)					Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rata-Rata Pertum- buhan Anggaran	Rata-Rata Pertum- buhan Realisasi Anggaran
	2020	2022	2022	2023	2024	2020	2022	2022	2023	2024	2020	2022	2022	2023	2024		
Sekretariat	6.942,92	20.527,37	22.689,58	21.142,96	22.907,74	6.359,04	19.538,89	21.474,25	18.825,27	21.746,09	91,59 %	95,18 %	94,64 %	89,04 %	94,93 %	2,22%	27,88%
Perencanaan dan Pembangunan Jalan	130.834,09	68.562,01	100.677,14	47.399,95	41.302,13	129.036,67	56.919,22	90.818,90	45.075,55	39.627,59	98,63 %	83,02 %	90,21 %	95,10 %	95,95 %	-9,64%	-21,03%
Pemeliharaan dan Monev Jalan	8.958,00	15.899,72	30.227,26	41.751,04	38.839,47	8.408,58	14.763,93	29.764,18	38.841,79	38.065,67	93,87 %	92,86 %	98,47 %	93,03 %	98,01 %	19,56%	35,26%
SDA dan Irigasi	31.368,55	33.815,19	28.048,29	21.736,33	18.764,05	25.296,22	28.165,31	22.576,79	21.386,94	16.786,84	80,64 %	83,29 %	80,49 %	98,39 %	89,46 %	-9,77%	-7,87%
Tata Bangunan	12.164,27	163.140,61	151.306,09	33.891,23	86.080,70	11.972,07	61.783,35	146.002,17	30.945,74	71.311,96	98,42 %	37,87 %	96,49 %	91,31 %	82,84 %	47,90%	42,89%
Drainase dan Jasa Konstruksi	2.873,84	2.813,86	3.526,00	5.215,60	3.295,40	2.798,32	2.738,16	3.518,13	5.154,30	3.250,46	97,37 %	97,31 %	99,78 %	98,82 %	98,64 %	2,78%	3,04%
	193.141,68	304.758,76	336.474,36	171.137,11	211.189,49	183.870,90	183.908,86	314.154,36	160.229,59	190.788,60	95,20 %	60,35 %	93,37 %	93,63 %	90,34 %	1,80%	0,74%

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Sumber Daya Air, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Jalan, dan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten, maka kelompok sasaran layanannya akan meliputi :

1. Masyarakat umum
Warga yang memanfaatkan jalan, jembatan, saluran drainase, jaringan air bersih, dan infrastruktur lainnya. Kelompok masyarakat yang terdampak langsung kegiatan pembangunan fisik (misalnya warga di lokasi proyek).
2. Perangkat daerah teknis lain
OPD pengguna infrastruktur (Jalan, irigasi, gedung pemerintah dan lain sebagainya).
OPD yang bekerja sama dalam program lintas sektor (pengelolaan lingkungan, pengelolaan aset dan lain sebagainya).
3. Pemerintah desa/kelurahan
Karena banyak pekerjaan fisik bersinggungan dengan wilayah administrasi desa/kelurahan (jalan desa, irigasi tersier dan lain sebagainya).
4. Pelaku usaha / penyedia jasa konstruksi
Kontraktor, konsultan perencana, konsultan pengawas, Penyedia material atau alat konstruksi dan lain sebagainya.
5. Lembaga non-pemerintah & komunitas
LSM bidang lingkungan, komunitas pejalan kaki/sepeda, kelompok tani (P3A), forum warga dan lain sebagainya.

2.1.5 Hal Lain Yang Dianggap Penting

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas adalah :

1. Koordinasi dengan instansi lain baik koordinasi vertikal maupun horisontal;
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan baik sebelum ataupun sesudah;
3. Inventarisasi / Pendataan seluruh kegiatan;

2.1.6 Kekuatan, Kelemahan, Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan pelaksanaan Tugas dan Fungsi. Namun demikian dapat juga dicari alternatif-alternatif dalam menghadapi permasalahan.

- a. Kekuatan (internal)
 - 1) Tupoksi Dinas jelas;

- 2) Program Dinas merupakan salah satu misi bupati;
 - 3) SDM dinas memiliki komitmen yang tinggi;
 - 4) Kemajuan IPTEK, pendukung pengelolaan Infrastruktur;
- b. Kelemahan (internal)
- 1) Terbatasnya kapasitas SDM;
 - 2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana;
 - 3) Terbatasnya sistem database;
 - 4) Belum optimalnya sistem manajemen Kelembagaan;
- c. Tantangan (eksternal)
- 1) Kebutuhan anggaran yang besar;
 - 2) Kondisi geografis Kab. Banyumas yang mayoritas dataran tinggi (Rawan bencana);
 - 3) Rendahnya partisipasi masyarakat;
 - 4) Koordinasi antara pemangku kepentingan masih rendah.
- d. Peluang (eksternal)
- 1) Tingginya tuntutan masyarakat terhadap Infrastruktur;
 - 2) Dukungan pemerintah daerah terhadap prioritas daerah;
 - 3) Potensi Infrastruktur yang besar;
 - 4) Ketersediaan dana bantuan keuangan dari Pemerintah;

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat dan tidak hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

A. Kondisi Umum Daerah

Secara Geografis Kabupaten Banyumas terletak pada koordinat 108°39' 17" hingga 109°27'15" Bujur Timur dan 7°15'05" hingga 7°37'10" Lintang Selatan. Kelas topografi wilayah Kabupaten Banyumas memiliki rentang ketinggian -4,26 mdpl sampai dengan 3.112 mdpl (Badan Informasi Geospasial, 2018). Sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas berada pada ketinggian 0-200 mdpl, yaitu seluas 75.641 ha atau sekitar 54,37%, dan wilayah terkecil berada pada ketinggian lebih dari 3.000 mdpl, yaitu sekitar 0,03% atau seluas 41,95 ha.

Kondisi kabupaten Banyumas yang banyak pegunungan menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur Jalan, SDA, irigasi maupun Bangunan Gedung.

Wilayah Kabupaten Banyumas berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Banyumas dengan luas 132.759, data terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau yang menyebutkan bahwa luas wilayah Kabupaten Banyumas menjadi 139.115,30 Ha terbagi menjadi lahan sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Luas wilayah Kabupaten Banyumas menurut penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 2.2.1.a

Luas Wilayah Kab. Banyumas Menurut Penggunaan Lahan Tahun 2019-2023

No	Luas Penggunaan Lahan (Ha)	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Lahan Pertanian	100.713	99.984	99.982	97.306	99.152
	a. Lahan Sawah	31.915	31.896	31.882	30.400	31.095
	b. Lahan Pertanian Bukan Sawah	68.798	68.088	68.100	66.907	68.057
2.	Lahan Bukan Pertanian	32.047	32.774	32.776	35.453	33.607
	Total	132.759	132.759	132.759	132.759	132.759

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas

Potensi sumber daya air cukup besar dimana wilayah Kabupaten Banyumas mengalir 176 sungai dasar, total panjang sungai 85.595 km dan beberapa sumber air seperti mata air, embung, dan sebagainya.

Pemanfaatan sumber-sumber air tersebut diantaranya digunakan untuk :

- a. Sistem Irigasi untuk mengairi sawah seluas 32.219 ha yang terdiri dari sawah beririgasi teknis (10.650 Ha), irigasi ½ teknis (4.827), irigasi

- b. Perikanan darat;
- c. Air baku untuk minum dan kebutuhan sehari-hari;
- d. Pengendalian banjir;
- e. Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);

Tabel 2.2.1.b Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Banyumas
Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyumas

Halaman 26

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
		Baturaden, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Jatilawang dan Kecamatan Wangon.
5	Kawasan Peternakan	Semua kecamatan kecuali Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Purwokerto Utara
6	Kawasan Peruntukan Perikanan	Kawasan Minapolitan meliputi 13 kecamatan dengan luasan 432 Ha, yaitu Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Somagede, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Patikraja.
7	Kawasan Pertambangan Mineral	
	a. Kawasan Pertambangan Mineral Logam	Kecamatan Lumir, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Wangon, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, dan Kecamatan Tambak.
	Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kecamatan Lumir, Gumelar, Pekuncen, Ajibarang, Wangon, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturaden, Sumbang, Kembaran, Jatilawang, Purwojati, Rawalo, Patikraja, Kebasen, Sokaraja, Kalibagor, Banyumas, Somagede, Kemranjen, Sumpiuh, dan Tambak.
8	Kawasan Pertambangan Panas Bumi	Kecamatan Sumbang, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Pekuncen.
9	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Kecamatan Baturaden, Sumbang, Kedungbanteng, Cilongok, Pekuncen, Kembaran, Sokaraja, Ajibarang, Gumelar, Lumir, Wangon, Purwojati, Jatilawang, Kebasen, Banyumas, Somagede, Kalibagor, Patikraja, Rawalo, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Karanglewas, dan Perkotaan Purwokerto.
10	Kawasan peruntukan industri	
	a. Kawasan peruntukan industri besar dan menengah	Kecamatan Kemranjen, Sokaraja, Wangon dan Ajibarang seluas kurang lebih 580 hektar.
	b. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro	Di setiap kecamatan
11	Kawasan Peruntukan Permukiman	Perdesaan dan Perkotaan

Sumber : RTRW Kabupaten Banyumas 2011-2031

Sistem jaringan jalan di Kabupaten Banyumas meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan lingkungan, dan jalan desa. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Banyumas di luar jalan desa adalah 1.587,12 km, dengan panjang jalan kewenangan Kabupaten Banyumas sepanjang 1.315 Km (sesuai SK Bupati Nomor 621/421/Tahun 2023 tanggal 07 Agustus 2023), jalan kewenangan Nasional sepanjang 172,66 Km, dan jalan kewenangan Provinsi sepanjang 69,46 Km. Selanjutnya berdasarkan

data Potensi Desa 2018 di Kabupaten Banyumas tidak ada desa terpencil, semua tersedia telah akses jalan aspal/beton yang memadai.

Rasio panjang jalan kewenangan kabupaten terhadap luas wilayah adalah 0,99 km/km2. Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah terbesar adalah pada Kecamatan Purwokerto Timur 3,705 km/Km2, dengan panjang 31,197 Km dan luas 8,42 Km2, dari terkecil ada di Kecamatan Pekuncen 0,512 km/Km2, dengan panjang 47,45 Km dan luas 92,7 Km2.

Panjang jalan yang ada di Kabupaten Banyumas di luar jalan desa adalah 1.716,886 km, dengan persentase kewenangan jalan terdiri atas jalan kewenangan Kabupaten Banyumas sebesar 87,83%, jalan kewenangan Nasional sebesar 10,24%, dan sisanya merupakan jalan kewenangan Provinsi sebesar 1,93%. Kondisi jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banyumas pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.c Kondisi Infrastruktur Jalan Kabupaten Banyumas Tahun 2024

Kondisi Ruas Jalan						Total Panjang
Baik		Sedang		Rusak		
Km	%	km	%	km	%	Km
734,102	55,81%	258,65	19,66%	322,595	24,53%	1.315,000

Sumber: Bidang Pemeliharaan dan Movev Jalan DPU Kabupaten Banyumas, 2025

Besarnya kondisi jalan rusak pada tahun 2024 akibat karena adanya proses alih status dari jalan kewenangan desa atau antar desa menjadi jalan kewenangan kabupaten. Upaya peningkatan konektivitas antar wilayah, antara lain telah dilakukan pembangunan Jalan Gerilya Sudirman yang menghubungkan wilayah Selatan dan Wilayah Tengah Kota Purwokerto sekaligus untuk mengurangi tingkat kepadatan jalan yang sudah ada. Selain itu untuk peningkatan konektivitas antar wilayah, juga dilakukan pembangunan aksesibilitas jalan menuju jembatan Linggamas yang menghubungkan antara Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga. Peningkatan kondisi ruas jalan kabupaten yang mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain akses menuju kawasan wisata Baturraden dan kawasan perbatasan dengan kabupaten tetangga. Di Kabupaten Banyumas terdapat 615 ruas jembatan dengan total panjang 6.357,86 m. Kondisi konstruksi jembatan di Kabupaten Banyumas sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2.1d Kondisi Jembatan Kabupaten Banyumas Tahun 2024

No	Konstruksi	Kondisi (Ruas)				
		Bangunan Atas	Bangunan Bawah	Fondasi	Lantai	Kondisi Secara Umum
1	Baik	6	7	9	9	4
2	Rusak	337	134	76	179	409
3	Rusak Ringan	254	448	506	396	136
4	Rusak Berat	14	20	18	26	51
5	Kritis	3	5	5	4	14
6	Runtuh	1	1	1	1	1
	Jumlah	615	615	615	615	615

Sumber: DPU Kabupaten Banyumas, 2025

Peningkatan kondisi jalan menjadi prioritas untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat, menumbuhkan kembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Sampai dengan Tahun 2024 jalan kondisi mantap mencapai 75,47%.

Bahaya bencana di Kabupaten Banyumas menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Pada kawasan rawan bencana infrastruktur dibutuhkan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Bencana tanah longsor seringkali menyebabkan kerusakan jalan di Kabupaten Banyumas. Lima puluh dua ruas jalan kabupaten dengan total sepanjang 82,48 Km diidentifikasi berada pada kawasan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi.

Dari total 573 Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten 391 Daerah Irigasi dalam kondisi baik, 13 Daerah Irigasi dalam kondisi rusak ringan, dan 169 Daerah Irigasi dalam kondisi Rusak Sedang (DPU Kabupaten Banyumas, 2025)

Adanya kerusakan pada Daerah Irigasi menyebabkan tidak optimalnya ketersediaan air yang berpengaruh pada produksi pertanian. Oleh karena itu Kondisi Daerah Irigasi menjadi faktor penting untuk ketahanan pangan. Berikut Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Banyumas yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.1e Kondisi Infrastruktur Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Banyumas Tahun 2024

No	Jaringan Irigasi	Kondisi Jaringan Irigasi				Total Panjang
		Baik		Rusak		
		M	%	M	%	M
1	Primer	304.7	77,52%	88.368	22,48%	393.07
2	Sekunder	236.65	86,73%	36.22	13,27%	272.87
	Jumlah	541.34	81,29%	124.59	18,71%	665.93

Sumber: DPU Kabupaten Banyumas, 2025

Tabel 2.2.1.f Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten	543.19	564.13	664.44	665.93	665.930*
2	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	78,62	80,35	81,21	81,29	81,29*
3	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi rusak (%)	21,38	19,65	18,79	18,71	18,71*

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	Rusak ringan (%)	13,50	12,62	12,04	11,98	11,98*
5	Rusak sedang (%)	3,10	2,66	2,52	2,51	2,51*
6	Rusak berat (%)	4,78	4,37	4,23	4,22	4,22*
7	Panjang Jaringan Irigasi Primer Kabupaten dalam kondisi baik (%)	74,48	76,55	77,47	77,52	77,52*
8	Panjang Jaringan Irigasi Sekunder Kabupaten dalam kondisi baik (%)	84,80	86,04	86,62	86,73	86,73*
9	Panjang Jaringan Irigasi Primer Kabupaten dalam kondisi rusak (%)	25,52	23,45	22,53	22,48	22,48*
10	Panjang Jaringan Irigasi Sekunder Kabupaten dalam kondisi rusak (%)	15,20	13,96	13,38	13,27	13,27*

Sumber : DPU Kabupaten Banyumas, 2025

*Data Capaian Tahun 2023

Tabel 2.2.1g
Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

No	Tahun	Capaian	Kategori Kinerja**
1	2020	60,072	Kurang dan Perlu Perhatian
2	2021	59,925	Kurang dan Perlu Perhatian
3	2022	59,723	Kurang dan Perlu Perhatian
4	2023	59,252	Kurang dan Perlu Perhatian
5	2024	59,252*	Kurang dan Perlu Perhatian

Sumber: DPU Kabupaten Banyumas, 2025

* Data Capaian Tahun 2023

**Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan pertanian maka operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi menjadi kegiatan prioritas pada tahun-tahun yang akan datang.

Kabupaten Banyumas memiliki potensi air baku yang melimpah, hal ini didukung oleh kondisi geografis Kabupaten Banyumas yang berada di lereng Gunung Slamet dan juga masuk ke dalam wilayah Daerah Aliran

Sungai (DAS) Citanduy, Cimeneng, Serayu, Tipar, Ijo, Pemali, dan Gung. Dalam rangka memenuhi kebutuhan suplai air baku baik untuk irigasi, rumah tangga, komersial, dan industri, sampai dengan Tahun 2023 di Kabupaten Banyumas terdapat 21 (dua puluh satu) bangunan penampung air baku. 14 (empat belas) bangunan penampung air baku dengan kondisi penilaian 80 % keatas sedangkan 7 (tujuh) bangunan penampung air baku dengan kondisi penilaian 80 % kebawah. Sehingga dari kondisi tersebut masih belum mencukupi kebutuhan air baku di Kabupaten Banyumas mengingat kebutuhan air baku masyarakat yang begitu besar dengan jumlah penduduk Kabupaten Banyumas sebanyak 1.896.754 jiwa (sumber: Dindukcapil Kab. Banyumas) menduduki posisi ke - 3 di Jawa Tengah.

Karakteristik geografi wilayah tidak hanya membentuk potensi bagi pengembangan wilayah namun juga menjadi potensi bagi terjadinya bencana. Potensi bencana di Kabupaten Banyumas terdiri atas bencana tanah longsor, rawan bencana banjir, dan rawan bencana angin topan, bencana gunung berapi, bencana keakaran hutan dan lahan. Adapun wilayah rawan bencana di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

a. Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor

Wilayah rawan bencana tanah longsor diidentifikasi berdasarkan tipologi wilayah dan tingkat kerawanan. Penentuan tipologi wilayah rawan longsor didasarkan pada kemiringan tanah. Penetapan tingkat kerawanan longsor ditinjau dari dua hal yaitu berdasar kondisi fisik alam dan aktivitas manusia. Wilayah Kabupaten Banyumas yang telah teridentifikasi sebagai daerah rawan bencana alam tanah longsor terdiri dari 17 kecamatan dan 66 desa.

b. Wilayah Rawan Bencana Banjir

Wilayah rawan bencana banjir di Kabupaten Banyumas meliputi Kecamatan Wangon, Jatilawang, Sumpiuh, Kemranjen, Tambak dan Kecamatan Banyumas. Genangan banjir lainnya ada di wilayah Perkotaan Purwokerto.

Kawasan rawan bencana banjir di Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen, dan Kecamatan Tambak dikarenakan secara geografis sebagian wilayah tersebut lebih rendah dari permukaan air laut.

c. Potensi Rawan Bencana Angin Puting Beliung

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana angin puting beliung terdapat pada Kecamatan Kedungbanteng, Karanglewas, Baturraden, Sumbang, Pekuncen, Ajibarang, Cilongok, Sokaraja, Purwokerto Timur, Sumpiuh, Kemranjen, Patikraja, Kebasen, Tambak, Lumbir, Purwojati, Rawalo, Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur dan Somagede.

d. Wilayah Rawan Bencana Gunung Api

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana gunung api terdapat pada lereng bagian utara Kabupaten Banyumas yang merupakan lereng Gunung Slamet yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 18 Desa, yaitu:

- a) Kecamatan Sumbang: Desa Kotayasa, Limpakuwus, Gandatapa dan Sikapat.
- b) Kecamatan Baturraden: Desa Ketenger, Karangmangu, Karangsalam dan Kemutug Lor.
- c) Kecamatan Karanglewas: Desa Sunyalangu.
- d) Kecamatan Kedungbanteng: Desa Melung, Kutaliman, Windujaya, Kalisalak dan Baseh.
- e) Kecamatan Cilongok: Desa Gununglurah, Sambirata, Sokawera dan Karangtengah.

e. Wilayah Rawan Bencana Kekeringan

Potensi bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Banyumas terdapat pada beberapa desa yang terdapat antara lain meliputi wilayah Kecamatan: Cilongok, Banyumas, Gumelar, Jatilawang, Kalibagor, Kebasen, Kemranjen, Lumbir, Patikraja, Purwojati, Purwokerto Selatan, Sokaraja, Somagede, Sumpiuh, Tambak, Wangon, dan Pekuncen.

B. Permasalahan Yang Dihadapi

a. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara kondisi yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan. Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Banyumas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

- Masih rendahnya jalan kabupaten dalam kondisi baik
- Masih terdapat kerusakan pada irigasi kabupaten

b. Permasalahan Bidang Ke-PUan

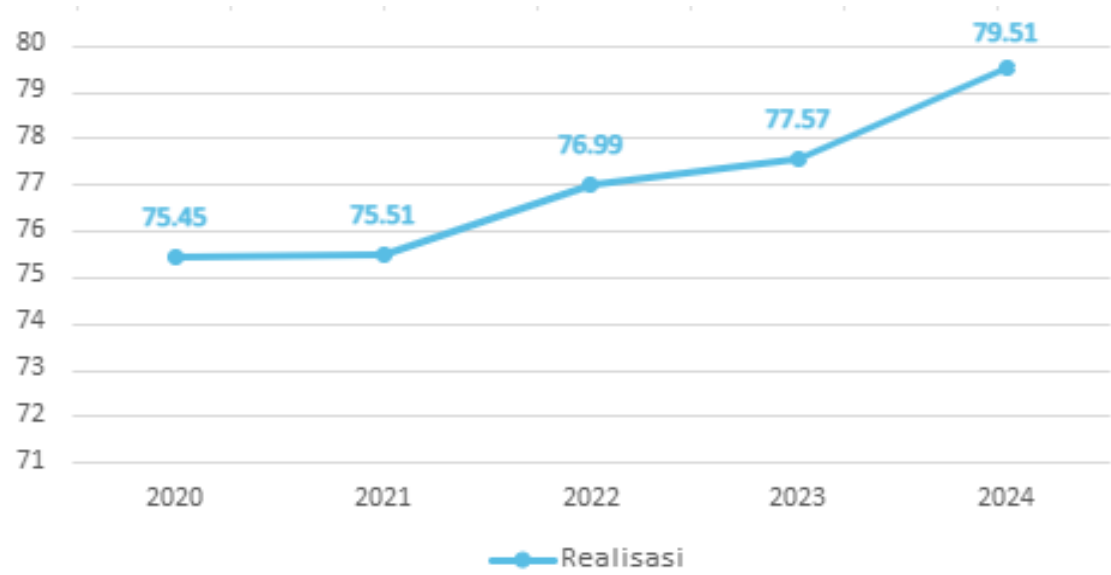
- Keterbatasan anggaran, menyebabkan realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan saat perencanaan infrastruktur.
- Peran DPU dalam penerbitan IMB, masih sebatas rekomendasi teknis, sedangkan penerbitannya dilakukan oleh OPD lain
- Kondisi geografis Kabupaten Banyumas sebagian besar berbukit dengan lereng terjal di Utara dan Barat yang merupakan daerah rawan bencana tanah longsor;
- Sarana prasarana kebinamargaan, kualitas data, perencanaan dan pengawasan masih belum memadai;

c. Permasalahan Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan :

- Tingginya lalu lintas angkutan barang di jalan Kabupaten dan desa, dengan berat muatan barang melebihi kapasitas jalan;
 - Sebagian besar jalan Kabupaten, struktur konstruksinya masih dibawah standar jalan kolektor;
 - Sebagian besar jalan Kabupaten, lebarnya masih dibawah standar jalan kolektor
 - Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik masih rendah;
- d. Permasalahan Bidang SDA dan Irigasi :
- Menurunnya potensi air akibat kerusakan lingkungan dan Bencana Alam;
 - Tingginya angka kerusakan infrastruktur jaringan sungai dan drainase;
 - Minimnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian sumber daya air.
 - Jumlah bangunan penyedia air baku masih relatif sedikit
 - Sungai bukan kewenangan Pemerintah kabupaten, sehingga Pemerintah kabupaten tidak menangani pengelolaan Sungai
 - Masih terdapat daerah genangan banjir Kewenangan Pemerintah Kab. Banyumas
 - Menurunnya status areal sawah yang semula dapat terairi dari jaringan irigasi, menjadi sawah tadah hujan akibat menurunnya daya dukung sumber daya air dan lahan serta kerusakan jaringan irigasi;
 - Perubahan pemanfaatan irigasi bukan hanya untuk pertanian lahan sawah namun juga untuk perikanan, peternakan, kebutuhan domestik dll;
 - Kerusakan jaringan irigasi bertambah, dikarenakan jaringan irigasi sebagian besar berumur tua sedangkan perbaikan/rehabilitasi yang dilakukan masih bersifat parsial dan penanganan operasi dan pemeliharaan (O&P) masih terbatas belum memenuhi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP);
 - Menurunnya jumlah tenaga O&P jaringan irigasi;
 - Belum optimalnya peran serta masyarakat (petani/P3A) dalam pengelolaan jaringan irigasi.
- e. Permasalahan Bidang Penataan bangunan :
- Jumlah SDM dalam pemantauan pembangunan Bangunan masih kurang, sedangkan pemahaman masyarakat terkait perijinan masih kurang.
 - Kurangnya perhatian dalam pemeliharaan bangunan pemerintah oleh penggunanya.
- f. Permasalahan Bidang Drainase dan Pembinaan Jasa Konstruksi :
- Masih rendahnya kapasitas dan kualitas jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan Infrastruktur Daerah
 - Masih terdapat kesenjangan kuantitas maupun kualitas infrastruktur daerah antar wilayah di Kabupaten Banyumas

g. Cakupan Air Minum dan Sanitasi

Identifikasi permasalahan dalam penyediaan air minum di Kabupaten Banyumas mencerminkan masih adanya kesenjangan akses dan kualitas layanan, khususnya di wilayah perdesaan. Meskipun 79,51% rumah tangga telah memiliki akses terhadap air minum layak, capaian tersebut masih didominasi oleh sumber bukan perpipaan (67,11%) yang cenderung kurang terjamin kualitas dan keberlanjutannya. Sementara itu, akses terhadap air minum aman melalui jaringan perpipaan baru menjangkau 32,89%, dan sebagian besar kualitas layanan di wilayah perdesaan—yang dikelola masyarakat—belum memenuhi standar air minum aman. Kondisi ini menjadi tantangan utama dalam upaya mencapai target SDGs, yaitu menjamin akses universal terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk.



Gambar 2. 2.1.H Grafik Peningkatan Cakupan Air Minum
Sumber : DINPERKIM Kabupaten Banyumas

Di Kabupaten Banyumas capaian sanitasi layak sampai dengan tahun 2024 sebesar 93,24 % sehingga perlu dilakukan strategi untuk dapat menangani atau memenuhi akses sanitasi layak. Adanya pembaharuan data (*updating*) data terkait warga / masyarakat yang memiliki akses sanitasi perlu dilakukan untuk dapat menangani lebih akurat. Alokasi anggaran Pemerintah Daerah masih sangat sedikit untuk menyelesaikan permasalahan ini dan masih mengandalkan anggaran Pemerintah Pusat seperti DAK dan Earmark. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi ketergantungan kepada anggaran selain APBD Kabupaten Banyumas.

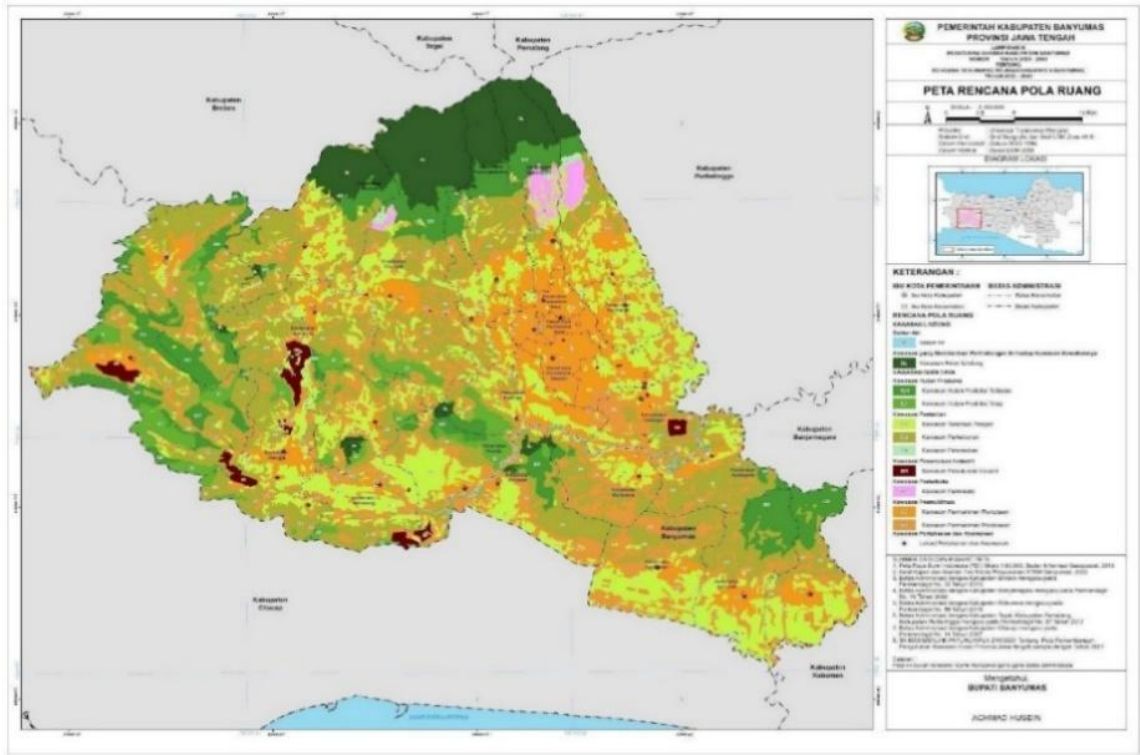
h. Penyelenggaraan Penataan Ruang yang belum Optimal

Setiap potensi investasi yang akan dikembangkan di Kabupaten Banyumas harus sejalan dengan ketentuan pola ruang yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Banyumas. Saat ini, RTRW Kabupaten Banyumas tengah dalam proses revisi yang akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Draf revisi RTRW tersebut telah diajukan kepada Kementerian ATR/BPN dan sedang menunggu persetujuan. Revisi RTRW ini penting untuk memberikan kepastian hukum serta arah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan investasi daerah.

Dalam rancangan RTRW terbaru, struktur dan pola ruang Kabupaten Banyumas akan disusun secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan, yang mencakup berbagai peruntukan ruang seperti: Badan Air, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perkebunan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peternakan, dan Kawasan Tanaman Pangan. Setiap kawasan ini memiliki karakteristik dan fungsi tertentu yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, pemanfaatan ruang dan arah investasi di Kabupaten Banyumas harus mempertimbangkan kesesuaian terhadap revisi RTRW yang akan ditetapkan, agar pengembangan wilayah dapat berlangsung secara harmonis, berdaya saing, dan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.



Gambar 2. 1.1J Peta Pola Ruang
Sumber : DINPERKIM Kab. Banyumas

C. Kondisi Yang Diharapkan Dan Proyeksi Ke Depan

Adapun kondisi yang diharapkan :

- a. Terlaksananya pengembangan pengelolaan dan konservasi Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya;
- b. Terwujudnya pengelolaan Air Baku, serta tercukupinya kebutuhan air baku bagi masyarakat baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
- c. Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya;
- d. Terlaksananya peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Jalan dan Jembatan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas jalan guna mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat;
- e. Tersedianya Perencanaan yang matang serta Sarana dan Prasarana binamarga guna mendukung pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap, aman, lancar, efisien dan efektif;
- f. Terwujudnya wilayah bebas bencana serta kesiapan terhadap bencana;
- g. Terlaksananya pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang merata;
- h. Terlaksananya peningkatan SDM, sarana prasarana aparatur serta sistem administrasi perkantoran yang baik untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;

2.3.1 Telaahan Renstra K/L / Propinsi

3.2.1.1 Renstra Kementerian PUPR

RPJMN periode pertama (tahun 2025-2029) didasarkan atas Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Tahun 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Misi pembangunan/ Asta Cita, yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional. Prioritas Nasional tersebut antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan visi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang andal dan berkelanjutan yang selaras dengan prioritas nasional, Misi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Meningkatkan ketahanan air nasional melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air;
- b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional;
- c. Meningkatkan akses infrastruktur keciptakaryaan yang berkualitas untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan;
- d. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas SDM, khususnya bidang konstruksi dan infrastruktur, yang berdaya saing, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi;
- f. Memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur yang efektif, transparan, dan akuntabel; dan
- g. Mewujudkan infrastruktur PU perkotaan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah diuraikan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan tujuan pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan air nasional;
2. Memperkuatnya kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan;
3. Memperkuatnya akses infrastruktur keciptakaryaan yang andal dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kontribusi pemenuhan ketersediaan prasarana yang mendukung Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan yang andal dan berkualitas;
5. Meningkatnya pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi;
6. Memperkuatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya; dan
7. Terwujudnya infrastruktur PU di perkotaan yang berketahanan dan berkelanjutan.

3.2.1.2 Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa tengah

Visi pemerintah Jawa Tengah adalah Terwujudnya Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang Maju, Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045.

Adapun pencapaian visi akan mengacu pada 6 misi berikut :

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas.
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif.
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan.
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Adapun implementasinya akan menyasar pada :

1. Melahirkan Pemerintahan yang *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa.
2. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan *day care* untuk buruh di Kawasan Industri
4. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja
5. Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan
6. Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren
7. Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin
8. Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa

miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi

9. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana.
10. Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional
11. Penanggulangan Bencana dan keberlanjutan Lingkungan melalui Mageri segoro untuk mengamankan garis pantai

2.3.2 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.3.2.1 Struktur Ruang Kabupaten Banyumas

A. Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Kegiatan-kegiatan utama dan aksesibilitas regional pada kawasan potensial yang secara spasial dan fungsional berperan membentuk sistem pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Banyumas, adalah :

- a. Kegiatan pertanian tanaman pangan di kawasan pertanian potensial Kabupaten Banyumas;
- b. Kegiatan administrasi pemerintahan, ekonomi regional, pendidikan, kesehatan di Perkotaan Purwokerto;
- c. Pariwisata alam dan buatan lebih terkonsentrasi di kawasan lereng Gunung Slamet yang tercakup dalam wilayah Kecamatan Baturaden, Sumbang, dan Cilongok;
- d. Jalur transportasi nasional yaitu jalur Jakarta/Jawa Barat – Cilacap – Yogyakarta dan Jakarta/Jawa Barat – Tegal – Cilacap – Yogyakarta; dan
- e. Kegiatan industri yang akan memberikan pengaruh bagi wilayah *hinterlandnya*, seperti perkembangan permukiman, perdagangan dan kegiatan lainnya.

1. Sistem Perkotaan

A. Pusat Kegiatan

Struktur ruang Kabupaten Banyumas ditetapkan dalam tiga sistem perkotaan-perkotaan yang saling berkaitan dalam satu sistem pengembangan wilayah di Kabupaten Banyumas, meliputi sistem perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Adapun hirarki sistem pusat perkotaan di wilayah Kabupaten Banyumas yang merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi di wilayah kabupaten terdiri atas :

a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu PKW II/C/I di Perkotaan Purwokerto sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRWN dan RTRWP Provinsi Jawa Tengah. Secara fungsional, PKW Perkotaan Purwokerto, meliputi:

- a) Kecamatan Purwokerto Utara;
- b) Kecamatan Purwokerto Timur;
- c) Kecamatan Purwokerto Selatan;
- d) Kecamatan Purwokerto Barat;
- e) sebagian Kecamatan Sumbang;
- f) sebagian Kecamatan Baturraden;
- g) sebagian Kecamatan Kedungbanteng;
- h) sebagian Kecamatan Kembaran;
- i) sebagian Kecamatan Karanglewas;
- j) sebagian Kecamatan Sokaraja; dan
- k) sebagian Kecamatan Patikraja.

Perkotaan Purwokerto sebagai Pusat Pengembangan Wilayah (PKW II/C/I) merupakan kota utama di wilayah Kabupaten Banyumas dan dalam kerangka sistem perkotaan regional dan nasional merupakan salah satu pengembangan kota pertumbuhan nasional yang diarahkan untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan melalui pengembangan dan peningkatan fungsi.

b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Perkotaan yang akan dikembangkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi :

- a) perkotaan Banyumas;
- b) perkotaan Ajibarang;
- c) perkotaan Sokaraja; dan
- d) perkotaan Wangon.

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Banyumas, meliputi:

- a) perkotaan Jatilawang;
- b) perkotaan Sumpiuh;
- c) perkotaan Patikraja;
- d) perkotaan Baturaden;
- e) perkotaan Cilongok;
- f) perkotaan Lumbir;
- g) perkotaan Gumelar;
- h) perkotaan Pekuncen;
- i) perkotaan Purwojati;
- j) perkotaan Rawalo;
- k) perkotaan Kemranjen;
- l) perkotaan Tambak;

- m) perkotaan Sumbang;
- n) perkotaan Kembaran;
- o) perkotaan Karanglewas;
- p) perkotaan Kebasen;
- q) perkotaan Somagede;
- r) perkotaan Kedungbanteng; dan
- s) perkotaan Kalibagor.

B. Fungsi Pelayanan

Rencana fungsi pelayanan sistem perkotaan di Kabupaten Banyumas yakni PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), PKL (Pusat Kegiatan Lokal), dan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan), meliputi:

1. Pusat Kegiatan Wilayah yang berada di Perkotaan Purwokerto memiliki fungsi pelayanan utama berupa perdagangan berskala regional, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perbankan. Perkotaan Purwokerto dalam lingkup internal merupakan pusat perdagangan berskala regional, pemerintahan, pendidikan tinggi, kesehatan, perbankan, sedangkan dalam lingkup eksternal merupakan salah satu pusat pertumbuhan di bagian barat provinsi Jawa Tengah yang diharapkan dapat menjadi kutub pertumbuhan bagi perkembangan wilayah baik dalam kegiatan perdagangan khususnya pemasaran hasil pertanian, kegiatan pariwisata maupun pendidikan tinggi.
2. Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Banyumas memiliki fungsi pelayanan yang bervariasi sesuai dengan kelengkapan sarana dan kecenderungan perkembangannya. Berikut ini fungsi pelayanan PKL di Kabupaten Banyumas, meliputi :
 - PKL Perkotaan Banyumas dengan fungsi pelayanan utama berupa pemerintahan, dan kesehatan di Kecamatan Banyumas;
 - PKL Perkotaan Ajibarang dengan fungsi pelayanan utama berupa kesehatan, transportasi, industri, dan perdagangan skala kabupaten di Kecamatan Ajibarang;
 - PKL Perkotaan Sokaraja dengan fungsi pelayanan utama berupa pendidikan, kesehatan, perdagangan skala kabupaten dan industri di Kecamatan Sokaraja; dan
 - PKL Perkotaan Wangon dengan fungsi pelayanan utama berupa perdagangan skala kabupaten, transportasi, dan industri di Kecamatan Wangon;
3. Pusat Pelayanan Kawasan di Kabupaten Banyumas memiliki fungsi pelayanan berupa pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

2. Sistem Perdesaan

A. Pusat Kegiatan Pedesaan

Sistem perdesaan di Kabupaten Banyumas terdiri dari Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, meliputi Desa Cihonje (Kecamatan Gumelar), Desa Tipar (Kecamatan Rawalo), Desa Paningkaban (Kecamatan Gumelar), Desa Jompo Kulon (Kecamatan Sokaraja), dan Desa Sidamulya (Kecamatan Kemranjen). Desa Pusat Pelayanan Lingkungan dititikberatkan pengembangannya sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan pertanian dengan didukung fungsi infrastruktur pelayanan perdesaan dengan orientasi pelayanan dusun dan antar desa yang berdekatan.

B. Fungsi Pelayanan

Sistem permukiman perdesaan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a) Permukiman perdesaan akan menjadi penyeimbang pertumbuhan pusat dan wilayah belakang sehingga tidak terjadi kesenjangan yang semakin melebar antara perdesaan dan perkotaan;
- b) Permukiman perdesaan diarahkan menjadi tempat transformasi fungsi perkotaan kepada kawasan perdesaan, dan menjadi pusat distribusi dan koleksi sumber daya yang diperlukan bagi pengembangan wilayah perdesaan; dan
- c) Peningkatan penyediaan infrastruktur dan sarana pelayanan untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian dan pelayanan, memperkuat keterkaitan (linkage) dengan daerah pusat, sehingga terwujud pemerataan pembangunan.

Pembangunan kawasan perdesaan dititikberatkan pada pengembangan potensi pertanian yang merupakan sektor basis perekonomian di Kabupaten Banyumas. Kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan berada di daerah perdesaan sedangkan kegiatan lainnya berlokasi di pusat pertumbuhan (desa kawasan agrowisata dan minapolitan) atau pusat pelayanan yang merupakan konsentrasi permukiman di satu titik lokasi dan daerah belakangnya (*hinterland*).

B. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah dibagi menjadi rencana sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya.

1. Sistem Jaringan Prasarana Utama

Rencana sistem prasarana utama pada wilayah Kabupaten Banyumas merupakan sistem jaringan transportasi darat dan jaringan transportasi perkeretaapian. Prasarana jaringan jalan yang akan dikembangkan di wilayah ini diharapkan dapat menampung

pergerakan penduduk di dalam wilayah maupun ke luar wilayah dan mampu merangsang kegiatan perekonomian terutama bagi daerah terpencil/tertinggal, serta mendukung keterkaitan antar pusat pelayanan secara hirarkis sebagaimana yang telah ditentukan dalam struktur tata ruang pada sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

A. Sistem Jaringan Transportasi Darat

Sistem jaringan transportasi darat meliputi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Secara umum Kabupaten Banyumas merupakan simpul pergerakan transportasi dari wilayah sekitarnya.

1) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a. Jaringan jalan

Adapun jaringan jalan di wilayah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

a) Jaringan Jalan Nasional Pada Wilayah Kabupaten

Jaringan jalan nasional dalam pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas membentang dari :

1) Pengembangan jalan arteri primer meliputi:

- jalan penghubung Karangpucung – Wangon dengan panjang ruas 21,498 km;
- jalan penghubung Rawalo – Sampang dengan panjang ruas 4,134 km;
- jalan penghubung Sampang – Buntu dengan panjang ruas 8,808 km;
- jalan penghubung Wangon – Batas Banyumas Tengah dengan panjang ruas 5,696 km;
- jalan penghubung Purwokerto – Patikraja dengan panjang ruas 5,876 km; dan
- jalan penghubung Patikraja – Rawalo dengan panjang ruas 9,150 km.

2) Pengembangan jalan kolektor primer meliputi:

- jalan penghubung Wangon – Menganti dengan panjang ruas 11,598 km;
- jalan penghubung Menganti – Rawalo dengan panjang ruas 2,499 km;
- jalan penghubung Buntu – Banyumas dengan panjang ruas 8,551 km;
- jalan penghubung Banyumas – Batas Banyumas utara dengan panjang ruas 8,311 km;
- jalan penghubung Batas Banyumas Tengah – Klampok dengan panjang ruas 10,049 km;

- jalan penghubung Batas Kabupaten Tegal – Ajibarang dengan panjang ruas 10,254 km;
- Jalan penghubung Ajibarang – Wangon dengan panjang ruas 12,979 km;
- jalan penghubung Ajibarang – Batas Kota Purwokerto dengan panjang ruas 13,548 km;
- jalan penghubung Batas Kota Purwokerto – Sokaraja dg. panjang ruas 4,898 km;
- jalan penghubung Sokaraja – Kaliori dengan panjang ruas 5,809 km; dan
- jalan penghubung Kaliori – Banyumas dengan panjang ruas 2,697 km.
- Jalan Pattimura dengan panjang ruas 0,534 km;
- Jalan Yos Sudarso dengan panjang ruas 1,373 km;
- Jalan Sudirman dengan panjang ruas 6,126 km;
- Jalan Gerilya dengan panjang ruas 4,843 km;
- Jalan Veteran dengan panjang ruas 2,270 km;

b) Jaringan Jalan Provinsi Pada Wilayah Kabupaten

Jaringan jalan provinsi yang berada di Kabupaten Banyumas, meliputi :

- jalan penghubung Purwokerto – Baturaden;
- jalan penghubung Sokaraja – Purbalingga;
- jalan penghubung Kaliori – Patikraja;
- jalan penghubung Menganti – Kesugihan;
- Jalan Dr. Gumbreg;
- Jalan Raden Patah;
- Jalan Sunan Bonang; dan
- Jalan Sunan Ampel.

c) Jaringan Jalan Kabupaten

Perencanaan sistem jaringan transportasi di Kabupaten Banyumas dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas antar pusat kegiatan/pusat pelayanan melalui peningkatan fungsi dan perencanaan jalan-jalan baru yang berfungsi sebagai jalur jalan lingkar untuk mengarahkan kegiatan menerus yang melewati kawasan perkotaan, khususnya kawasan perkotaan yang cenderung berkembang pesat dengan fungsi sebagai PKW dan PKL. Pertimbangannya adalah untuk mengurangi konflik lalu lintas yang diakibatkan hambatan samping dari berbagai kegiatan perkotaan yang ada. Adapun pengembangan dan peningkatan jaringan jalan Kabupaten Banyumas adalah :

- Pengembangan Jalan lingkar Utara Sokaraja sebagai pengalih arus menerus dari arah Timur (Kab. Purbalingga dan sekitarnya) ke arah Barat menuju Tegal, Jakarta dan

sekitarnya, untuk mengurangi konflik lalu lintas di kawasan IKK Sokaraja;

- Pengembangan Jalan lingkaran Selatan Sokaraja sebagai pengalih arus menerus dari arah Timur (Yogyakarta dan sekitarnya) ke arah Barat menuju Tegal, Jakarta dan sekitarnya, untuk mengurangi konflik lalu lintas di kawasan IKK Sokaraja;
- Pengembangan jalan Pegalangan-Gunung Tugel-Purwokerto Selatan sehingga dapat berfungsi sebagai jalur jalan kolektor untuk mendukung pergerakan regional;
- Pengembangan akses jalan (Sokaraja – Karangduren – Kalisogra Wetan – Kedungbenda – Kemangkong – Tidu – Wirasaba) menuju Bandara Wirasaba Kabupaten Purbalingga;
- Peningkatan jalan penghubung jalan Jenderal Sudirman – jalan Gerilya;
- Pengembangan akses jalan menuju kawasan pengembangan pertambangan Panas Bumi Baturaden; dan
- Peningkatan jalan Dukuhwaluh-Kembaran-Purbalingga sehingga berfungsi sebagai jalur jalan kolektor.

b. Jaringan Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

a) Terminal Penumpang

Rencana pengembangan sarana terminal di wilayah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1) Terminal Tipe A

Terminal penumpang tipe A ini melayani kendaraan umum untuk antar kota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, dan angkutan perdesaan. Terminal ini harus terletak pada jaringan jalan arteri primer. Pada wilayah Kabupaten Banyumas, terminal yang dikembangkan menjadi terminal penumpang tipe A di Perkotaan Purwokerto.

2) Terminal Tipe B

Terminal tipe ini melayani kendaraan umum untuk antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan, atau dapat pula menjadi persinggahan angkutan antar kota antar provinsi yang melalui. Terminal tipe B di Kabupaten Banyumas direncanakan dikembangkan pada sub-terminal yang sudah ada, yaitu di Kecamatan Ajibarang dan Wangon.

3) Terminal Tipe C

Terminal tipe ini melayani kendaraan umum terutama untuk angkutan perdesaan. Terminal tipe C pada Kabupaten Banyumas direncanakan dikembangkan pada ibu kota Kecamatan Sokaraja, Patikraja, Karanglewas, Purwojati, dan Banyumas.

b) Terminal Barang

Lokasi-lokasi pengembangan terminal barang adalah pada jalur transportasi nasional baik berupa transportasi jalan di Kecamatan Patikraja, Ajibarang, Wangon, dan Kemranjen serta terminal angkutan barang yang berbasis rel di Stasiun Notog Kecamatan Patikraja.

c. Jaringan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pengembangan sarana prasarana angkutan umum massal, meliputi:

a) Angkutan umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) yang melayani Perkotaan Purwokerto, kabupaten lain dan/atau kota-kota lain di luar Provinsi Jawa Tengah;

b) Angkutan umum Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) yang melayani Perkotaan Purwokerto ke kota-kota lain di dalam Propinsi Jawa Tengah, meliputi:

- Purwokerto – Tegal – Brebes;
- Purwokerto – Purbalingga – Pemalang;
- Purwokerto – Banjarnegara – Wonosobo – Temanggung – Semarang;
- Purwokerto – Cilacap; dan
- Purwokerto – Kebumen – Purworejo – Magelang.

c) Angkutan pedesaan yang melayani pergerakan penduduk antara Perkotaan Purwokerto, Perkotaan Banyumas, Perkotaan Sokaraja, Perkotaan Wangon, dan Perkotaan Ajibarang dengan Ibu Kota Kecamatan di wilayah Kabupaten, meliputi:

- Purwokerto – Kembaran dan/atau Sumbang dan/atau Baturraden;
- Ajibarang – Pekuncen dan/atau Gumelar dan/atau Cilongok;
- Wangon – Jatilawang dan/atau Purwojati dan/atau Rawalo – Kebasen;
- Wangon – Lumbir dan/atau Gumelar;
- Banyumas – Patikraja dan/atau Somagede; dan
- Sokaraja – Banyumas dan/atau Kembaran – Sumbang.

2) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kabupaten Banyumas memiliki banyak sungai, akan tetapi jaringan transportasi yang paling utama dalam struktur ruang adalah sistem jaringan jalan dan kereta api. Oleh karena itu, pengembangan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan di Kabupaten Banyumas berupa pengembangan angkutan sungai pada rencana wisata Sungai River Voyage yang meliputi:

1. pengembangan dermaga penyeberangan Wisata Sungai Serayu River Voyage; dan
2. pengembangan sarana penyeberangan Wisata Sungai Serayu River Voyage.

B. Jaringan Transportasi Perkeretaapian

1) Pengembangan Prasarana Kereta Api

Rencana pengembangan jaringan transportasi perkeretaapian di Kabupaten Banyumas, meliputi :

1. Pembukaan jalur kereta api komuter Purwokerto-Slawi, Purwokerto-Kutoarjo, dan Purwokerto-Wonosobo;
2. Pembangunan jaringan rel kereta api jalur ganda (*double track*), yaitu perencanaan pengembangan jalur rel *double track* yang meliputi :
 - a. Pengembangan jalur ganda Cirebon – Kroya;
 - b. Pengembangan jalur ganda Kroya – Kutoarjo.
3. Penertiban perlintasan sebidang yang tidak resmi pada jalur ganda Cirebon – Kroya –Kutoarjo.

2) Pengembangan Sarana Kereta Api

Pengembangan sarana kereta api di Kabupaten Banyumas yakni dengan melakukan pengembangan Stasiun Kereta Api di Kabupaten Banyumas melalui peningkatan stasiun-stasiun eksisting di wilayah Kabupaten Banyumas.

3) Peningkatan Pelayanan Kereta Api

Rencana peningkatan pelayanan kereta api di Kabupaten Banyumas, meliputi:

1. Peningkatan akses terhadap layanan kereta api; dan
2. Jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

2. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumberdaya air, dan jaringan prasarana wilayah lainnya.

A. Sistem Jaringan Prasarana Energi

Sistem jaringan prasarana energi dibagi menjadi jaringan pipa minyak dan gas bumi, jaringan transmisi tenaga listrik, dan gardu induk.

1. Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi
2. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
3. Tenaga Listrik

B. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pengembangan jaringan telekomunikasi diarahkan pada pusat-pusat kegiatan seperti pemerintahan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan permukiman. Sistem jaringan telekomunikasi dapat dibagi menjadi dua yakni jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel.

1. Pembangunan Jaringan Telepon Kabel
2. Pembangunan Jaringan Telepon Nirkabel

C. Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pengembangan Sistem jaringan sumberdaya air dapat dibagi menjadi tiga yakni pengembangan wilayah sungai, pengembangan sistem jaringan air bersih, dan pengembangan sistem jaringan irigasi.

1) Sistem Wilayah Sungai

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air pada dasarnya adalah perencanaan pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Banyumas baik air yang di atas, pada, maupun di bawah permukaan bumi. Sedangkan 4 aspek yang terkait dalam pengelolaan sumber daya air Kabupaten Banyumas adalah :

1. Aspek Perlindungan

Pemanfaatan sumber daya air yang ada harus memperhatikan aspek perlindungan untuk menghindari rusaknya atau hilangnya sumber – sumber mata air yang menjadi sumber utama potensi air baku. Maka dalam tata ruang apabila akan memanfaatkan lahan lindung maupun lahan konservasi air untuk kegiatan sosial ekonomi wajib memperhitungkan akibat yang akan muncul hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap sumber daya air yang ada di Kabupaten Banyumas.

2. Aspek Pengendalian

Pengendalian diperlukan untuk menghindari adanya eksploitasi yang berlebihan agar sumber – sumber mata air tetap terjaga.

3. Aspek Pengembangan

Sumber daya air yang merupakan kebutuhan dasar manusia bisa dikembangkan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan keluarga harian tetapi juga bisa di arahkan dan dikembangkan ke pengembangan potensi lainnya seperti industri air kemasan, pariwisata air, pembangkit listrik dan sebagainya.

4. Aspek Pemanfaatan

Sebagai sebuah potensi, sumber daya air harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat secara umum tetapi tetap harus berada di koridor pemanfaatan yang benar dan sustainable.

Konsep perencanaan sumber daya air Kabupaten Banyumas meliputi :

1. Pengelolaan Wilayah Sungai Serayu – Bogowonto dan Wilayah Sungai Citanduy;
2. Peningkatan pengelolaan DAS Serayu, DAS Ijo, dan DAS Tipar di Wilayah Sungai Serayu – Bogowonto;
3. Peningkatan pengelolaan DAS Cimeneg di Wilayah Sungai Citanduy;
4. Pembuatan embung untuk kebutuhan air baku, pertanian dan pengendalian banjir, meliputi Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Kalibagor, dan Kecamatan Wangon.
5. Pembuatan area resapan air melalui program konversi lahan tidak produktif; dan
6. Konservasi situ, meliputi:
 - a. Situ Pernasidi di Kecamatan Cilongok;
 - b. Situ Bamban di Kecamatan Jatilawang;
 - c. Situ Randegan di Kecamatan Wangon;
 - d. Situ Karanganyar di Kecamatan Jatilawang;
 - e. Situ Gununglurah di Kecamatan Cilongok; dan
 - f. Situ Tapak di Kecamatan Kemranjen.

2) Sistem Jaringan Irigasi

Kewenangan untuk pengelolaan jaringan sistem irigasi terdiri 3 kewenangan pengelolaan yang antara lain :

1. Daerah irigasi dengan kewenangan Pemerintah Pusat
Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat mempunyai luas areal potensial seluas 6.578 ha sedangkan luas areal fungsionalnya sebesar 5.626 ha. Daerah irigasi tersebut berada di daerah irigasi Tajum seluas 3.200 ha dan daerah irigasi Serayu 3.378 ha.
2. Daerah irigasi dengan kewenangan Pemerintah Provinsi
Daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi adalah daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kewenangan pemerintah provinsi

dalam menangani irigasi yang terdapat di wilayah Kabupaten Banyumas memiliki 4.378 ha areal potensial dan 4.261 ha areal fungsional. Daerah irigasi tersebut meliputi :

- a. Daerah irigasi Adongbang Junjungan seluas 1.439 ha;
- b. Daerah irigasi Kedunglimus Arca seluas 1.288 ha;
- c. Daerah irigasi Banjaran seluas 1.200 ha;
- d. Daerah irigasi Kalisapi seluas 206 ha; dan
- e. Daerah irigasi Kebasen seluas 486 ha.

3. Daerah irigasi dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten
Daerah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten adalah daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan menjadi daerah irigasi yang terluas dalam kewenangannya. Dengan luas 17.665 ha areal potensial serta 16.497 ha areal fungsional, daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas menjadi daerah irigasi yang terluas dalam kewenangannya dengan jumlah daerah irigasi sebanyak 653 DI. Dalam operasionalnya untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten terbagi menjadi dua yaitu daerah irigasi kewenangan pemerintah desa dan daerah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten.

Daerah irigasi yang ada di Kabupaten Banyumas dari jenis irigasinya terdiri dari 3 daerah irigasi yaitu :

1. Daerah irigasi sederhana (9.826,27 ha atau 37 % dari seluruh areal fungsional irigasi di Kabupaten Banyumas);
2. Daerah irigasi setengah teknis (4.045 ha atau 15 % dari seluruh areal fungsional irigasi di Kabupaten Banyumas); dan
3. Daerah irigasi teknis (48 % atau seluas 12.604, 56 ha) dari seluruh areal fungsional irigasi di Kabupaten Banyumas).

Dengan kondisi di atas, maka rencana pengembangan jaringan sistem irigasi di Kabupaten Banyumas antara lain :

1. Mengoptimalkan wilayah potensial pada daerah irigasi agar lebih fungsional. Optimalisasi tersebut dengan kegiatan rehabilitasi sistem jaringan irigasi yang dalam kondisi rusak baik rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan terutama untuk daerah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten. Diharapkan dengan perbaikan jaringan sistem yang rusak bisa meningkatkan rasio terairi lebih dari 80 % karena berdasarkan data tahun 2008 rasio terairi pada wilayah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten baru mencapai 35,23 %;

2. Pengembangan dan pembangunan sistem irigasi primer dan sekunder untuk memperluas wilayah pertanian yang terlayani oleh irigasi teknis maupun setengah teknis; dan
3. Pengembangan dan pembangunan sistem irigasi tersier oleh perkumpulan petani pemakai air dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah.

3) Sistem Pengelolaan Air Baku

Konsep rencana pengembangan sistem pengelolaan air baku di Kabupaten Banyumas mengacu pada azas – azas pemanfaatan sumber daya air yang telah dibahas antara lain azas kemanfaatan, keseimbangan dan kelestarian. Dalam pemanfaatan air baku di Kabupaten Banyumas hal – hal yang perlu menjadi perhatian antara lain :

1. Kondisi eksisting pola pelayanan air minum dan rencana pengembangannya;
2. Ketersediaan sumber air baku beserta rencana pengembangannya; dan
3. Target MDG's 2031 untuk melayani kebutuhan air minum penduduk sampai dengan 80 % di tahun 2031;

Poyeksi kebutuhan air minum Kabupaten Banyumas di tahun 2011 sebesar 437,083,056.00 liter per hari untuk 1.606.923 jiwa dan 537,256,848.0 liter per hari untuk 1.975.209 jiwa di tahun 2031, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 dokumen RTRW Kab. Banyumas Tahun 2011-2031.

Perencanaan pengembangan sistem jaringan air baku di Kabupaten Banyumas yang antara lain meliputi :

1. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah sebagai sumber air baku.

Pengembangan sistem penyediaan air baku dengan memanfaatkan air Sungai Serayu sebagai bahan bakunya dengan detail pelayanan sebagai berikut :

- a. Jaringan pelayanan air baku baru untuk wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan dengan rencana kapasitas produksi 60 liter per detik;
- b. Jaringan pelayanan air baku baru untuk IKK Somagede dan perbaikan pelayanan wilayah Banyumas, Sokaraja, dan Kalibagor dengan rencana kapasitas produksi 50 liter per detik;
- c. Jaringan pelayanan air baku baru untuk IKK Kemranjen, Sumpiuh, dan Tambak dengan rencana kapasitas produksi 60 liter per detik; dan
- d. Jaringan pelayanan air baku baru untuk IKK Kebasen dan Rawalo serta perbaikan pelayanan IKK Jatilawang,

Tambak, Sumpiuh, Kemranjen dan Purwokerto dengan rencana kapasitas produksi 250 liter per liter.

Selain itu, pemanfaatan air permukaan juga dilakukan pada sumber mata air atau embung yang selama ini masih belum dimanfaatkan. Mata air baru yang bisa dikembangkan antara lain :

- a. Mata air Moprok untuk peningkatan pelayanan air bersih di Perkotaan Purwokerto;
- b. Mata air Duren dan Linseng untuk pengembangan pelayanan wilayah Sokaraja dan Kalibagor; dan
- c. Mata air Kaliumbul untuk pengembangan pelayanan wilayah Ajibarang dan Purwokerto Barat.

Beberapa mata air yang telah dimanfaatkan juga perlu perlindungan sumber mata air dari kerusakan lingkungan sehingga diharapkan mampu menjaga kuantitas dan kualitas produksi airnya. Perlindungan ini meliputi perlindungan terhadap kawasan penyangga maupun terhadap sumber mata air itu sendiri. Sumber – sumber mata air yang sudah dimanfaatkan sebagai sumber air bakunya antara lain:

- a. Mata air Kawung Carang I, II, III, dan IV;
- b. Mata air Sikampret;
- c. Mata air Sirah Jipang;
- d. Mata air Cideng, Pekuncen;
- e. Mata air Legok I, II, Pekuncen;
- f. Mata air Pancasan, Ajibarang;
- g. Mata air Pugak, Banyumas;
- h. Mata air Gandatapa, Sumbang;
- i. Mata air Kepetek, Sumbang;
- j. Mata air Karang Tengah, Cilongok;
- k. Mata air Baturaden I, II, III;
- l. Mata air Kedung Pete, Baturaden;
- m. Mata air Kaliraga, Baturaden;
- n. Mata air Kali Umbul, Ajibarang;
- o. Mata air KarangSalam, Baturaden; dan
- p. Mata air Kesegeran, Ajibarang.

Selain kawasan lindung mata air, dalam melindungi mata air juga menggunakan kawasan lindung sempadan mata air yang meliputi diameter 200 m di sekeliling mata air tersebut. Pengaturan pada kawasan sempadan mata air ini adalah :

- a. Pada kawasan sekitar mata air ini, jenis kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan vegetatif dengan jenis

- tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
- b. Kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk medan atau pembangunan bangunan fisik yang dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air, dilarang dilakukan di kawasan ini. Atau, semua kegiatan yang dapat mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air dilarang;
 - c. Kegiatan persawahan, perikanan, atau kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu yang diijinkan diperbolehkan. Demikian pula dengan kegiatan lain yang secara langsung tidak terkait dengan pemanfaatan sumber mata air; dan
 - d. Kegiatan lain yang sudah ada di kawasan ini dan dapat mengganggu fungsi kawasan dipindahkan dengan penggantian yang layak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum.
 - 3. Pengembangan jaringan perpipaan air minum dalam memperluas jangkauan pelayanan.
 - 4. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air baku.

D. Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Jaringan prasarana wilayah lainnya meliputi sistem persampahan, sistem jaringan air limbah, sistem jaringan drainase, jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan bencana geologi, dan sistem pelayanan fasilitas umum dan sosial.

1) Sistem Persampahan

Pengembangan sistem persampahan di Kabupaten Banyumas, meliputi:

- a. Pengelolaan persampahan rumah tangga berbasis masyarakat dengan konsep 3R, yaitu Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang);
- b. Pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor dan Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang. Pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah tersebut dengan sistem sanitary landfill.
- c. Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di lokasi strategis.
- d. Peningkatan prasarana pengelolaan persampahan.

2) Sistem Jaringan Air Limbah

Pengembangan sistem jaringan air limbah di Kabupaten Banyumas, meliputi:

- a. Pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu baik on site maupun off site pada kawasan perkotaan.
- b. Pengembangan IPAL untuk penanganan air buangan industri pada kawasan peruntukan industri

3) Sistem Jaringan Drainase

Rencana sistem jaringan drainase Kabupaten Banyumas yang perlu untuk dikembangkan antara lain :

1. Inventarisasi saluran yang berfungsi sebagai jaringan drainase
2. Pembuatan rencana induk drainase di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas dengan cakupan :
 - a) Strategi umum pengelolaan sistem drainase;
 - b) Strategi pengembangan teknis sistem drainase;
 - c) Strategi pengembangan kelembagaan; dan
 - d) Strategi pengembangan pendanaan.
3. Penertiban dan perlindungan terhadap jaringan drainase untuk menghindari terjadinya penyempitan dan pendangkalan
4. Pengembangan sumur resapan air hujan dan biopori pada kawasan perkotaan.

4) Jalur Evakuasi Bencana Alam dan Bencana Geologi

1. Jalur evakuasi bencana gunung api

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana gunung api terdapat pada lereng bagian utara Kabupaten Banyumas yang merupakan lereng Gunung Slamet yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 18 Desa, yaitu:

- a) Kecamatan Sumbang : Desa Kotayasa, Limpakuwus, Gandatapa dan Sikapat.
- b) Kecamatan Baturraden : Desa Ketenger, Karangmangu, Karangsalam dan Kemutug Lor.
- c) Kecamatan Karanglewas : Desa Sunyalangu.
- d) Kecamatan Kedungbanteng : Desa Melung, Kutaliman, Windujaya, Kalisalak dan Baseh.
- e) Kecamatan Cilongok : Desa Gununglurah, Sambirata, Sokawera dan Karangtengah.

Jalur evakuasi bencana terutama dari kawasan rawan bencana III dan II. Adapun jalur evakuasi direncanakan di masing-masing kecamatan rawan bencana meliputi :

- a) Kecamatan Sumbang jalur evakuasinya adalah ruas jalan Baturaden-Sumbang;
 - b) Kecamatan Baturaden jalur evakuasinya adalah ruas jalan Baturaden - Purwokerto dan ruas jalan Baturaden - Kebumen - Purwosari;
 - c) Kecamatan Kedungbanteng jalur evakuasinya adalah ruas jalan Melung-Kutaliman, ruas jalan Karangnangka – Beji - Purwosari, ruas jalan Kedungbanteng - Pondok Klakah dan ruas jalan Peninis-Keniten- Sokawera;
 - d) Kecamatan Cilongok jalur evakuasinya adalah ruas jalan Menggala-Tumiyang-Lebaksiu-Karangtengah-Karanglo; dan
 - e) Kecamatan Karanglewas jalur evakuasinya adalah ruas jalan Babakan-Sunyalangu-Singasari.
2. Jalur evakuasi bencana banjir
- Pada wilayah Kabupaten Banyumas terdapat daerah yang berpotensi daerah rawan bencana banjir yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan meliputi Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, dan Kecamatan Tambak. Adapun jalur evakuasi berupa jalan-jalan desa menuju pada lokasi yang tidak terkena bahaya banjir. Jalur evakuasi direncanakan di masing-masing kecamatan rawan bencana banjir yang meliputi Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, dan Kecamatan Tambak.
3. Jalur evakuasi bencana tanah longsor
- Pada wilayah Kabupaten Banyumas terdapat daerah yang berpotensi daerah rawan bencana tanah longsor yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan meliputi Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Wangon, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Rawalo. Jalur evakuasi bencana tanah longsor berupa ruas jalan yang ada dan/atau ruas jalan darurat menuju ruang evakuasi.
4. Ruang evakuasi bencana alam dan bencana geologi
- Lokasi evakuasi bencana yaitu dengan memanfaatkan fasilitas umum di masing-masing wilayah meliputi :
- a. Lapangan terbuka;
 - b. Sekolah;
 - c. Kantor-kantor pemerintah; dan

d. Puskesmas.

5) Sistem Pelayanan Fasilitas Umum dan Sosial

Pelayanan fasilitas umum dan sosial yang dikembangkan di setiap kecamatan sesuai dengan hirarki pusat kegiatan dan skala pelayanannya adalah pengembangan fasilitas pelayanan masyarakat, meliputi :

- pengembangan fasilitas pendidikan, kesehatan dan perdagangan, yang direncanakan dalam perwujudan rencana struktur ruang pada pengembangan pusat kegiatan, dan
- pengembangan fasilitas rekreasi dan/atau olahraga yang direncanakan pada rencana pola ruang kawasan peruntukan pariwisata.

2.3.2.2 Hasil Telaah Rencana Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas terdiri atas:

1. Sistem Pusat Kegiatan yang meliputi Sistem Perdesaan dan Sistem Perkotaan.

Sistem Perdesaan terdiri atas Pusat Kegiatan Perdesaan dan Fungsi Pelayanan pada Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan fungsi pelayanan utama pendidikan dan perdagangan dan jasa yang melayani kegiatan skala antar desa.

Sedangkan Sistem Perkotaan terdiri atas :

- Pusat Kegiatan meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Perkotaan Purwokerto, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di perkotaan Banyumas, perkotaan Ajibarang, perkotaan Sokaraja, dan perkotaan Wangon dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi 19 perkotaan Kecamatan di Kabupaten Banyumas.
- Fungsi Pelayanan meliputi PKW Purwokerto dengan fungsi pelayanan utama berupa perdagangan berskala regional, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perbankan, PKL Perkotaan Banyumas dengan fungsi pelayanan utama berupa pemerintahan dan kesehatan di Kecamatan Banyumas, PKL Perkotaan Ajibarang dengan fungsi pelayanan utama berupa kesehatan, transportasi, industri, dan perdagangan skala kabupaten, PKL Perkotaan Sokaraja dengan fungsi pelayanan utama berupa pendidikan, kesehatan, perdagangan skala kabupaten, dan industri, PKL Perkotaan Wangon dengan fungsi pelayanan utama berupa perdagangan skala kabupaten, transportasi, dan industri, dan PPK dengan fungsi pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

2. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah terdiri atas sistem jaringan prasarana utama meliputi sistem jaringan transportasi darat dan sistem jaringan transportasi perkeretaapian, serta sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem jaringan transportasi darat meliputi :

- Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas jaringan jalan (jaringan jalan nasional pada wilayah kabupaten, jaringan jalan provinsi pada wilayah kabupaten dan jaringan jalan Kabupaten); jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal penumpang dan terminal barang; jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan pedesaan.
- Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi pengembangan dermaga penyeberangan Wisata Sungai *Serayu River Voyage*.

Tabel 2.3.2.2. Tabel Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

N o	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Sistem Jaringan Tranportasi Darat	Sistem Jaringan Tranportasi Darat	Peningkatan jalan arteri primer yang berstatus jalan nasional	Upaya pengajuan usulan penanganan jalan Nasional	Wangon, Rawalo, Buntu, Banyumas, Purwokerto, Patikraja
			Peningkatan jalan kolektor primer yang berstatus jalan nasional	Upaya pengajuan usulan penanganan jalan Nasional	Wangon, Rawalo, Buntu, Banyumas, Purwokerto, Ajibarang, Sokaraja
			Pengembangan jalan kolektor primer dan/atau jalan strategis provinsi yang berstatus jalan provinsi	Upaya pengajuan usulan penanganan jalan Provinsi	Purwokerto, Baturraden, Sokaraja, Patikraja, Rawalo
			Peningkatan dan pengembangan jalan berstatus jalan kabupaten	Upaya peningkatan kapasitas dan kualitas jalan kabupaten	Sokaraja, Purwokerto, tambak, sumpiuh, Baturraden
2	Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air	Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air	Pembangunan tebing pengaman di wilayah sungai Serayu – Bogowonto	Upaya pembangunan bangunan pengaman tebing sungai	Rawalo, Kebasen, Patikraja, Kalibagor, Banyumas

N o	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
			Normalisasi sungai di wilayah sungai Serayu – Bogowonto	Upaya normalisasi sungai	Rawalo, Kebasen, Patikraja, Kalibagor, Banyumas
			pembuatan embung	Upaya pembuatan embung	Kemranjen, Kalibagor, Wangon
			konservasi situ	Upaya konservasi situ	Cilongok, Jatilawang, Wangon, dan Kemranjen
			Pelaksanaan reboisasi pada kawasan di sekitar sumber air baku	Upaya reboisasi pada kawasan di sekitar sumber air baku	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas
			Pemeliharaan kawasan di sekitar sumber air baku dari pencemaran air	Upaya konservasi sumber air baku	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas
			Pemeriksaan kualitas sumber air baku tradisional secara berkala	Upaya pemeriksaan kualitas sumber air baku tradisional secara berkala	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas
			Rehabilitasi sistem jaringan irigasi yang dalam kondisi rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas
			Peningkatan fungsi jaringan irigasi dari irigasi setengah teknis menjadi irigasi teknis dan dari irigasi non-teknis menjadi irigasi setengah teknis	Rasio jaringan irigasi (m/ha)	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas

2.3.2.3 Pola Ruang Kabupaten Banyumas

Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031, maka pengembangan Kabupaten Banyumas memperhatikan pola ruang dan struktur ruang wilayah Kabupaten Banyumas.

Pola Ruang wilayah Kabupaten Banyumas meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

A. Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Banyumas adalah kawasan hutan lindung, kawasan yang melindungi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, serta kawasan rawan bencana.

Kawasan lindung ini terdiri atas :

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air,
- c. kawasan perlindungan setempat; terdiri atas kawasan sekitar mata air, kawasan sempadan sungai, dan ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan seluas kurang lebih 5.421 (lima ribu empat ratus dua puluh satu) hektar.
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas kebun raya; berupa Kebun Raya Baturaden di Kecamatan Baturaden dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi Kecamatan Wangon, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Karanglewas, Perkotaan Purwokerto dan Kecamatan Sumbang.
- e. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan bencana tanah gerakan tanah, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana angin topan.
- f. Kawasan lindung geologi terdiri atas kawasan imbuhan air meliputi Cekungan Air Tanah Purwokerto-Purbalingga, Cekungan Air Tanah Kroya; dan Cekungan Air Tanah Cilacap dan kawasan rawan bencana geologi berupa kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi di sekitar Gunung Slamet.
- g. Kawasan lindung lainnya terdiri atas : kawasan lindung plasma nutfah; di Kecamatan Baturaden dan kawasan lindung yang dikelola masyarakat meliputi Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Banyumas.

1. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan lindung yang termasuk kategori kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 9.121 (sembilan ribu seratus dua puluh satu) hektar meliputi 14 kecamatan yaitu Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturraden dan Kecamatan Sumbang.

Kawasan hutan lindung tersebar diwilayah sebagai berikut :

- a. Kawasan hutan lindung di Wilayah Gunung Slamet, meliputi Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Karanglewas, dan Kecamatan Sumbang.

- b. Kawasan hutan yang memanjang dari Kecamatan Rawalo, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kebasen, dan Kecamatan Banyumas.
- c. Kawasan hutan di bagian Barat Kabupaten Banyumas, meliputi Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Jatilawang, dan Kecamatan Purwojati.

2. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Berdasar atas identifikasi terhadap kondisi fisik kawasan sesuai dengan kriteria kawasan yang curah hujan tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran, maka perlindungan terhadap kawasan resapan air meliputi wilayah Kecamatan Baturaden, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kedungbanteng, sebagian kecil wilayah Kecamatan Pekuncen, sebagian kecil wilayah Kecamatan Ajibarang, sebagian kecil wilayah Kecamatan Purwojati, sebagian kecil wilayah Kecamatan Somagede, sebagian kecil wilayah Kecamatan Kalibagor, sebagian kecil wilayah Kecamatan Sokaraja, dan sebagian kecil wilayah Kecamatan Kembaran.

Wilayah-wilayah ini pada musim penghujan akan mampu menyerap air dan pada musim kemarau mampu menjadi sumber cadangan air saat diperlukan. Beberapa pokok pengelolaan kawasan ini adalah sebagai berikut :

- 1. Kegiatan yang masih boleh dilakukan pada kawasan ini adalah pertanian semusim atau tahunan, dan agrowisata yang disertai tindakan konservasi;
- 2. Tidak diperbolehkan pembukaan lahan untuk permukiman baru dan kawasan industri pada daerah dengan kelerengan di atas 25 %;
- 3. Pada daerah dengan kelerengan kurang dari 25 %, pembangunan permukiman baik secara masal maupun perseorangan, infrastruktur dan kawasan industri dapat dilakukan dengan syarat telah terpasang/tersedia sistem pengelolaan limbah yang baik dan tidak mengambil air tanah secara besar-besaran. Disamping itu harus tetap memperhatikan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) dan KLB (Koefisien Lantai Bangunan) sehingga masih ada lahan untuk resapan air; dan
- 4. Eksploitasi bahan galian dibatasi atau dilengkapi dengan upaya pencegahan dan rehabilitasi.

3. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai, dan ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan.

a. Kawasan Sekitar Mata Air

Berdasar identifikasi yang telah dilakukan, terdapat banyak mata air dan kawasan sekitarnya yang perlu dilindungi, yaitu seperti pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 2.3.2.3a Rencana Sumber Mata Air Yang Dilindungi Di Kabupaten Banyumas

Nama Mata Air	Debit (lt/dt)	Lokasi Sumber Mata Air (Kecamatan)
Mata air Kawungcarang	148	Sumbang
Mata air Gandatapa	5	Sumbang
Mata air Kepetek	5	Sumbang
Mata air Kedungpete	150	Baturaden
Mata air Kaliraga	5,6	Baturaden
Mata air Baturaden I, II, III	16,1	Baturaden
Mata air Pugak	1,4	Banyumas
Mata air Sikampret	15	Karanglewas
Mata air Sirah	25	Karanglewas
Mata air Cideng	3,3	Pekuncen
Mata air Rancah	2	Pekuncen
Mata air Legok I, II	35	Pekuncen
Mata air Pancasan	25	Ajibarang
Mata air Karangtengah	5	Cilongok
Mata air Sungai Tajum	10	Purwojati

Sumber : RTRW Kab. Banyumas Tahun 2011-2031

Arahan pengelolaan kawasan lindung sekitar mata air ini adalah sebagai berikut:

- 1. Persawahan atau pertanian dengan jenis tanaman tertentu, dan perikanan masih diperkenankan keberadaannya pada kawasan ini;
- 2. Tindakan konservasi yang dilakukan pada kawasan ini lebih bersifat vegetatif; dan
- 3. Kawasan sekitar mata air dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum/air bersih masyarakat.

b. Kawasan Sempadan Sungai

Kawasan ini meliputi kawasan sepanjang kanan dan kiri sungai, termasuk sungai buatan/ kanal/ saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, yaitu sekurang-kurangnya 100 meter di kanan dan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan dan kiri sungai kecil di luar kawasan permukiman dan untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan. Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004, sungai besar adalah sungai yang daerah pengalirannya lebih dari 500 km2, untuk itu di Kabupaten Banyumas tidak mempunyai sungai besar.

Arahan pengelolaan kawasan ini adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya;
2. Kegiatan diarahkan perlindungan dan memperkuat serta pengaturan aliran air, yaitu meliputi kegiatan penanaman tanaman keras, atau perlindungan tebing dengan beton dan krib pengendali saluran air;
3. Sedangkan untuk sungai yang melalui kawasan permukiman, dapat dilakukan dengan pembuatan jalan inspeksi;
4. Terhadap pemanfaatan sungai untuk pengembangan pariwisata dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan hidup.

c. **Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan**

Rencana Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan seluas kurang lebih 5.421 hektar atau 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah, yang meliputi perkotaan Purwokerto, perkotaan Banyumas, perkotaan Ajibarang, perkotaan Sokaraja, perkotaan Wangon, perkotaan Jatilawang, perkotaan Sumpiuh, perkotaan Patikraja, perkotaan Baturaden, perkotaan Cilongok, perkotaan Lumir, perkotaan Gumelar, perkotaan Pekuncen, perkotaan Purwojati, perkotaan Rawalo, perkotaan Kemranjen, perkotaan Tambak, perkotaan Sumbang, perkotaan

4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yang ada di Kabupaten Banyumas meliputi Kawasan Kebun Raya dan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

a. **Kawasan Kebun Raya**

Kawasan Kebun Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa, jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya, pariwisata dan rekreasi. Kawasan Kebun Raya di Kabupaten Banyumas berupa Kebun Raya Baturaden yang ditetapkan berdasarkan SK Menhut No. 117/Menhut-II/2004 dan berada di Kecamatan Baturaden.

b. **Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan**

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diperuntukan bagi kegiatan yang melindungi atau melestarikan budaya bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada wilayah Kabupaten Banyumas, perlindungan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 2.3.2.3b Rencana Kawasan Cagar Budaya Dan Ilmu
 Pengetahuan
 Yang Dilindungi di Kabupaten Banyumas

No	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Dilindungi	Kecamatan
1	Masjid Saka Tunggal	Wangon
2	Museum Wayang Sendangmas	Banyumas
3	Museum BRI	Purwokerto
4	Museum Pangsar Jendral Sudirman	Karanglewas
5	Masjid Banyumas	Banyumas
7	Situs Lembu Ayu	Sumbang

Sumber : Tabel 4.3 RTRW Kab. Banyumas Tahun 2011-2031

Arahan pengelolaan pada kawasan perlindungan ini adalah pencegahan kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian situs purbakala dan lingkungannya serta pencegahan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia. Kegiatan yang ada diarahkan pada kegiatan budaya yang mendukung kegiatan pariwisata.

Dalam mendukung pengembangan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Banyumas, direncanakan pembangunan Kebun Raya Baturaden sebagai pusat penelitian dan konservasi di luar habitat. Selain itu, Kebun Raya Baturaden dapat berfungsi pula sebagai sarana wisata dan pendidikan bagi pengunjung.

5. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Banyumas dapat dibagi menjadi bencana rawan tanah longsor, rawan bencana banjir, dan rawan bencana angin topan.

a. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

Penentuan kawasan rawan bencana longsor dilakukan melalui penentuan tipologi kawasan yang dilanjutkan dengan penentuan tingkat kerawanan. Kawasan rawan bencana longsor dibedakan atas zona-zona berdasarkan karakter dan kondisi fisik alaminya sehingga pada setiap zona akan berbeda dalam penentuan struktur ruang dan pola ruangnya serta jenis dan intensitas kegiatan yang dibolehkan, dibolehkan dengan persyaratan, atau yang dilarangnya.

Penetapan tingkat kerawanan longsor ditinjau dari dua hal yaitu berdasar kondisi fisik alam dan aktivitas manusia.

Selanjutnya ditentukan kawasan rawan bencana tanah longsor di beberapa wilayah Kabupaten Banyumas yang telah teridentifikasi sebagai daerah rawan bencana alam tanah longsor terdiri dari 17 kecamatan dan 66 desa, terdiri dari :

- a) Kecamatan Pekuncen, yaitu di Desa Cibangkong, Glemgang, Krajan, Kranggan, Petahunan, Tumiyang, Karangkemiri dan Semedo;
- b) Kecamatan Gumelar, yaitu di Desa Samudra, Samudra Kulon, Gumelar, Kedungurang, Gancang, Paningkaban, Karangkemojing, Cihonje, Cilangkap, dan Telaga;
- c) Kecamatan Lumbir, yaitu di Desa Dermaji, Kedunggede, Cidora, Cirahab, Lumbir, dan Parungkamal;
- d) Kecamatan Wangon, yaitu Desa Pengadegan, Cikakak, Jurangbahas, Randegan, Rawaheng dan Windunegara;
- e) Kecamatan Ajibarang : Desa Sawangan, Darmakradenan dan Tipar Kidul;
- f) Kecamatan Cilongok, yaitu Desa Panusupan, Jatisaba dan Gununglurah;
- g) Kecamatan Purwojati, yaitu Desa Kaliwangi, Klapasawit dan Kalitapen;
- h) Kecamatan Banyumas, yaitu Desa Binangun dan Karangrau;
- i) Kecamatan Somagede, yaitu Desa Kemawi, Kanding, Klinting dan Tanggeran;
- j) Kecamatan Kemranjen, yaitu Desa Karangsalam, Karanggintung, Pageralang, Petarangan, Kebarongan dan Alasmalang;
- k) Kecamatan Kebasen, yaitu Desa Tumiyang dan Kalisalak;
- l) Kecamatan Patikraja, yaitu Desa Kedungrandu dan Karangendap;
- m) Kecamatan Kedungbanteng, yaitu Desa Melung, Dawuhan Kulon dan Baseh;
- n) Kecamatan Rawalo, yaitu Desa Tembaknegara dan Desa Tipar;
- o) Kecamatan Sumpiuh, yaitu Desa Banjarpenapen, Ketanda dan Bogangin;
- p) Kecamatan Jatilawang, yaitu Desa Jatilawang; dan
- q) Kecamatan Tambak, yaitu Desa Watuagung.

b. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir sedapat mungkin tidak dipergunakan untuk permukiman, demikian pula kegiatan lain yang dapat merusak atau mempengaruhi kelancaran sistem drainase. Pada wilayah Kabupaten Banyumas kawasan perlindungan bahaya banjir terdapat pada

- 1. Kecamatan Wangon;
- 2. Kecamatan Jatilawang;
- 3. Kecamatan Sumpiuh;
- 4. Kecamatan Kemranjen; dan
- 5. Kecamatan Tambak.

Pada daerah rawan banjir ini perlu adanya pemantapan kawasan lindung diantaranya dengan langkah reboisasi jenis tanaman khusus (tanaman tahunan).

c. **Kawasan Rawan Bencana Angin Topan**

Kawasan rawan bencana lainnya yang mungkin terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas adalah bencana angin topan. Kawasan bencana ini umumnya bersifat temporer, baik secara lokasi maupun waktu. Namun demikian, pada kawasan-kawasan yang mempunyai kecenderungan terjadi bencana ini, sedapat mungkin diadakan pembatasan dalam kegiatan budidaya, khususnya permukiman. Mekanisme dan prosedur penanganan, pencegahan akibat bencana dan pengungsian penduduk perlu dilakukan sedini mungkin.

Adapun kawasan yang mempunyai kecenderungan terjadi bencana angin topan, meliputi :

1. Kecamatan Kedungbanteng;
2. Kecamatan Karanglewas;
3. Kecamatan Baturaden; dan
4. Kecamatan Sumbang.

6. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi terdiri dari kawasan imbuhan air dan kawasan rawan bencana geologi.

a. **Kawasan Imbuhan Air**

Kawasan imbuhan air di Kabupaten Banyumas yakni kawasan cekungan air Purwokerto-Purbalingga, cekungan air Tanah Kroya, dan cekungan air Tanah Cilacap. Kawasan Imbuhan air merupakan kawasan daerah resapan air yang mampu menambah jumlah air tanah dalam secara alamiah pada cekungan air tanah yang ditetapkan dengan kriteria :

1. Memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
2. Memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
3. Memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau
4. Memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi dari pada muka air tanah yang tertekan.

b. **Kawasan Rawan Bencana Geologi**

Kawasan rawan bencana geologi di Kabupaten Banyumas berupa kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi di sekitar Gunung Slamet. Menurut Permen PU No. 21/PRT/M/2007, kawasan rawan letusan gunung berapi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana letusan gunung berapi. Untuk penentuan tipologi kawasan rawan letusan gunung berapi berdasarkan informasi geologi dan tingkat risiko letusan

gunung berapi, tipologi kawasan rawan letusan gunung berapi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe sebagai berikut :

A. Tipe A

1. Kawasan yang berpotensi terlanda banjir lahar dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava. Selama letusan membesar, kawasan ini berpotensi tertimpa material jatuhnya berupa hujan abu lebat dan lontaran batu pijar; dan
2. Kawasan yang memiliki tingkat risiko rendah (berjarak cukup jauh dari sumber letusan, melanda kawasan sepanjang aliran sungai yang dilaluinya, pada saat terjadi bencana letusan, masih memungkinkan manusia untuk menyelamatkan diri, sehingga risiko terlanda bencana masih dapat dihindari).

B. Tipe B

1. Kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lahar dan lava, lontaran atau guguran batu pijar, hujan abu lebat, hujan lumpur (panas), aliran panas dan gas beracun; dan
2. Kawasan yang memiliki tingkat risiko sedang (berjarak cukup dekat dengan sumber letusan, risiko manusia untuk menyelamatkan diri pada saat letusan cukup sulit, kemungkinan untuk terlanda bencana sangat besar).

C. Tipe C

1. Kawasan yang sering terlanda awan panas, aliran lahar dan lava, lontaran atau guguran batu (pijar), hujan abu lebat, hujan lumpur (panas), aliran panas dan gas beracun. Hanya diperuntukan bagi kawasan rawan letusan gunung berapi yang sangat giat atau sering meletus; dan
2. Kawasan yang memiliki risiko tinggi (sangat dekat dengan sumber letusan. Pada saat terjadi aktivitas magmatik, kawasan ini akan dengan cepat terlanda bencana, makhluk hidup yang ada di sekitarnya tidak mungkin untuk menyelamatkan diri).

7. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya meliputi kawasan lindung plasma nutfah dan kawasan lindung yang dikelola masyarakat.

a. Kawasan Lindung Plasma Nutfah

b. Kawasan Lindung Yang Dikelola Masyarakat

B. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terdiri atas :

a. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas :

- Kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 13.949 (tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) hektar meliputi 17 Kecamatan tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas.
 - Kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 5.592 (lima ribu lima ratus sembilan puluh dua) hektar meliputi 10 Kecamatan tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas.
- b. Kawasan hutan rakyat
Kawasan hutan rakyat meliputi 15 Kecamatan tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas.
 - c. Kawasan peruntukan pertanian
Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 36.616 (tiga puluh enam ribu enam ratus enam belas) hektar tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Banyumas.
 - d. Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas budidaya perikanan seluas kurang lebih 432 (empat ratus tiga puluh dua) hektar dengan komoditas unggulan berupa Ikan Gurame dan Ikan Lele, pengolahan perikanan dan pemasaran hasil perikanan.
 - e. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan pertambangan mineral, kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta kawasan pertambangan panas bumi yang direncanakan pada wilayah kerja pertambangan panas bumi seluas kurang lebih 15.490 (lima belas ribu empat ratus sembilan puluh) hektar.
 - f. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas kawasan wisata alam, kawasan wisata buatan, wisata belanja dan kuliner yang dikembangkan sebagai lokasi wisata yang menjajikan makanan dan buah tangan khas Banyumas, serta kawasan wisata budaya.
 - g. Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar dan menengah serta industri kecil dan mikro. Industri besar dan menengah seluas kurang lebih 580 (lima ratus delapan puluh) hektar meliputi Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Wangon dan Kecamatan Ajibarang. Industri besar dan menengah dapat dikembangkan di luar kecamatan dengan kriteria industri yang menggunakan bahan baku lokal dan tidak menghasilkan limbah yang berkategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Industri kecil dan mikro ada di setiap kecamatan, dan dapat dilaksanakan di wilayah perkotaan dengan syarat tidak menghasilkan limbah yang berkategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - h. Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas kawasan perkotaan dan perdesaan. Kawasan perkotaan memiliki fungsi utama berupa pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, perdagangan, dan jasa maupun permukiman dengan ciri perkotaan. Rencana pengembangan kawasan perkotaan adalah

untuk melengkapi kawasan yang tumbuh menjadi kawasan perkotaan baru dengan sarana dan prasarana yang memadai, dan untuk melengkapi kawasan perkotaan dengan RTH dan/atau taman kota sesuai perundang-undangan, sedangkan pengaturan izin lokasi untuk pengembang perumahan diarahkan ke kawasan yang mulai tumbuh dengan penanganan yang agregatif. Kawasan Perdesaan memiliki fungsi utama pertanian dengan karakteristik kegiatan yang sentralistik, tradisi dan budaya yang kental berciri pedesaan, meliputi kawasan yang termasuk dalam Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Kawasan perdesaan terletak diluar kawasan perkotaan. Rencana pengembangan kawasan perdesaan meliputi pengembangan kawasan permukiman yang diarahkan menyebar terutama pada simpul kegiatan (*nodes*), membuka hubungan pusat kegiatan dengan kantong permukiman perdesaan dan menciptakan pola permukiman yang mampu menampung kegiatan pengolahan pertanian berupa kerajinan, industri kecil, dan pariwisata.

- i. Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi Instalasi Militer yaitu Korem 071 Wijayakusuma di Kecamatan Sokaraja, Kodim 0701 / Banyumas di Kecamatan Purwokerto Barat dan Yonif 405 Suryakusuma di Kecamatan Wangon; Instalasi Militer Kodim 0701 / Banyumas meliputi Koramil 01-25 Kabupaten Banyumas; Kantor Polisi Resor (Polres) di Kecamatan Purwokerto Utara; dan Kantor Polisi Sektor (Polsek) di seluruh kecamatan.

Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Banyumas terdiri atas :

1. Kawasan Strategis Provinsi di Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan perdagangan dan jasa pada kawasan perkotaan Purwokerto dan sekitarnya.
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan panas bumi Baturaden.
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan Kebun Raya Baturaden dan kawasan Gunung Slamet.
2. Kawasan Strategis Kabupaten meliputi :
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu :
 - Kawasan perkotaan Purwokerto meliputi Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Barat, sebagian Kecamatan Sumbang, sebagian Kecamatan Baturaden, sebagian Kecamatan Kedungbanteng, sebagian Kecamatan Kembaran, sebagian

- Kecamatan Karanglewas, sebagian Kecamatan Sokaraja dan sebagian Kecamatan Patikraja.
- Kawasan Agropolitan meliputi Kecamatan Cilongok, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Jatilawang dan Kecamatan Wangon.
 - Kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kemranjen dan Kecamatan Cilongok.
 - Kawasan perbatasan meliputi Kecamatan Wangon, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbrir, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen dan Kecamatan Tambak.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi kawasan Kota Lama Banyumas, kawasan Masjid Saka Tunggal di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, kawasan Desa Tradisional di Desa Plana, Kecamatan Somagede dan kawasan Budaya Tradisional Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan pariwisata Baturaden.
- d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan Gunung Slamet meliputi Kecamatan Sumbang, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Pekuncen.

2.3.2.4 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Tabel 2.3.2.4. Tabel Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

N o	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembang an Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Perlindungan Setempat	Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sekitar mata air	Rasio jumlah mata air yang berfungsi baik	(Pendukung)
			Penataan Kawasan sekitar sempadan sungai	Rasio Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dan penggunaan lain	(Pendukung)

N o	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembang an Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
			Penertiban bangunan di sempadan sungai	Penurunan Rasio Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dan penggunaan lain	(Pendukung)
			Pembangunan jalur hijau pada sempadan sungai, tepi jalan dan/atau median jalan;	Rasio Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dan penggunaan lain	(Pendukung)
2	Kawasan Rawan Bencana Alam	Kawasan Rawan Bencana Alam	Penanaman tanaman konservasi pada kawasan rawan bencana tanah longsor	Turap/talud/bronjong di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	(Pendukung)
3	Kawasan Lindung Geologi	Kawasan Lindung Geologi	Pelestarian Cekungan Air Tanah Purwokerto-Purbalingga;	Konservasi Sumber Daya air	(Pendukung)
			Pelestarian Cekungan Air Tanah Kroya; dan	Konservasi Sumber Daya air	(Pendukung)
			Pelestarian Cekungan Air Tanah Cilacap.	Konservasi Sumber Daya air	(Pendukung)
			Pemeliharaan saluran irigasi pada kawasan pertanian lahan basah	Rasio jaringan irigasi (m/ha)	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas
4	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Pengembangan kawasan wisata air Serayu River Voyage	Konservasi sumber daya air	(Pendukung)
5	Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pertumbuhan ekonomi;	Peningkatan Rasio Panjang Jalan dan Rasio Irigasi	Seluruh daerah di Kab. Banyumas

N o	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembang an Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
6	Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Perlindungan keseimbangan tata guna air	Peningkatan Rasio jumlah embung/situ yang dimanfaatkan untuk sumber air baku	Seluruh daerah di Kab. Banyumas
			perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna	Konservasi Sumber daya air	Seluruh daerah di Kab. Banyumas
			rehabilitasi daerah rawan bencana longsor	Penurunan Rasio jumlah daerah kritis di badan sungai	Seluruh daerah di Kab. Banyumas
			penanganan dampak lingkungan	Pembangunan Turap / talud / bronjong di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Seluruh daerah di Kab. Banyumas

2.3.2.5 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, gerakan tanah, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

1. Potensi Rawan Bencana Gerakan Tanah
- Kabupaten Banyumas memiliki karakteristik yang unik, kurang lebih 50% adalah wilayah pegunungan dengan konsekuensi rawan bencana tanah gerak. Wilayah rawan bencana gerakan tanah merupakan wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah bergerak karena pada daerah tersebut terdapat zona tanah bergerak. Kawasan ini tertutup bagi pemukiman, persawahan, kolam ikan, kegiatan pemotongan lereng, atau budidaya lain yang membahayakan keselamatan manusia dan lingkungan. Pemanfaatan lahan untuk budidaya tanaman tahunan masih dapat dilakukan dengan tujuan untuk konservasi lahan. Di wilayah Kabupaten Banyumas kawasan rawan bencana gerakan tanah terdapat di beberapa wilayah yang meliputi 18 Kecamatan yaitu Kecamatan

Ajibarang, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Somagede, Kecamatan Wangon, Kecamatan Tambak, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Jatilawang dan Kecamatan Kalibagor. Potensi wilayah rawan bencana gerak tanah di Kabupaten Banyumas dapat disebabkan salah satunya karena faktor kemiringan lereng.

2. Potensi Rawan Bencana Banjir

Kabupaten Banyumas memiliki wilayah Kecamatan yang memiliki potensi rawan bencana banjir. Wilayah-wilayah tersebut terdapat pada bagian selatan yang tercakup dalam wilayah Kecamatan Sumpiuh, Kemranjen, Wangon, Jatilawang dan Tambak. Ancaman bencana banjir dikarenakan tingginya angka lahan kritis di daerah tangkapan air di wilayah tersebut. Disamping itu tidak lepas dari pengaruh topografi di wilayah Kecamatan Tambak, Sumpiuh dan Kemranjen yang berupa cekungan.

3. Potensi Rawan Bencana Gunung Api

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan gunung api terdapat pada lereng bagian utara Kabupaten Banyumas yang merupakan lereng Gunung Slamet, meliputi wilayah Kecamatan Baturraden, Sumbang, Karanglewas, Kedungbanteng, Cilongok dan Pekuncen.

4. Potensi Rawan Bencana Kekeringan

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana kekeringan terdapat pada beberapa desa yang terdapat antara lain di wilayah meliputi Kecamatan Cilongok, Banyumas, Gumelar, Jatilawang, Kalibagor, Kebasen, Kemranjen, Lumbir, Patikraja, Purwojati, Purwokerto Selatan, Sokaraja, Somagede, Sumpiuh, Tambak, Wangon, Pekuncen, dan pada beberapa desa yang sulit air meliputi wilayah di Kecamatan Baturraden dan Kedungbanteng.

5. Potensi Rawan Bencana Angin Puting Beliung

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana angin puting beliung terdapat pada Kecamatan Kedungbanteng, Karanglewas, Baturraden, Sumbang, Pekuncen, Ajibarang, Cilongok, Sokaraja, Purwokerto Timur, Sumpiuh, Kemranjen, Patikraja, Kebasen, Tambak, Lumbir, Purwojati, Rawalo, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, dan Somagede.

2.3.3 Penentuan Isu - Isu Strategis

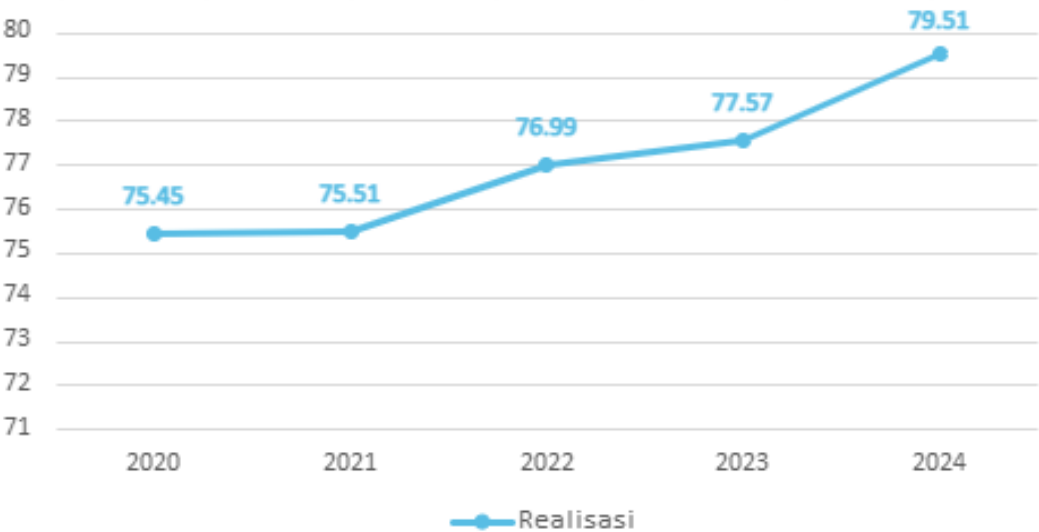
2.3.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara kondisi yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan. Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan infrastruktur PUPR di Kabupaten Banyumas adalah **Belum optimalnya kualitas infrastruktur bidang Pekerjaan umum** dan untuk kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas dijabarkan sebagai berikut ini:

- a) Masih rendahnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap
Sampai dengan akhir tahun 2024, Kondisi mantap jalan Kabupaten Banyumas masih sangat rendah jika dibandingkan dengan kondisi mantap jalan kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kondisi mantap jalan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas baru tercapai 71,44% dari total panjang jalan 1.315,347 km.
- b) Kinerja sistem irigasi yang belum optimal
Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah 573 DI dengan luas 23.716 Ha, dan jaringan irigasi sepanjang 665.930 m. Jaringan irigasi dalam kondisi baik sepanjang 543.776 m (81,66%) sedangkan jaringan irigasi dalam kondisi rusak sepanjang 122.157 m (18,34%). Masih adanya kerusakan pada jaringan irigasi menyebabkan layanan jaringan irigasi kurang optimal terutama pada wilayah hilir yang kurang mendapatkan air.
- c) Layanan bangunan penampung air baku kurang optimal
Di Kabupaten banyumas terdapat 21 embung, namun hanya 18 buah bangunan embung/situ/telaga dan bangunan penampung air baku di Kabupaten Banyumas dengan kondisi baik, sedangkan 3 bangunan dalam kondisi rusak. Sehingga tidak memadai untuk menampung air baku secara optimal.
- d) Masih terdapat bangunan gedung dalam kondisi rusak
Sampai dengan akhir tahun 2024, jumlah bangunan gedung Pemerintah Kabupaten Banyumas yang kewenangan pengelolaan gedungnya dilakukan Dinas Pekerjaan Umum terinventarisir sebanyak 86 unit berupa gedung kelurahan sebanyak 30 unit, bangunan kecamatan sebanyak 27 unit, dan bangunan perangkat daerah sebanyak 27 unit, dengan rincian kondisi bangunan 61,90% kondisi baik, 27,38% kondisi rusak ringan, 33,33% rusak sedang, dan 6,67% rusak berat.
- e) Kurang optimalnya sertifikasi tenaga konstruksi
Sesuai aplikasi eMonev, Capaian kinerja program pengembangan jasa konstruksi sudah terealisasi sebesar 79,71% dari target Resntra 2024-2026 sebesar 82,32% atau sudah mencapai target tahun

tahunan sebesar 105,36%% serta target akhir Periode Renstra sebesar 96,71%, namun demikian capaian ini baru menjangkau sebagian SDM jasa konstruksi yang menjadi target program, masih terdapat SDM jasa konstruksi yang belum mendapat fasilitasi dan pembinaan.

- f) **Infrastruktur Pelayanan Dasar belum memadai**
Pelayanan ini meliputi infrastruktur air minum, air limbah, permukiman, persampahan dan drainase.
Identifikasi permasalahan dalam penyediaan air minum di Kabupaten Banyumas mencerminkan masih adanya kesenjangan akses dan kualitas layanan, khususnya di wilayah perdesaan. Meskipun 79,51% rumah tangga telah memiliki akses terhadap air minum layak, capaian tersebut masih didominasi oleh sumber bukan perpipaan (67,11%) yang cenderung kurang terjamin kualitas dan keberlanjutannya. Sementara itu, akses terhadap air minum aman melalui jaringan perpipaan baru menjangkau 32,89%, dan sebagian besar kualitas layanan di wilayah perdesaan—yang dikelola masyarakat—belum memenuhi standar air minum aman. Kondisi ini menjadi tantangan utama dalam upaya mencapai target SDGs, yaitu menjamin akses universal terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk.



Gambar 2.3.3.1a Grafik Peningkatan Cakupan Air Minum
Sumber : DINPERKIM Kabupaten Banyumas

Di Kabupaten Banyumas capaian sanitasi layak sampai dengan tahun 2024 sebesar 93,24 % sehingga perlu dilakukan strategi untuk dapat menangani atau memenuhi akses sanitasi layak. Adanya pembaharuan data (updating) data terkait warga / masyarakat yang memiliki akses sanitasi perlu dilakukan untuk dapat menangani lebih akurat. Alokasi anggaran Pemerintah Daerah masih sangat sedikit untuk menyelesaikan permasalahan ini dan masih mengandalkan anggaran Pemerintah Pusat seperti DAK dan

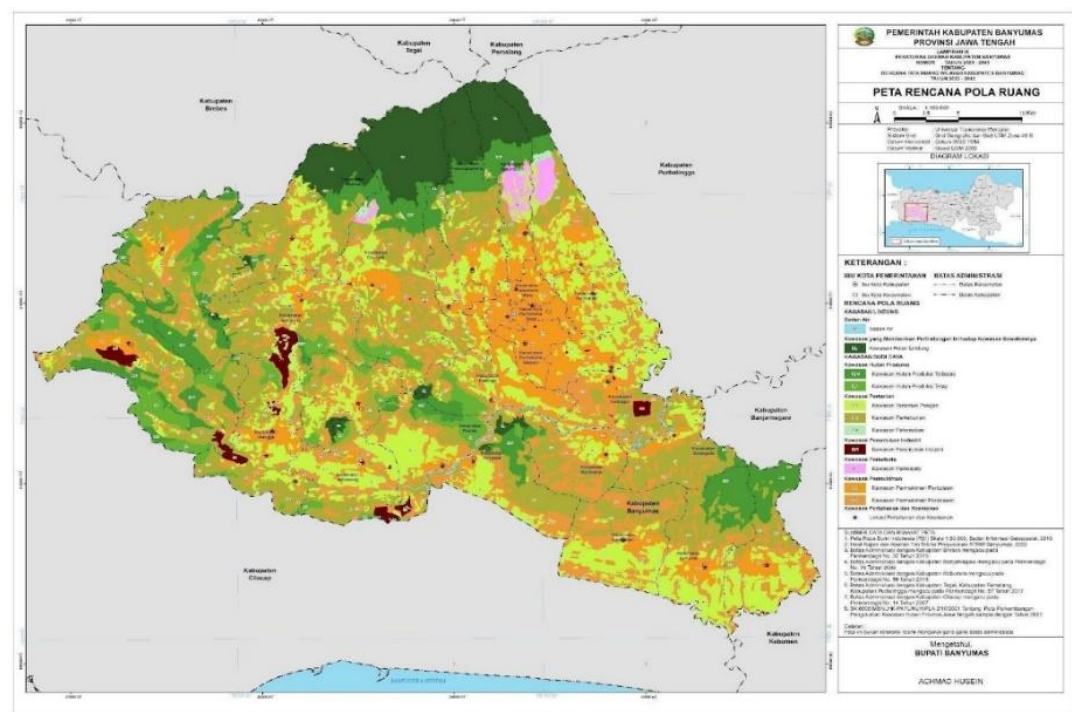
Earmark. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi ketergantungan kepada anggaran selain APBD Kabupaten Banyumas.

g) Peningkatan alih fungsi lahan

Setiap potensi investasi yang akan dikembangkan di Kabupaten Banyumas harus sejalan dengan ketentuan pola ruang yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas. Saat ini, RTRW Kabupaten Banyumas tengah dalam proses revisi yang akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Draf revisi RTRW tersebut telah diajukan kepada Kementerian ATR/BPN dan sedang menunggu persetujuan. Revisi RTRW ini penting untuk memberikan kepastian hukum serta arah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan investasi daerah.

Dalam rancangan RTRW terbaru, struktur dan pola ruang Kabupaten Banyumas akan disusun secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan, yang mencakup berbagai peruntukan ruang seperti: Badan Air, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perkebunan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peternakan, dan Kawasan Tanaman Pangan. Setiap kawasan ini memiliki karakteristik dan fungsi tertentu yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, pemanfaatan ruang dan arah investasi di Kabupaten Banyumas harus mempertimbangkan kesesuaian terhadap revisi RTRW yang akan ditetapkan, agar pengembangan wilayah dapat berlangsung secara harmonis, berdaya saing, dan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.



Gambar 2.3.3.1b Peta Pola Ruang
Sumber : DINPERKIM Kab. Banyumas

2.3.3.2 Usulan pemangku kepentingan

Usulan melalui forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2025 di Aula Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

No	Pengusul	Usulan / Pembahasan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Imam Pamungkas, ST., MAP (Dinpertan)	Pemrioritasan penanganan Gedung kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sejumlah 7 Unit	
		Sinkronisasi data lahan sawah antara DPU dengan Dinpertan	
		Mendukung Pembangunan irigasi Banjarsari di Kec. Purwojati yang sudah masuk paparan DPU	
2	Aditama (Dinas Pendidikan)	Mendukung prioritas akses jalan menuju SD dan SMP	
		Usulan percepatan penanganan lantai 2 Gedung dinas Pendidikan	Pelaksanaan di tahun 2025, dalam proses PBJ
		Komitmen Dindik, siap berkolaborasi bersama DPU	
3	Ikhwani (BPPENDA)	Apresiasi pencapaian realisasi pendapatan (PAD) DPU yg terlampaui sejak 2021	
		Gedung BAPPENDA masih status sewa 5 tahunan, agar diprioritaskan penyediaan Gedung BAPPEDA	Menunggu kepastian lahan

No	Pengusul	Usulan / Pembahasan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Harsini (Kec. Purwojati)	Apresiasi pada usulan alokasi anggaran Pembangunan Gedung Kantor Kec. Purwojati	
		Usulan Penanganan ruas jalan Gerduren – Karangtalun Kidul	
		Usulan Penanganan Jembatan sebelah pasar Purwojati	
		Usulan Penanganan ruas jalan Karangtalun Lor – Balaidesa - Kaliurip	
		Usulan Penanganan ruas jalan Karangtalun Lor – Kaliwangi – Kalitapen	
		Usulan Penanganan ruas jalan Klapasawit – Kaliwangi	
		Dukungan pada rencana pembangunan Irigasi Banjarsari yang sudah masuk paparan DPU	
5	Ma'ruf (Bagian Pembangunan Setda Kab. Banyumas)	Usulan untuk adanya pembangunan gedung terpadu Pemkab Banyumas	Menunggu kajian
		Usulan penataan trotoar	Sudah ada beberapa prioritas penanganan trotoar pada paparan. Akan dikaji lebih dulu untuk prioritas lain diluar Paparan
6	Ningrum (Kec. Karanglewas)	Usulan penangan Jembatan Cibun	
		Usulan penangan Jembatan Grumbul kali Bamban (Singosari – Babakan) yang sudah putus hampir 1 tahun	
		Jalan depan Balaidesa Pasir kulon	
7	Perwakilan Kecamatan Baturraden	Usulan jembatan pandak – Karanggintung yang juga masuk pada Musrenbang tahun 2024	
		Konfirmasi lokus penanganan jembatan Sungai Logawa Purwosari – Beji yang ada di paparan, seharusnya sungai Banjaran.	
		Usulan penanganan jalan kemutug kidul – Kemutug Lor	
		Usulan penanganan jalan di desa Purwosari	

No	Pengusul	Usulan / Pembahasan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Usulan penanganan jalan Karangmangu – Kemutug Lor	
		Usulan penanganan Drainase di Depan Kecamatan Baturraden	
8	Perwakilan Kecamatan Rawalo	Usulan penanganan sarana pada Obyek Wisata Sorjem	
		Usulan penanganan jembatan di ruas jalan Gentawangi – Jatilawang, Kali Tajum	
9	Perwakilan Kecamatan Banyumas	Menyampaikan rencana pindahan rumah dinas Kejaksaan, agar ada inisiasi pemanfaatan gedung yang ditinggal	
		Pemrioritasan penanganan jalan-jalan di wilayah kecamatan Banyumas	
10	Perwakilan Kecamatan Sumbang	Usulan penanganan jalan Tambaksogra - Ciberem	
		Usulan penanganan jalan Baturraden Timur, Karangcegak Limpakuwus	
11	Perwakilan Dinas Kesehatan	Permasalahan di Puskesmas Purwokerto selatan sering banjir, mohon ada normalisasi saluran agar tidak melimpas masuk ke kompleks puskesmas	
12	Perwakilan Kecamatan Kemranjen	Usulan penanganan jalan Sirau - Sibalung	Sedang dalam perencanaan
		Usulan penanganan jalan Kecila - Karanggintung	Sedang dalam perencanaan
		Usulan penanganan jalan alasmalang – Karangsalam	
		Usulan penanganan jalan alasmalang – Petarangan, termasuk talud dan drainasenya	
13	Perwakilan Kecamatan Sokaraja	Usulan penanganan jalan Karangnanas – Karangrau	
		Usulan penanganan jalan Jompo Kulon – Banjaranyar	
		Usulan penanganan jalan Sunan Giri	

Usulan melalui forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah akan dimasukan menjadi pertimbangan dalam penyusunan Dokumen ini.



Gambar Dokumentasi Pelaksanaan Forum OPD

2.3.3.3 Isu Strategis

A. Isu Strategis Global

Isu Global (SDG's) sebagai berikut :

1. Kemiskinan
2. Pangan dan Gizi
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Gender
6. Air bersih dan sanitasi
7. Energi
8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja
9. **Infrastruktur**
10. Kesenjangan Kota dan Permukiman
11. Produksi dan konsumsi berkelanjutan
12. Perubahan iklim
13. Sumberdaya kelautan
14. Ekosistem daratan
15. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan
16. Kemitraan global

B. Isu Strategis Nasional

Pada tiap agenda pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat isu strategis. Agenda pembangunan dan isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Isu Strategis Kewilayahan: Ketimpangan antar wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI)
2. **Isu Pembangunan Perdesaan: Perekonomian dan kemiskinan, Kesenjangan Pelayanan dan Relasi Desa-Kota**
3. **Isu Pembangunan Perkotaan: Kontribusi Ekonomi Perkotaan terhadap Nasional, Urban Sprawl, Isu Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi dan Tata Kelola**

4. Isu Pembangunan IKN: Kesiapan Pemindahan ASN, Akselerasi Investasi di IKN, Alokasi Anggaran Pembangunan IKN
5. Isu Wilayah Jawa: Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah sekitarnya, Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri yang membuat nilai tambah industri masih rendah, Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, Kesenjangan keterampilan dan *mismatch* pendidikan-industri, Prevalensi *stunting*, *wasting* dan *underweight* masih relatif tinggi, Tingkat kemiskinan rata-rata Jawa sebesar 8,11% (2023)

C. Isu Strategis Jawa Tengah

Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah merumuskan isu strategis Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 sebagai berikut:

1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
2. Penurunan tingkat kemiskinan
3. Ketahanan pangan yang berkelanjutan
- 4. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan**
5. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana
6. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
7. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat
8. Tata kelola pemerintahan yang dinamis

D. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam konteks Pemerintah Daerah, penerapan SPM menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah. Ketentuan ini mencakup urusan penting seperti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pada urusan Pekerjaan Umum, SPM difokuskan pada pelayanan dasar terkait akses air minum dan sanitasi. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan layanan penyediaan air minum yang layak dan aman, serta layanan pengelolaan air limbah

domestik agar setiap penduduk memiliki akses terhadap infrastruktur dasar yang memadai. Hal ini meliputi pembangunan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) skala kecil atau komunitas, serta sistem sanitasi berbasis masyarakat maupun terpusat di lingkungan permukiman.

Implementasi SPM menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan layanan dasar, mengurangi ketimpangan sosial, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di daerah. Oleh karena itu, SPM merupakan prioritas kegiatan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan yang layak bagi seluruh warga negara.

E. Isu-isu Strategis Kabupaten Banyumas

Adapun isu KLHS RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Belum Meratanya Akses Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat**
2. Ancaman Degradasi Hutan dan Lahan
- 3. Belum Optimalnya Akses Sanitasi yang Aman dan Berkelanjutan**
4. Peningkatan Intensitas Bencana Alam dan Perubahan Iklim
- 5. Belum Optimalnya Daya Saing, Produktivitas dan Keberlanjutan Ekonomi Daerah**
6. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik, Keamanan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu-isu strategis pembangunan kabupaten Banyumas dapat dideskripsikan sebagai berikut.

1. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah

Perekonomian kabupaten Banyumas masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Kontribusi sektor pertanian cenderung

menurun, diversifikasi produk ekspor komoditas perdagangan masih belum optimal, dan pengembangan pariwisata belum optimal. Peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian masih rendah dengan banyaknya koperasi yang tidak sehat dan serapan tenaga kerja pada UMKM rendah. Sementara, pertumbuhan nilai investasi melambat. Dalam penanaman modal masih memerlukan dukungan peningkatan infrastruktur, penyiapan kompetensi sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan, dan kapasitas inovasi, serta stabilitas keamanan wilayah yang mendukung iklim investasi di Kabupaten Banyumas.. Sampai dengan tahun 2024, kondisi keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Banyumas sudah cukup baik ditandai dengan tingginya penegakan perda dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, serta pencegahan potensi konflik.

Untuk mewujudkan penguatan daya saing ekonomi daerah, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Penguatan infrastruktur, peningkatan SDM, penguatan jaringan perdagangan dan ekspor, penguatan pariwisata dan ekraf, serta adopsi teknologi dan inovasi harus menjadi prioritas utama. Dengan demikian, Banyumas dapat memperkuat daya saingnya di kancah ekonomi regional dan global, menciptakan peluang baru, dan membangun pondasi ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

2. Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Banyumas masih cukup tinggi, penanganan kemiskinan maupun pengangguran belum menunjukkan hasil yang signifikan. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran berjalan lambat karena penanganan kemiskinan dan pengangguran belum secara komprehensif dan berkelanjutan. Permasalahan data dan integrasi antar program penanggulangan kemiskinan masih memerlukan perbaikan agar tepat sasaran dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Investasi yang tidak menyerap banyak tenaga kerja, kesempatan kerja dan peluang usaha terbatas, serta kemandirian ekonomi masyarakat juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap lambatnya penurunan pengangguran dan kemiskinan di kabupaten Banyumas. Selain itu, isu perlindungan sosial yang belum optimal

turut mempengaruhi efektivitas program-program yang ada, sehingga perlindungan sosial yang memadai dan tepat sasaran diperlukan untuk mendukung masyarakat rentan agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan pengangguran.

3. Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Berkarakter

Untuk mengoptimalkan bonus demografi dan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat maka yang harus dilakukan adalah dengan mendorong akses pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat dan kesehatan untuk semua. Tidak kalah penting peningkatan gender, yang meliputi kesetaraan gender dalam pendidikan, akses ke pelayanan kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor.

Program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu pilar untuk meningkatkan kualitas SDM karena dapat meningkatkan kesehatan dan gizi anak, meningkatkan kemampuan belajar anak, dan mengurangi angka *stunting*.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi

Isu Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis dan kolaboratif merupakan isu jangka panjang yang tidak bisa diabaikan dan terkait dengan isu transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal, berorientasi hasil yang berdampak pada masyarakat. Landasan transformasi tata kelola pemerintahan Kabupaten Banyumas ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan yaitu cepat, responsif dan efektif serta kolaboratif dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan, dengan meningkatkan kualitas kebijakan publik didukung dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi serta sumber daya aparatur yang semakin berintegritas, serta proses pencapaian tujuan pembangunan yang efektif dan efisien.

Di era teknologi informasi yang semakin maju, pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan menjadi kunci untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan pondasi penting dalam menjalankan roda pemerintahan yang transparan dan akuntabel, akuntabilitas yang lebih tinggi. Teknologi informasi memungkinkan pengelolaan data dan informasi yang lebih efisien, serta meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Namun, penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan tidak serta merta menjamin optimalnya keuangan daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Masih terdapat berbagai kendala yang menghambat optimalisasi keuangan daerah, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, regulasi dan kebijakan yang tidak mendukung, integrasi sistem keuangan yang kurang baik, serta kurangnya sinergi antara program pusat, provinsi, kabupaten, dan desa.

5. Pengembangan Wilayah dan Daya Saing Infrastruktur Daerah

Salah satu permasalahan yang masih dijumpai dalam penyediaan infrastruktur adalah masih belum meratanya jaringan jalan di Kabupaten Banyumas, dan belum optimalnya kualitas jalan (masih terdapat ruas jalan yang kondisinya rusak). Pada pusat pertumbuhan ekonomi ketersediaan dan kerusakan jalan menyebabkan belum optimalnya infrastruktur tersebut dalam mendukung perekonomian daerah, terutama untuk mendorong investasi, memperlancar arus barang dan orang, serta efisiensi logistik untuk meningkatkan nilai tambah produk daerah.

Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar merupakan pemenuhan hak dasar masyarakat, dan menjadi bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan. Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar akan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu perlu didorong untuk ditingkatkan pemenuhan dan pemerataannya, seperti perumahan dan kawasan permukiman yang layak, penyediaan sarana air minum layak dan air minum aman, serta sanitasi aman bagi masyarakat.

Permasalahan lainnya dalam penyediaan infrastruktur adalah kerusakan pada jaringan irigasi sehingga distribusi air tidak merata,

masih kurangnya sarana tampungan air baku. Hal ini mempengaruhi produktivitas tanaman pangan, dan dapat mengancam ketahanan pangan daerah.

Sebagai upaya mitigasi bencana yang diakibatkan daya rusak air Kabupaten Banyumas yang memiliki sungai-sungai besar memerlukan bangunan pengaman longsor berupa talud tebing sungai di berbagai wilayah. Ketersediaan dan kualitas jalan sebagai jalur evakuasi juga perlu terus ditingkatkan mengingat wilayah Kabupaten Banyumas yang rawan bencana. Pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan potensi bencana, dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap bencana.

6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan serta Ketahanan Iklim dan Bencana

Kekayaan sumber daya alam Kabupaten Banyumas merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang potensial untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Kondisi geografis wilayah, keberadaan Gunung Slamet, segala potensi yang menyertainya seperti tanah subur, pemandangan indah, jalur mineralisasi, potensi air tanah, potensi energi baru terbarukan (panas bumi, *biomassa*, dll), serta kekayaan lainnya mampu memberikan dukungan bagi kehidupan masyarakat. Namun demikian kondisi geografis Kabupaten Banyumas juga memiliki potensi bahaya bencana. Kabupaten Banyumas memiliki risiko bencana tingkat sedang untuk beberapa jenis bahaya bencana, antara lain gempa bumi, tanah longsor, gunung api, banjir.

Peningkatan jumlah penduduk dan kecenderungan peningkatan kegiatan masyarakat, berdampak pada peningkatan penggunaan sumber daya alam, yang apabila tidak dikelola dengan baik akan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam. Sejalan dengan peningkatan penduduk daya dukung pangan dan daya dukung air, dan kualitas lingkungan hidup diperkirakan menurun, dan timbunan sampah akan meningkat. Sementara emisi gas rumah kaca sebagai penyumbang utama perubahan iklim diperkirakan meningkat hingga lima tahun yang akan datang. Perubahan iklim dapat meningkatkan kejadian bencana, khususnya

bencana yang terkait iklim. Tanpa upaya yang signifikan hal-hal tersebut akan mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat. Untuk keberlanjutan pembangunan dan kehidupan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dengan tetap melihat daya dukung dan daya tampung lingkungan yang menopangnya. Pelaksanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan mitigasi bencana, mengingat kondisi geografis Kabupaten Banyumas yang rentan terhadap berbagai bencana alam. Pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana dengan mengimplementasikan strategi mitigasi bencana yang efektif. Hal ini meliputi pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, edukasi dan pelatihan bagi masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana, serta pengembangan sistem peringatan dini. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Banyumas dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan faktor-faktor lingkungan dan risiko bencana.

7. Penguatan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan suatu daerah dihitung melalui Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional. Nilai indeks ketahanan pangan Kabupaten Banyumas tahun 2024 adalah sebesar 80,74. Nilai tersebut masuk dalam kategori ketahanan pangan sangat baik (lebih dari 75,68), namun jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya IKP Kabupaten Banyumas salah satu yang paling rendah di Jawa Tengah.

Aspek ketersediaan pangan, meskipun produksi pangan Kabupaten Banyumas terus mengalami peningkatan, namun secara produktivitas komoditas pangan utama tidak terjadi peningkatan yang signifikan (padi, jagung, kedelai). Komoditas hortikultura masih diperlukan pengembangan komoditas potensial seperti buah-buahan bernilai tambah tinggi (alpukat, durian, melon), dan juga perlu mendapatkan perhatian yaitu produksi komoditas penyumbang inflasi seperti cabai dan bawang merah. Dari subsektor

peternakan terjadi perlambatan pertumbuhan produksi hasil peternakan tahun 2024 yang hanya tumbuh -19,9%, sementara di 2023 berhasil tumbuh sebesar 2,6%. Penguatan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, irigasi, jalan) menjadi syarat mutlak untuk peningkatan ketersediaan pangan. Sarana prasarana cadangan pangan pemerintah daerah juga sangat terbatas, dari 27 kecamatan, hingga 2024 hanya ada 5 sarana prasarana cadangan pangan yang terbangun. Dalam upaya peningkatan ketersediaan pangan diperlukan pemanfaatan teknologi pertanian sehingga upaya penguatan kelembagaan pertanian dan regenerasi petani menjadi penting. Penguatan ketersediaan pangan menjadi mutlak terutama dalam mendukung program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis. Diharapkan kebutuhan dalam program prioritas nasional tersebut dapat disediakan dan dipenuhi dari dalam daerah Kabupaten Banyumas sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi petani. beberapa komoditas yang penting untuk disediakan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis antara lain: Daging Ayam, Telur, Susu, Ikan, Beras, Sayur dan Buah.

Aspek keterjangkauan pangan, dapat didekati dengan ketersediaan sarana prasarana pasar yang menjadi tempat penyediaan pangan bagi masyarakat. Hingga 2024, masih terdapat 10 kecamatan yang belum memiliki pasar rakyat, dan berdasarkan data yang telah di rekap dari 301 desa hanya ada 91 desa yang memiliki pasar desa. Hal tersebut berdampak juga pada jumlah desa rawan pangan di Kabupaten Banyumas (2024: 78 desa rawan pangan). Ketersediaan pasar menjadi syarat mutlak untuk peningkatan nilai keterjangkauan pangan masyarakat. Selain itu, upaya pengendalian harga pangan melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Banyumas harus terus berjalan melalui berbagai kebijakan antara lain: operasi pasar, gerakan pangan murah, gerakan tanam cabai, pengembangan pekarangan pangan lestari, pengembangan akses pasar kepada petani, dan lain-lain.

Aspek pemanfaatan pangan dapat ditinjau melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang pada 2024 skor untuk Kabupaten Banyumas yaitu sebesar 92,63 atau masih di bawah skor PPH ideal 100. Diversifikasi konsumsi masyarakat sangat dibutuhkan terutama

upaya peningkatan konsumsi untuk pangan hewani, umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur buah dan konsumsi ikan. Penguatan konsumsi masyarakat tersebut diharapkan juga mampu menurunkan nilai prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) masyarakat, yang pada tahun 2023 nilai PoU Kabupaten Banyumas masih cukup tinggi yaitu 10,84%.

Isu Strategis Kabupaten Banyumas pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

- a) Belum optimalnya kualitas infrastruktur bidang Pekerjaan umum
- b) Masih rendahnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap
- c) Kinerja sistem irigasi yang belum optimal
- d) Layanan bangunan penampung air baku kurang optimal
- e) Masih terdapat bangunan gedung dalam kondisi rusak
- f) Kurang optimalnya sertifikasi tenaga konstruksi
- g) Infrastruktur Pelayanan Dasar belum memadai
- h) Peningkatan alih fungsi lahan

F. **Perumusan Isu-isu Strategis DPU Kabupaten Banyumas**

Dengan mengacu pada permasalahan dan Isu strategis Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Global, maka isu yang terkait tugas dan fungsi Dinas pekerjaan Umum adalah sebagai berikut : Belum Optimalnya Kualitas Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

Permasalahan	Isu KLHS	Isu Provinsi	Isu nasional	Isu Global
Belum Optimalnya Kualitas Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	Belum Optimalnya Daya Saing, Produktivitas dan Keberlanjutan Ekonomi Daerah	Penyediaan Prasarana dan Sarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	1. Isu Pembangunan Perdesaan: Perekonomian dan Kemiskinan, Kesenjangan Pelayanan dan Relasi Desa-Kota 2. Isu Pembangunan Perkotaan: Kontribusi Ekonomi Perkotaan terhadap Nasional, Urban Sprawl, Isu Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi dan Tata Kelola	Infrastruktur

Maka, isu strategis Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas adalah **Peningkatan Kualitas Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum.**

Adapun **Sasaran Strategis** Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas adalah :

1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota
2. Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berdasarkan Dokumen Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan
3. Persentase Masyarakat jasa konstruksi yang dibina
4. Persentase Capaian Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air
5. Persentase Capaian Kinerja Infrastruktur Cipta Karya

Dan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, maka di tetapkan juga **Sasaran Pendukung Strategis**, meliputi :

1. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (SAKIP) di DPU
2. Maturitas SPIP Perangkat Daerah di DPU
3. Kinerja Pelayanan Publik Perangkat Daerah di DPU

III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan.

3.1 Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih

Telaahan terhadap visi, misi, dan program kepala daerah merupakan langkah strategis dalam memastikan keselarasan antara arah kebijakan daerah dengan peran dan fungsi perangkat daerah, termasuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

“Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil, dan Sejahtera.”

Visi ini mengandung tiga nilai utama:

Produktif, yaitu mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya secara optimal dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar permukiman yang mendukung kualitas hidup masyarakat.

Adil, menggambarkan komitmen terhadap pemerataan pembangunan dan layanan dasar tanpa diskriminasi, termasuk pemerataan akses terhadap rumah layak huni, air minum, dan sanitasi.

Sejahtera, yaitu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, hidup sehat, aman, dan nyaman melalui penyediaan hunian yang layak serta lingkungan permukiman yang berkualitas.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan enam misi pembangunan daerah, yaitu ;

1. Meningkatnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia (SDM)
2. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah
3. Meningkatnya ketahanan pangan
4. **Meningkatnya pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan**
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berdaya saing
6. Meningkatnya keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas memiliki peran utama dalam mendukung Misi ke-4, yaitu: **meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan**, serta turut mendukung Misi lainnya

terkait ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan pemerintahan yang profesional, bersih, dan melayani serta transparan. Peran ini diwujudkan melalui penyediaan rumah layak huni, sistem air minum dan sanitasi yang layak, serta penguatan infrastruktur permukiman berbasis kebutuhan masyarakat.

Tabel 3.1. Tabel Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Misi	Trilas Program Bupati-Wakil Bupati Banyumas	Rincian Penjabaran Trilas Program Bupati-Wakil Bupati Banyumas Tahun 2025-2030	Program Prioritas Daerah	Rencana Dukungan DPU	Program Dinas PU
1. Meningkatnya kualitas hidup dan daya saing SDM	- Program Pasti Sekolah - Program peningkatan akses pendidikan untuk semua - Program Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - Pengembangan infrastruktur Pendidikan	1. Transportasi sekolah yang murah dan aman di daerah-daerah terpencil 2. Beasiswa kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi 3. Membangun dan memperluas Fasilitas PAUD di wilayah-wilayah yang kurang terlayani 4. Renovasi sekolah-sekolah yang memerlukan perbaikan infrastruktur 5. Meningkatkan ketersediaan prasarana sekolah yang modern 6. Menyediakan jaringan internet di sekolah- sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Akses jalan, terutama akses menuju sekolah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
2. Menguatnya ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri dan mensejahterakan	2. Layanan Puskesmas Rawat Inap di Setiap Kecamatan - Program Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan - Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak - Pengembangan Layanan Sanitasi dan Air Bersih - Pelayanan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin	Tersedianya layanan puskesmas rawat inap di setiap kecamatan untuk menjamin kesehatan untuk semua masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akses jalan, terutama akses menuju Puskesmas	PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN
	3. Insentif Guru Ngaji, dan operasional Pesantren, Organisasi Keagamaan, RT/RW dan BPD	Pemberian insentif kepada guru ngaji, dan operasional untuk pesantren, organisasi keagamaan, RT/RW dan BPD	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4. Memajukan Seni Budaya dan Prestasi Olahraga Banyumas	1. Satu event kebudayaan atau olahraga Setiap Bulan 2. Peningkatan insentif untuk atlet	- PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan bangunan cagar budaya	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Misi	Trilas Program Bupati-Wakil Bupati Banyumas	Rincian Penjabaran Trilas Program Bupati-Wakil Bupati Banyumas Tahun 2025-2030	Program Prioritas Daerah	Rencana Dukungan DPU	Program Dinas PU
		3. Peningkatan kualitas pembinaan dan manajemen atlet 4. Revitalisasi sarana dan prasarana olahraga dan kebudayaan 5. Fasilitas penyelenggaraan pentas seni dan budaya Lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
	5. Pengembangan Sentra Pengusaha dan Petani Muda di Setiap Kecamatan	1. Fasilitas akses permodalan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan 2. Fasilitas kemitraan antara UMKM dengan perusahaan skala besar 3. Pelatihan dan pendampingan manajemen bisnis untuk pemuda pelopor UMKM dan petani muda 4. Pelatihan dan fasilitasi pengembangan produk kreatif berbasis kearifan lokal 5. Pembentukan sentra industri untuk pelaku usaha kreatif lokal 6. Fasilitasi promosi produk kreatif Lokal	- PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan irigasi agar meningkatkan daya saing pertanian dan dapat menarik minat petani muda	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Misi	Trilas Program Bupati-Wakil Bupati Banyumas	Rincian Penjabaran Trilas Program Bupati-Wakil Bupati Banyumas Tahun 2025-2030	Program Prioritas Daerah	Rencana Dukungan DPU	Program Dinas PU
			- PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
	6. Pengembangan Desa Wisata dengan Melibatkan BUMDES	1. Penguatan Manajemen BUMDES untuk pengembangan dan pengelolaan desa wisata 2. Pengembangan destinasi dan produk wisata berbasis Potensi dan budaya lokal 3. Pengembangan ekosistem wisata yang mengintegrasikan produk lokal, objek wisata dan atraksi budaya 4. Promosi destinasi wisata hingga tingkat internasional	- PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pengelolaan Sumber Daya Air guna mendukung berbagai potensi wisata yang ada Pengelolaan bangunan cagar budaya	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	7. Revitalisasi Pasar Tradisional yang Aman dan Nyaman	1. Revitalisasi sanitasi pasar yang bersih dan sehat 2. Penataan kios pedagang dan fasilitas parkir 3. Penguatan pengelola pasar melalui kolaborasi dengan paguyuban 4. Pelatihan dan pendampingan pedagang pasar tradisional untuk peningkatan daya saing dengan pasar modern 5. Digitalisasi retribusi pasar	- PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Peningkatan kualitas drainase pada pasar Peningkatan kualitas sanitasi pada pasar Penataan bangunan dan lingkungannya pada pasar Penataan bangunan pasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	8. Percepatan Pengentasan Kemiskinan	1. Menurunkan angka stunting dengan pemberian bantuan makanan bergizi 2. Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran 3. Percepatan penambahan jumlah rumah layak huni 4. Perluasan akses kesempatan kerja bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan	- PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
3. Meningkatkan ketahanan pangan	9. Mewujudkan Swasembada Pangan Lokal Menuju	1. Penguatan kolaborasi kelompok tani dan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan infrastruktur irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Misi	Trilas Program Bupati-Wakil Bupati Banyumas	Rincian Penjabaran Trilas Program Bupati-Wakil Bupati Banyumas Tahun 2025-2030	Program Prioritas Daerah	Rencana Dukungan DPU	Program Dinas PU
	Kesejahteraan Petani	2. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi dan jalan usaha tani 3. Pengembangan gudang penyimpanan pangan 4. Mempermudah permodalan untuk petani 5. Jaminan keanggotaan asuransi petani 6. Pengembangan pasar komoditas tani yang berdaya saing 7. Implementasi teknologi pertanian modern (Smart Farming), terintegrasi dan berkelanjutan 8. Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan penelitian untuk peningkatan kualitas dan kapasitas produksi pertanian	- PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - PROGRAM PEMBEDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
4. Meningkatnya pengembangan wilayah dan Infrastruktur yang berkelanjutan	10. Penyediaan Air Bersih untuk Masyarakat	1. Pembangunan jaringan air bersih baru	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Penyediaan bangunan air baku	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		2. Perbaiki sarana penyediaan air bersih	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pengembangan sistem penyediaan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		3. Jaminan bantuan air bersih di wilayah yang rawan kekeringan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (BKAD)	Pengembangan sistem air limbah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		4. Kolaborasi program sungai bersih untuk menjaga kualitas air dan lingkungan sungai	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan sistem persampahan regional	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
	11. Pembangunan Jalan Berkualitas Lintas Desa dan Kota	Pembangunan Jalan Berkualitas Lintas Desa dan Kota	- PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Penyelenggaraan jalan Penyediaan drainase	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	12. Percepatan Pembangunan Kawasan Industri untuk Menciptakan Lapangan Pekerjaan	Pembangunan Kawasan Industri	- PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyediaan akses menuju kawasan industri Penyediaan drainase	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Misi	Trilas Program Bupati-Wakil Bupati Banyumas	Rincian Penjabaran Trilas Program Bupati-Wakil Bupati Banyumas Tahun 2025-2030	Program Prioritas Daerah	Rencana Dukungan DPU	Program Dinas PU
			- PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan bangunan gedung penunjang kegiatan Penataan bangunan dan lingkungannya di kawasan industri Penyediaan air baku pada kawasan industri Penyediaan sistem persampahan regional pada kawasan industri	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah berintegritas, adaptif dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah	13. Sistem Pelayanan Birokrasi yang Cepat, Mudah, Transparan dan Solutif - Program Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan - Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah - Reformasi Birokrasi dan Efisiensi Administrasi	1. Penyederhanaan prosedur perizinan dan pelayanan publik 2. Penguatan digitalisasi dan integrasi sistem birokrasi untuk mempercepat proses administrasi pemerintahan 3. Penerapan aplikasi layanan publik berbasis gawai untuk memudahkan masyarakat berbagai layanan pemerintahan 4. Implementasi sistem pembayaran digital untuk layanan-layanan Pemerintah 5. Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah (KPU) 6. Peningkatan Promosi Investasi (KPU) 7. Peningkatan Kualitas Layanan Publik (KPU)	- PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA - PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (SETDA) - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan program penunjang kegiatan dinas PU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana	Kolaborasi Program Sungai Bersih untuk Menjaga Kualitas Air dan Lingkungan Sungai	Pemantauan kualitas air permukaan	- PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Penyediaan bangunan air baku Pengembangan sistem air limbah	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Misi	Trilas Program Bupati-Wakil Bupati Banyumas	Rincian Penjabaran Trilas Program Bupati-Wakil Bupati Banyumas Tahun 2025-2030	Program Prioritas Daerah	Rencana Dukungan DPU	Program Dinas PU
				Penyediaan sistem persampahan regional	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

3.2 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Kabupaten Banyumas.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas selama periode Renstra tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum

Tabel 3.2. Tabel Tujuan Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No.	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun					Target Akhir
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rata-Rata Capaian Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	66,587	67,964	69,383	71,684	73,987	75,332

3.3 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum

Tabel 3.3. Tabel Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun-					Target Akhir
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,950	87,000	87,050	87,100	87,150	87,200
		Nilai SPIP Perangkat Daerah	3,490	3,640	3,790	3,940	4,090	4,240
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3,510	3,660	3,810	3,960	4,110	4,260
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	72,694	73,944	75,194	76,444	77,694	78,944
		Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berdasarkan Dokumen Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan	100	100	100	100	100	100
		Persentase Masyarakat jasa konstruksi yang dibina	62,790	66,560	70,320	74,080	77,850	81,610
		Persentase Capaian Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air	67,568	68,443	69,318	70,193	71,068	71,943
		Persentase Capaian Kinerja Infrastruktur Cipta Karya	29,883	30,873	32,082	37,702	43,325	44,165

3.4 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4 Strategi dan Keterkaitannya dengan Tujuan dan Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
1 Meningkatkan Kinerja infrastruktur	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota 2. Menyelenggarakan Penataan Ruang 3. Melaksanakan pembinaan Jasa konstruksi 4. Meningkatkan kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air 5. Meningkatkan kinerja Infrastruktur Cipta Karya
	2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	1. Meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Meningkatkan Nilai SPIP Perangkat Daerah 3. Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah

3.5 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Program yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijaksanaan Operasional adalah :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- c. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
- d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- f. Program Pengembangan Permukiman
- g. Program Penataan Bangunan Gedung
- h. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- i. Program Penyelenggaraan Jalan
- j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- l. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.5 Tabel Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Misi Daerah : Meningkatkan pengembangan wilayah dan Infrastruktur yang berkelanjutan							
1	Meningkatnya Kinerja infrastruktur	1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota 2. Menyelenggarakan Penataan Ruang 3. Melaksanakan pembinaan Jasa konstruksi 4. Meningkatkan kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air 5. Meningkatkan kinerja Infrastruktur Cipta Karya		1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 2. Peningkatan Aksesibilitas dan Keterpaduan Data Tata Ruang 3. Peningkatan Jumlah tenaga konstruksi terlatih 4. Peningkatan perlindungan masyarakat terhadap bencana SDA dan meningkatnya Kinerja irigasi 5. Penyediaan Akses air minum, sanitasi yang layak, drainase perkotaan, sistem persampahan, penataan bangunan dan lingkungannya serta penyelenggaraan bangunan gedung	
		2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	1. Meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Meningkatkan Nilai SPIP Perangkat Daerah 3. Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah		1. Penguatan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Berbasis Kinerja 2. Peningkatan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3. Penerapan Manajemen Risiko Secara Terstruktur	

3.6 Inovasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya khususnya di sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka Dinas Pekerjaan Umum selalu berinovasi. Inovasi ini tidak hanya sekadar ide, tetapi harus mengandung pembaruan yang memberikan solusi yang kreatif dan efektif untuk mengatasi kemacetan atau kebuntuan dalam sistem pelayanan yang kaku, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Selain itu, inovasi juga harus memenuhi kriteria tertentu, seperti efisiensi, efektivitas, dan perbaikan kualitas layanan, serta tidak menimbulkan konflik kepentingan sehingga menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan inovasi dan kolaborasi antar stakeholder.

Inovasi yang masih menjadi unggulan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas adalah :

1. Lipstik Cantik (Limbah Plastik untuk Campuran Aspal Hotmix)

Di tengah tantangan pelik pengelolaan sampah dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas hadir dengan terobosan yang menyandingkan kedua isu tersebut dalam satu solusi cerdas: Lipstik Cantik—singkatan dari Limbah Plastik menjadi Campuran Aspal Hotmix. Inovasi ini bukan sekadar upaya DPU untuk membangun jalan, melainkan sebuah komitmen nyata dalam menjalankan peran lintas sektor untuk menyelamatkan lingkungan. Melalui Lipstik Cantik, DPU Kab. Banyumas tidak hanya memanfaatkan sampah plastik (terutama jenis kresek dan kemasan) yang selama ini sulit terurai dan membebani Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Lebih dari itu, mereka mengubahnya menjadi bahan baku bernilai tambah yang dicampur ke dalam aspal. Hasilnya berupa Infrastruktur jalan yang dibangun menjadi lebih kuat, awet, dan tahan terhadap retak, sekaligus secara signifikan mengurangi timbunan sampah plastik di Banyumas. Lipstik Cantik membuktikan bahwa pembangunan fisik dapat berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan, menjadikannya model inovasi OPD yang adaptif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan dan kebersihan daerah.

2. Formaspejal (Forum Masyarakat Peduli Jalan)

Dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jalan maka Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas membentuk Formaspejal yang memiliki beberapa peran kunci di daerah tempat mereka beroperasi, antara lain:

Pengawasan Infrastruktur : Anggota Formaspejal aktif memantau kondisi jalan di wilayah mereka (misalnya, jalan rusak, berlubang, atau kurangnya penerangan) dan mengumpulkan data untuk dilaporkan kepada dinas terkait (seperti Dinas Pekerjaan Umum/DPU).

Advokasi Publik : Forum ini menyuarakan aspirasi masyarakat terkait perbaikan jalan, perencanaan pembangunan, dan alokasi anggaran infrastruktur.

Edukasi dan Kemitraan : Formaspejal seringkali bertindak sebagai jembatan komunikasi, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban terkait penggunaan jalan, serta menjalin kemitraan dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan masalah.

Kontrol Sosial : Mereka berfungsi sebagai kontrol sosial untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.

Kehadiran Formaspejal menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah, terutama dalam memastikan kualitas dan keamanan jalan sebagai urat nadi perekonomian dan mobilitas.

3. Formaspesung (Forum Masyarakat Peduli Sungai)

Dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sungai maka Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas membentuk Formaspesung yang memiliki beberapa peran antara lain:

Konservasi dan Pelestarian melalui

Aksi Bersih Sungai: Mengorganisir kegiatan rutin membersihkan sampah dan material lain dari badan sungai dan bantaran.

Reboisasi: Melakukan penanaman pohon di daerah hulu dan sepanjang bantaran sungai untuk mencegah erosi dan menjaga debit air.

Edukasi Lingkungan: Mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai, bahaya membuang limbah ke sungai, dan praktik hidup ramah sungai.

Pengawasan dan Advokasi

Pemantauan Kualitas Air: Mengawasi dan melaporkan jika terjadi pencemaran air sungai akibat limbah industri atau rumah tangga.

Pengawasan Tata Ruang: Memastikan tidak ada pembangunan liar atau alih fungsi lahan di sempadan sungai yang melanggar aturan dan berpotensi menyebabkan banjir atau kerusakan ekosistem.

Jembatan Komunikasi: Berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup, Balai Besar Wilayah Sungai/BBWS, dll.) dalam menyampaikan keluhan atau usulan terkait pengelolaan sungai.

Mitigasi Bencana

Pencegahan Banjir: Membantu memantau ketinggian air, membersihkan sumbatan, dan menginformasikan risiko banjir kepada warga.

Keberadaan Formaspesung sangat penting karena mereka mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga sungai sebagai sumber kehidupan dan mitigasi bencana hidrologi.

IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sebagai implementasi dari berbagai kebijakan dan strategi dalam rangka pencapaian tujuan strategis, langkah operasional perlu dituangkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas. Program merupakan himpunan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu oleh satu atau lebih instansi pemerintah, atau melalui kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan adalah penjabaran program sebagai arah pencapaian tujuan organisasi, sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk konkret dari aktivitas dalam suatu kegiatan. Indikator kinerja digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yang mencerminkan capaian kinerja.

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 adalah sesuai pada tabel 4.1.

Tabel 4.1a Rumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
Meningkatnya Kinerja infrastruktur			Rata-Rata Capaian Kinerja Infrastruktur	%	
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
		Meningkatnya Kesesuaian Tata Ruang Berdasarkan Dokumen Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berdasarkan Dokumen Pemanfaatan Ruang yang Diterbitkan	%	
		Meningkatnya Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	
		Meningkatnya pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi	Persentase Masyarakat Jasa Konstruksi yang Dibina	%	
		Meningkatnya Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Capaian Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air	%	
		Meningkatnya Kinerja Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Capaian Kinerja Infrastruktur Cipta Karya	%	
DPU					

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Meningkatkan Akses Air Minum Layak bagi masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
			Persentase rumah tangga dengan akses air minum Jaringan Perpipaan (JP)	%	
			Persentase rumah tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	
		Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah Kab/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani SPAM di Tahun n	Sambungan Rumah (SR)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
			Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	
			Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023) (Bukan Jaringan Perpipaan)	Rumah Tangga	
			Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai	Rumah Tangga	

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
			dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)		
			Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	
		Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan SPAM	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		SPAM Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	liter/detik	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		SPAM jaringan perpipaan yang dibangun	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	liter/detik	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		SPAM jaringan perpipaan yang dilakukan perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		Terbangunnya SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Unit	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
DPU					

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Meningkatkan Akses sanitasi Layak bagi masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur penyediaan air limbah domestik	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	
			Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif Sektor Air Limbah	TonCO2eq	
		Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan SPALD di Daerah Kab/Kota	Jumlah lokasi penanganan air limbah	Lokasi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Jumlah layanan publik sedot tinja dan mobil toilet yang disediakan	Kali	
			Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	
			Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot	Rumah sTangga	

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
			secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota		
			Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	
		Tersedianya unit pengelolaan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septic dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Rumah Tangga	Penyediaan Unit pengolahan setempat
		Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan SPALD	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Meningkatnya IPLT	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	Meter Kubik/Hari	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
		Tersedianya jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Terbangunnya IPLT	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Meter Kubik/Hari	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
		Tersedianya sarana pengangkutan lumpur tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
DPU					
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bencana SDA dan meningkatnya Kinerja irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
			Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	%	
			Persentase Bangunan Penyedia Air Baku Dalam Kondisi Baik	%	
			Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	%	
		Meningkatnya jumlah penanganan Bangunan penyedia Air Baku dan Pengamanan wilayah aliran sungai rawan longsor dan Banjir	Jumlah Bangunan Air Baku ditangani	Unit	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun, ditingkatkan dan dipelihara	Km	

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
		Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
		Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
		Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	Km	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
		Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	Km	Pembangunan Kanal Banjir
		Terehabilitasinya Embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi	Unit	Rehabilitasi Embung
		Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
		Terbangunnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Unit	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
		Terbangunnya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	Unit	Pembangunan Unit Air Baku
		Beroperasi dan Terpeliharanya Embung Air Baku	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
		Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
					dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
		Terlaksanakannya penyiapan, pelaksanaan dan pengawasan alokasi air	Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi	Dokumen	Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air
		Kelembagaan Pengelola Irigasi yang Mendapatkan Operasionalisasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
		Tersusunnya Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa
		Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Km	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
		Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Km	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
DPU					
		Terlaksananya Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase rata - rata capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota yang ditetapkan	Dokumen	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Terlaksananya Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
		Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Laporan	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun	Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		Tersusunnya peta dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	Peta	Penyusunan Peta Dasar
		Tersusunnya RDTR Kab/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan KKPR Non - Berusaha dan Validasi pernyataan mandiri tata ruang	Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Terlaksananya Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian yang dilaksanakan	Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Terlaksananya Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
		Terlaksananya Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang
DPU					
		Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
		Meningkatnya kualitas bangunan pelengkap jalan	Panjang Drainase yang dibangun ditingkatkan dan dipelihara	Meter	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
		Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
		Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Perkotaan	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
		Tersusunnya Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	Kawasan Genangan	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
DPU					
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
			Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	%	
		Meningkatnya Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	Jumlah gedung pemerintah yang dibangun, dipelihara dan diubahsuai	Unit	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dokumen	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
DPU					
		Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		Meningkatnya Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang dilaksanakan	Kawasan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
		Terlaksananya Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Orang	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
DPU					
		Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase panjang jalan kabupaten yang dipelihara	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
			Persentase panjang jalan kabupaten yang dibangun, direkonstruksi dan ditingkatkan kapasitasnya	%	
		Meningkatnya panjang jalan kabupaten dibangun ditingkatkan dan dipelihara	Panjang jalan kabupaten yang dibangun dan ditingkatkan	Km	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
			Panjang jalan kabupaten yang dipelihara	Km	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan	Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
		Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	Km	Pembangunan Jalan
		Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	Rekonstruksi Jalan
		Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Km	Pemeliharaan Berkala Jalan
		Terbangunnya Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Meter	Pembangunan Jembatan
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Km	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
		Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	Pemeliharaan Rutin Jalan
		Terpeliharanya Jembatan Secara Berkala	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Meter	Pemeliharaan Berkala Jembatan
		Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan
		Jalan yang mendapatkan Pelebaran Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Km	Pelebaran Jalan Menuju Standar
		Tergantinya Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	Meter	Penggantian Jembatan
		Terrehabilitasinya jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter	Rehabilitasi Jembatan
		Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	Rehabilitasi Jalan
		Terantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Km	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
DPU					

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Meningkatnya Jumlah tenaga konstruksi terlatih	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil yang dilatih	%	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
			Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	
		Meningkatnya jumlah pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan	Jumlah Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Kegiatan	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
		Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
		Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
		Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten yang dikelola	Sistem Informasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
		Terlaksananya Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Kegiatan	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
DPU					
		Meningkatnya sistem dan pengelolaan persampahan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan	%	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
		Meningkatnya pelayanan infrastruktur persampahan	Jumlah Infrastruktur Pengelolaan Persampahan yang Tersedia	Unit	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	Ton/hari	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
		Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	Unit	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
		Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Unit	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
		Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	Ton/hari	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
		Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Orang	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
DPU					

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Meningkatnya ketersediaan infrastruktur permukiman strategis	Persentase Infrastruktur Permukiman Strategis yang disediakan	%	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
		Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Permukiman Strategis	Jumlah Infrastruktur Permukiman Strategis yang dibangun	Unit	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Ton/hari	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	liter/detik	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Meter Kubik/Hari	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Unit	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian				

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
	dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah				
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	
			Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	
DPU					
		Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	
			Nilai kematangan organisasi	Angka	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	
		Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD)	%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Pengadaan Mebel
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	Pengadaan Alat Besar
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Pemeliharaan Mebel
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Sokaraja					

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	
			Nilai kematangan organisasi	Angka	
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	
		Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Pemeliharaan Mebel
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Sumpiuh					
		Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	
			Nilai kematangan organisasi	Angka	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	
		Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Banyumas					
		Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	
			Nilai kematangan organisasi	Angka	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	
		Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Cilogok					
		Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			IKM Perangkat Daerah	Angka	

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	
			Nilai kematangan organisasi	Angka	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	
		Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Laboratorium Konstruksi dan Peralatan					
		Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Nilai kematangan organisasi	Nilai	
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	
			IKM Perangkat Daerah	Angka	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Pengadaan Mebel

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	Pengadaan Alat Besar
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Pemeliharaan Mebel
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Jatilawang					
		Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	
			Nilai kematangan organisasi	Angka	
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	
		Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Ajibarang					
		Optimalnya layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Nilai kematangan organisasi	Angka	
			IKM Perangkat Daerah	Angka	
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Purwokerto					
		Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai kematangan organisasi	Angka	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	
			IKM Perangkat Daerah	Angka	
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	
		Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik					
		Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Nilai kematangan organisasi	Nilai	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	
			IKM Perangkat Daerah	Angka	
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	
		Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
			Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Pengadaan Mebel

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Program, Kegiatan & Subkegiatan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Keterangan :

	: Tujuan
	: Sasaran
	: Program
	: Kegiatan
	: Sub Kegiatan

Tabel 4.1b Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan serta Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas Tahun 2025-2029

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Meningkatnya Kinerja infrastruktur	Rata-Rata Capaian Kinerja Infrastruktur	%	65.33	201,798,006,539	66.59	121,132,647,060	67.96	262,846,195,000	69.38	270,679,300,000	71.68	278,319,100,000	73.99	285,652,600,000	75.33	319,146,800,000
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berdasarkan Dokumen Pemanfaatan Ruang yang Diterbitkan	%	100.00	180,244,943,034	100.00	100,227,073,505	100.00	238,392,311,000	100.00	245,729,100,000	100.00	252,657,900,000	100.00	259,308,900,000	100.00	292,468,600,000
			Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	71.44		72.69		73.94		75.19		76.44		77.69		78.94	
			Persentase Masyarakat Jasa Konstruksi yang Dibina	%	59.03		62.79		66.56		70.32		74.08		77.85		81.61	
			Persentase Capaian Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air	%	66.69		67.57		68.44		69.32		70.19		71.07		71.94	

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Persentase Capaian Kinerja Infrastruktur Cipta Karya	%	29.58		29.88		30.87		32.08		37.70		43.33		44.17	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	79.54	14,123,585,689	80.25	10,600,000,000	80.97	15,815,000,000	81.70	16,136,000,000	82.45	16,595,800,000	83.21	17,037,200,000	83.98	17,253,500,000
		Meningkatkan Akses Air Minum Layak bagi masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur penyediaan air minum	Persentase rumah tangga dengan akses air minum Jaringan Perpipaan (JP)	%	30.24		31.73		33.22		34.72		36.21		37.70		39.19	

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Persentase rumah tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	17.12		24.76		32.39		40.03		47.66		55.30		62.94	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah Kab/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani SPAM di Tahun n	Sambungan Rumah (SR)	N/A	14,123,585,689	2,000.00	10,600,000.00	2,150.00	15,815,000,000	2,300.00	16,136,000,000	2,450.00	16,595,800,000	2,600.00	17,037,200,000	2,750.00	17,253,500,000
			Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	N/A		2,000.00		2,150.00		2,300.00		2,450.00		2,600.00		2,750.00	
			Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan	Rumah	N/A		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023) (Bukan Jaringan Perpipaan)	Tangga														
			Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	N/A		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
			Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap	Rumah	N/A		2,000.00		2,150.00		2,300.00		2,450.00		2,600.00		2,750.00	

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Tangg														
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan SPAM	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	30.00	2,385,000	N/A		15.00	50,000,000	15.00	61,714,000	15.00	76,577,000	15.00	80,000,000	15.00	100,000,000
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	3.00	264,509,340	2.00	300,000,000	1.00	100,000,000	1.00	120,000,000	1.00	140,000,000	1.00	160,000,000	1.00	180,000,000
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air	SPAM Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air	liter	4.70	1,420,787,000	1.60	7,700,000,000	8.60	3,163,000,000	9.20	3,200,000,000	9.80	3,300,000,000	10.40	3,300,000,000	11.00	3,320,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	/detik														
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SPAM jaringan perpipaan yang dibangun	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	liter /detik	15.40	8,695,543,349	18.40	1,100,000,000	30.00	10,022,000,000	32.00	10,200,000,000	34.00	10,270,000,000	36.00	10,402,472,000	38.00	10,348,811,000
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SPAM jaringan perpipaan yang dilakukan perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	1,073.00	3,740,361,000	140.00	1,500,000,000	590.00	1,480,000,000	630.00	1,554,286,000	670.00	1,809,223,000	710.00	2,094,728,000	750.00	2,304,689,000
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Terbangunnya SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Unit	N/A		N/A		100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Meningkatkan Akses sanitasi Layak bagi masyarakat melalui	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	2.46	124,586,380	4.24	170,000,000	8.24	21,419,413,000	12.24	21,854,200,000	16.24	22,477,000,000	20.24	23,074,800,000	24.24	23,367,800,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	AN SISTEM AIR LIMBAH	pembangunan dan pengembangan infrastruktur penyediaan air limbah domestik																
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	93.24		93.65		94.08		94.53		94.99		95.48		95.98	
			Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif Sektor Air Limbah	Ton CO2 eq	7,514.77		41,887.38		54,571.71		68,773.58		84,642.69		102,347.74		122,078.64	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan SPALD di Daerah Kab/Kota	Jumlah lokasi penanganan air limbah	Lokasi	85.00	124,586,380	30.00	170,000,000	30.00	21,419,413,000	30.00	21,854,200,000	30.00	22,477,000,000	30.00	23,074,800,000	30.00	23,367,800,000
			Jumlah layanan publik sedot tinja dan	Kali	N/A		340.00		360.00		380.00		400.00		420.00		440.00	

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			mobil toilet yang disediakan															
			Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Ru mah Tan gga	N/A		1,500.00		1,650.00		1,800.00		1,950.00		2,100.00		2,250.00	
			Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan	Ru mah Tan gga	N/A		20,355.00		40,125.00		60,459.00		81,369.00		102,867.00		124,966.00	

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota															
			Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	N/A		20,35 5.00		40,12 5.00		60,45 9.00		81,36 9.00		102,8 67.00		124,966.00	

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Tersedianya unit pengelolaan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Rumah Tangga	N/A		N/A		1,650.00	21,079,413,000	1,800.00	21,514,200,000	1,950.00	22,137,000,000	2,100.00	22,704,800,000	2,250.00	22,997,800,000
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan SPALD	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	N/A		N/A		30.00	50,000,000	30.00	50,000,000	30.00	50,000,000	30.00	50,000,000	30.00	50,000,000
1.03.0	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan	Rencana, Kebijakan, Strategi dan	Jumlah Dokumen Rencana,	Dok	2.00	124,586,380	2.00	170,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
5.2.01.0045	Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Teknis SPALD yang disusun	Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Uraian														
1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Meningkatnya IPLT	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	Meter Kubik/Hari	N/A		N/A		5.58	10,000,000	5.58	10,000,000	5.58	10,000,000	5.58	10,000,000	5.58	10,000,000
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Tersedianya jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	N/A		N/A		360.00	120,000,000	380.00	120,000,000	400.00	120,000,000	420.00	150,000,000	440.00	150,000,000
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Terbangunnya IPLT	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Meter Kubik/Hari	N/A		N/A		5.58	10,000,000	5.58	10,000,000	5.58	10,000,000	5.58	10,000,000	5.58	10,000,000
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Tersedianya sarana pengangkutan lumpur tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	N/A		N/A		1.00	50,000,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000
1.03.05.2.01.0037	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	58.87	13,699,087,547	60.25	4,332,913,433	61.25	20,021,032,000	62.25	20,070,300,000	63.25	20,642,300,000	64.25	21,191,300,000	65.25	21,460,400,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	DAYA AIR (SDA)	bencana SDA dan meningkatnya Kinerja irigasi																
			Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten /Kota	%	55.50		56.50		57.50		58.50		59.50		60.50		61.50	
			Persentase Bangunan Penyedia Air Baku Dalam Kondisi Baik	%	81.52		82.82		83.52		84.52		85.52		86.52		87.52	
			Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten /Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	%	70.50		71.00		71.50		72.00		72.50		73.00		73.50	
1.03.0 2.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada	Meningkatnya jumlah penanganan Bangunan penyedia Air	Jumlah Bangunan Air Baku ditangani	Unit	2.00	1,302,253,791	1.00	2,300,000,000	5.00	8,721,032,000	6.00	8,770,300,000	6.00	9,342,300,000	5.00	9,891,300,000	5.00	10,160,400,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Baku dan Pengamanan wilayah aliran sungai rawan longsor dan Banjir																
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun, ditingkatkan dan dipelihara	Km	N/A		N/A		7.05		7.05		7.05		7.05		7.05	
1.03.0 2.2.01 .0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kabupaten/Kota yang Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelembagaan Pengelolaan SDA Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	N/A		N/A		2.00	50,000,000	2.00	50,000,000	2.00	50,000,000	2.00	50,000,000	2.00	50,000,000
1.03.0 2.2.01 .0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	0.34	421,447,750	0.08	2,000,000,000	2.00	1,000,000,000	2.00	1,000,000,000	2.00	1,000,000,000	2.00	1,000,000,000	2.00	1,000,000,000
1.03.0 2.2.01 .0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	2.00	414,900,000	1.00	100,000,000	1.00	75,000,000	1.00	75,000,000	1.00	75,000,000	1.00	75,000,000	1.00	75,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.03.0 2.2.01 .0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	Km	N/A		N/A		5.00	4,000,000,000	5.00	4,000,000,000	5.00	4,500,000,000	5.00	5,500,000,000	5.00	6,000,000,000
1.03.0 2.2.01 .0113	Pembangunan Kanal Banjir	Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	Km	N/A		0.05		0.05	375,000,000	0.05	375,000,000	0.05	375,000,000	0.05	375,000,000	0.05	375,000,000
1.03.0 2.2.01 .0129	Rehabilitasi Embung	Terehabitasinya Embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi	Unit	N/A		N/A		1.00	375,000,000	1.00	375,000,000	1.00	375,000,000	1.00	375,000,000	1.00	375,000,000
1.03.0 2.2.01 .0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	N/A		N/A		1.00	500,000,000	2.00	1,000,000,000	2.00	1,000,000,000	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000
1.03.0 2.2.01 .0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Terbangunnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Unit	N/A		N/A		1.00	500,000,000	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000
1.03.0 2.2.01 .0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	5.00	465,906,041	1.00	200,000,000	5.00	300,000,000	5.00	300,000,000	5.00	300,000,000	5.00	300,000,000	5.00	300,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku	Terbangunnya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	Unit	N/A		N/A		1.00	1,321,032,000	1.00	870,300,000	1.00	942,300,000	1.00	991,300,000	1.00	760,400,000
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung Air Baku	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	N/A		N/A		3.00	225,000,000	3.00	225,000,000	3.00	225,000,000	3.00	225,000,000	3.00	225,000,000
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	N/A	12,396,833,756	N/A	2,032,913,433	56.50	11,300,000,000	57.00	11,300,000,000	57.50	11,300,000,000	58.00	11,300,000,000	58.50	11,300,000,000
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	11.41	10,239,769,850	6.00	970,276,861	11.20	6,000,000,000	11.20	6,000,000,000	11.20	6,000,000,000	11.20	6,000,000,000	11.20	8,000,000,000
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	2.97	2,009,787,106	0.50	712,636,572	180.90	2,000,000,000	180.90	2,000,000,000	180.90	2,000,000,000	180.90	2,000,000,000	180.90	2,000,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.03.02.2.02.0045	Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air	Terlaksanakannya penyiapan, pelaksanaan dan pengawasan alokasi air	Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi	Dokumen	N/A		N/A		1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000
1.03.02.2.02.0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Kelembagaan Pengelola Irigasi yang Mendapatkan Operasionalisasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga	1.00	147,276,800	1.00	350,000,000	2.00	100,000,000	2.00	100,000,000	2.00	100,000,000	2.00	100,000,000	2.00	100,000,000
1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	N/A		N/A		5.00	100,000,000	5.00	100,000,000	5.00	100,000,000	5.00	100,000,000	5.00	100,000,000
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Km	N/A		N/A		4.80	1,000,000,000	4.80	1,000,000,000	4.80	1,000,000,000	4.80	1,000,000,000	4.80	1,000,000,000
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Km	N/A		N/A		10.27	2,000,000,000	11.26	2,000,000,000	9.50	2,000,000,000	11.47	2,000,000,000	N/A	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase rata-rata capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang	%	100.00	84,181,000	100.00	523,217,500	100.00	850,000,000	100.00	867,200,000	100.00	891,900,000	100.00	915,600,000	100.00	927,200,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.03.1 2.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota yang ditetapkan	Dokumen	N/A		1.00	26,250,000	2.00	300,000,000	2.00	283,940,000	2.00	196,555,000	2.00	210,802,000	2.00	220,987,000
1.03.1 2.2.01 .0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A		2.00	26,250,000	1.00	250,000,000	1.00	233,940,000	1.00	146,555,000	1.00	160,802,000	1.00	170,987,000
1.03.1 2.2.01 .0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Laporan	N/A		N/A		1.00	50,000,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000
1.03.1 2.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun	Dokumen	4.00		1.00	371,967,500	2.00	350,000,000	2.00	345,000,000	2.00	476,250,000	2.00	476,250,000	2.00	476,250,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.03.1 2.2.02 .0004	Penyusunan Peta Dasar	Tersusunnya peta dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	Peta	N/A		1.00	109,805,000	1.00	150,000,000	1.00	125,000,000	1.00	140,000,000	1.00	140,000,000	1.00	140,000,000
1.03.1 2.2.02 .0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Tersusunnya RDTR Kab/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A		1.00	262,162,500	1.00	200,000,000	1.00	220,000,000	1.00	336,250,000	1.00	336,250,000	1.00	336,250,000
1.03.1 2.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan KKPR Non - Berusaha dan Validasi pernyataan mandiri tata ruang	Dokumen	1,068.00	84,181,000	780.00	125,000,000	780.00	100,000,000	780.00	188,260,000	780.00	169,095,000	780.00	178,548,000	780.00	179,963,000
1.03.1 2.2.03 .0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	N/A		N/A		1.00	50,000,000	1.00	88,260,000	1.00	69,095,000	1.00	78,548,000	1.00	79,963,000
1.03.1 2.2.03 .0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	N/A	84,181,000	N/A	125,000,000	2.00	50,000,000	2.00	100,000,000	2.00	100,000,000	2.00	100,000,000	2.00	100,000,000
1.03.1 2.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	Jumlah kegiatan pengendalian	Kegiatan	355.00		144.00		60.00	100,000,000	60.00	50,000,000	60.00	50,000,000	60.00	50,000,000	60.00	50,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	yang dilaksanakan															
1.03.1 2.2.04 .0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Terlaksananya Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	N/A		N/A		12.00	50,000,000	12.00	25,000,000	12.00	30,000,000	12.00	25,000,000	12.00	25,000,000
1.03.1 2.2.04 .0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Terlaksananya Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan	N/A		N/A		12.00	50,000,000	12.00	25,000,000	12.00	20,000,000	12.00	25,000,000	12.00	25,000,000
1.03.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	68.18	2,946,598,700	68.64	1,798,893,301	69.07	6,677,096,000	69.50	6,841,000,000	69.92	7,075,800,000	70.35	7,301,200,000	70.78	7,411,600,000
1.03.0 6.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung	Meningkatnya kualitas bangunan pelengkap jalan	Panjang Drainase yang dibangun ditingkatkan dan dipelihara	Meter	3,566.00	2,946,598,700	3,000.00	1,798,893,301	3,500.00	6,677,096,000	3,500.00	6,841,000,000	3,500.00	7,075,800,000	3,500.00	7,301,200,000	3,500.00	7,411,600,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen	1.00	81,479,800	1.00	100,000,000	4.00	400,000,000	4.00	400,000,000	4.00	400,000,000	3.00	300,000,000	2.00	200,000,000
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan	4.00	127,202,550	5.00	269,521,350	5.00	750,000,000	5.00	750,000,000	5.00	750,000,000	5.00	750,000,000	5.00	750,000,000
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	2.50	198,072,650	5.00	674,712,170	10.00	1,000,000,000	10.00	1,000,000,000	10.00	1,000,000,000	10.00	1,000,000,000	10.00	1,000,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	4.80	2,539,843,700	5.00	754,659,781	25.00	2,500,000,000	25.00	2,625,000,000	25.00	2,750,000,000	25.00	3,000,000,000	25.00	3,000,000,000
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Perkotaan	N/A		N/A		1.00	1,900,000,000	1.00	1,964,900,000	1.00	2,057,900,000	1.00	2,147,200,000	1.00	2,190,900,000
1.03.06.2.01.0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Tersusunnya Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	Kawasan Genangan	N/A		N/A		1.00	127,096,000	1.00	101,100,000	1.00	117,900,000	1.00	104,000,000	1.00	270,700,000
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	70.15	71,183,866,355	70.85	24,272,473,929	71.55	45,637,185,000	72.25	46,563,600,000	72.95	47,890,600,000	73.65	49,164,400,000	74.35	59,788,700,000
			Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	%	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Meningkatnya Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	Jumlah gedung pemerintah yang dibangun, dipelihara dan diubahsuai	Unit	N/A	71,183,866,355	N/A	24,272,473,929	25.00	45,637,185,000	24.00	46,563,600,000	24.00	47,890,600,000	24.00	49,164,400,000	24.00	59,788,700,000
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung	N/A		N/A		1.00	1,000,000,000	N/A		N/A		N/A		N/A	
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan	Bangunan Gedung	13.00	646,033,100	10.00	1,563,159,147	20.00	4,000,000,000	20.00	4,000,000,000	20.00	4,000,000,000	20.00	4,000,000,000	20.00	4,000,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Diperiksa Berkala															
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dokumen	N/A		N/A		N/A		1.00	200,000,000	N/A		N/A		N/A	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	27.00	70,228,424,255	10.00	22,547,601,972	4.00	40,137,185,000	4.00	41,863,600,000	4.00	43,390,600,000	4.00	44,664,400,000	4.00	55,288,700,000
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan	Dokumen	489.00	309,409,000	100.00	161,712,810	500.00	500,000,000	500.00	500,000,000	500.00	500,000,000	500.00	500,000,000	500.00	500,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG															
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANYA	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	19.13	128,089,700	19.13		19.93	7,650,000,000	20.73	7,805,200,000	21.53	8,027,600,000	22.33	8,241,100,000	23.13	8,345,700,000
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang dilaksanakan	Kawasan	N/A	128,089,700	N/A		2.00	7,650,000,000	2.00	7,805,200,000	2.00	8,027,600,000	2.00	8,241,100,000	2.00	8,345,700,000
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan	Dokumen	12.00	128,089,700	N/A		2.00	200,000,000	2.00	200,000,000	2.00	200,000,000	2.00	200,000,000	2.00	200,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															
1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tertatanya Bangunan dan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Kawasa	N/A		N/A		2.00	7,350,000,000	2.00	7,505,200,000	2.00	7,727,600,000	2.00	7,941,100,000	2.00	8,045,700,000
1.03.09.2.01.0012	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Terlaksananya Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Orang	N/A		N/A		100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase panjang jalan kabupaten yang dipelihara	%	71.44	77,693,258,262	71.57	58,480,671,072	71.69	120,158,985,000	71.81	121,526,800,000	71.94	124,590,300,000	72.06	127,515,000,000	72.18	148,744,600,000
			Persentase panjang jalan kabupaten yang dibangun, direkonstruksi dan ditingkatkan kapasitasnya	%	1.62		3.14		4.97		6.80		8.63		10.46		12.31	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya panjang jalan kabupaten dibangun ditingkatkan dan dipelihara	Panjang jalan kabupaten yang dibangun dan ditingkatkan	Km	N/A	77,693,258,262	N/A	58,480,671,072	24.08	120,158,985,000	24.11	121,526,800,000	24.06	124,590,300,000	24.12	127,515,000,000	24.28	148,744,600,000
			Panjang jalan kabupaten yang dipelihara	Km	N/A		N/A		120.00		120.00		120.00		120.00		120.00	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggara	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggara	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	Dokumen	6.00	501,305,125	4.00	500,000,000	14.00	1,000,000,000	14.00	1,000,000,000	14.00	1,000,000,000	14.00	1,000,000,000	14.00	1,000,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	an Jalan dan Jembatan	n Jalan dan Jembatan	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun															
1.03.1 0.2.01 .0053	Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	Km	N/A		0.10	500,00 0,000	4.00	22,500, 000,000	4.00	22,500, 000,000	4.00	22,500,0 00,000	4.00	22,500, 000,000	4.00	42,500,0 00,000
1.03.1 0.2.01 .0059	Rekonstruksi Jalan	Terekonstruksi nya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	20.6 4	32,312, 910,95 3	2.80	39,138, 327,36 0	20.00	25,000, 000,000	20.00	25,000, 000,000	20.00	25,000,0 00,000	20.00	25,000, 000,000	20.00	25,000,0 00,000
1.03.1 0.2.01 .0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Km	40.3 6	35,862, 171,84 7	40.00	5,606,0 44,088	40.00	24,000, 000,000	40.00	24,000, 000,000	40.00	24,000,0 00,000	40.00	24,000, 000,000	40.0 0	24,000,0 00,000
1.03.1 0.2.01 .0069	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Met er	N/A	6,813,3 74,737	N/A	1,212,8 46,077	75.00	17,880, 450,000	105.0 0	16,245, 250,000	55.00	21,845,3 00,000	120.0 0	18,888, 200,000	280. 00	29,117,8 00,000
1.03.1 0.2.01 .0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jalan/Jembata n yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Km	1,31 5.00	346,49 5,000	1,508 .00	600,00 0,000	1,315 .00	1,400,0 00,000	1,315 .00	1,400,0 00,000	1,315 .00	1,400,00 0,000	1,315. 00	1,400,0 00,000	1,31 5.00	1,400,00 0,000
1.03.1 0.2.01 .0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	76.1 6	1,857,0 00,600	75.00	10,223, 453,54 7	80.00	12,000, 000,000	80.00	12,000, 000,000	80.00	12,000,0 00,000	80.00	12,000, 000,000	80.0 0	12,000,0 00,000
1.03.1 0.2.01 .0061	sPemeliharaan Berkala Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Berkala	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Met er	N/A		N/A	200,00 0,000	27.20	1,428,0 00,000	49.30	2,588,2 50,000	28.00	1,470,00 0,000	45.00	2,362,5 00,000	45.0 0	2,362,50 0,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.03.1 0.2.01 .0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	N/A		N/A		32.00	320,000,000	32.00	320,000,000	32.00	320,000,000	32.00	320,000,000	32.00	320,000,000
1.03.1 0.2.01 .0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jalan yang mendapatkan Pelebaran Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Km	N/A		N/A		2.00	1,500,000,000	2.00	1,500,000,000	2.00	1,500,000,000	2.00	1,500,000,000	2.00	1,500,000,000
1.03.1 0.2.01 .0057	Penggantian Jembatan	Tergantinya Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	Meter	N/A		N/A	500,000,000	24.00	3,600,000,000	26.70	5,340,000,000	26.70	4,005,000,000	60.00	9,000,000,000	N/A	
1.03.1 0.2.01 .0058	Rehabilitasi Jembatan	Terrehabilitasinya jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter	N/A		N/A		28.00	2,499,000,000	28.00	2,499,000,000	28.00	2,499,000,000	28.00	2,499,000,000	28.00	2,499,000,000
1.03.1 0.2.01 .0055	Rehabilitasi Jalan	Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	N/A		N/A		5.00	6,750,000,000	5.00	6,750,000,000	5.00	6,750,000,000	5.00	6,750,000,000	5.00	6,750,000,000
1.03.1 0.2.01 .0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Km	N/A		N/A		1,315.00	281,535,000	1,315.00	384,300,000	1,315.00	301,000,000	1,315.00	295,300,000	1,315.00	295,300,000
1.03.1 1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya Jumlah tenaga konstruksi terlatih	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil yang dilatih	%	61.44	261,689,401	65.17	48,904,270	68.91	63,600,000	72.64	64,800,000	76.37	66,600,000	80.10	68,300,000	83.84	69,100,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	94.77		95.42		96.08		96.73		97.39		98.04		98.69	
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	94.85		95.10		95.36		95.62		95.88		96.13		96.39	
1.03.1 1.2.01	Penyelenggara an Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Meningkatnya jumlah pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan	Jumlah Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Kegi ata n	5.00	261,689,401	2.00	48,904,270	2.00	38,600,000	2.00	39,800,000	2.00	41,600,000	2.00	43,300,000	2.00	44,100,000
1.03.1 1.2.01. 0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Ora ng	93.00	8,899,900	30.00	5,000,000	100.00	30,000,000	100.00	30,000,000	100.00	30,000,000	100.00	30,000,000	100.00	30,000,000
1.03.1 1.2.01 .0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi	Ora ng	163.00	252,789,501	100.00	43,904,270	100.00	8,600,000	100.00	9,800,000	100.00	11,600,000	100.00	13,300,000	100.00	14,100,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih															
1.03.1 1.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten yang dikelola	Sistem Informasi	N/A		N/A		1.00	5,000,000	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000
1.03.1 1.2.02. 0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	N/A		N/A		1.00	5,000,000	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000
1.03.1 1.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Kegiatan	N/A		N/A		1.00	20,000,000	1.00	20,000,000	1.00	20,000,000	1.00	20,000,000	1.00	20,000,000
1.03.1 1.2.04. 0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi	Paket Pekerjaan	N/A		N/A		40.00	20,000,000	40.00	20,000,000	40.00	20,000,000	40.00	20,000,000	40.00	20,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Konstruksi Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	erjaan														
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya sistem dan pengelolaan persampahan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan	%	47.83		47.83		47.83	100,000,000	52.17	2,600,000,000	56.52	2,600,000,000	60.87	2,600,000,000	65.22	2,500,000,000
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan infrastruktur persampahan	Jumlah Infrastruktur Pengelolaan Persampahan yang Tersedia	Unit	11.00		11.00		11.00	100,000,000	12.00	2,600,000,000	13.00	2,600,000,000	14.00	2,600,000,000	15.00	2,500,000,000
1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	Ton/hari	N/A		N/A		10.00	90,000,000	10.00	280,000,000	10.00	280,000,000	10.00	280,000,000	10.00	280,000,000
1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	Unit	N/A		N/A		N/A		5.00	300,000,000	5.00	300,000,000	5.00	300,000,000	5.00	300,000,000
1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung	Tersedianya Sarana Pendukung	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/	Unit	N/A		N/A		N/A		10.00	300,000,000	10.00	300,000,000	10.00	300,000,000	10.00	300,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	TPS-3R/TPS yang Disediakan															
1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	Ton /hari	N/A		N/A		N/A		10.00	1,700,000,000	10.00	1,700,000,000	10.00	1,700,000,000	10.00	1,600,000,000
1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen	N/A		N/A		1.00	10,000,000	1.00	10,000,000	1.00	10,000,000	1.00	10,000,000	1.00	10,000,000
1.03.04.2.01.0018	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Orang	N/A		N/A		N/A		15.00	10,000,000	15.00	10,000,000	15.00	10,000,000	15.00	10,000,000
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur permukiman strategis	Persentase Infrastruktur Permukiman Strategis yang disediakan	%	N/A		N/A		N/A		33.33	1,400,000,000	66.67	1,800,000,000	100.00	2,200,000,000	100.00	2,600,000,000
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur	Meningkatnya Jumlah Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Permukiman	Unit	N/A		N/A		N/A		1.00	1,400,000,000	1.00	1,800,000,000	1.00	2,200,000,000	1.00	2,600,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Permukiman Strategis	Strategis yang dibangun															
1.03.07.2.01.0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Ton /hari	N/A		N/A		N/A		1.00	200,000,000	1.00	300,000,000	1.00	400,000,000	1.00	500,000,000
1.03.07.2.01.0021	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	liter /detik	N/A		N/A		N/A		1.00	400,000,000	1.00	500,000,000	1.00	600,000,000	1.00	700,000,000
1.03.07.2.01.0026	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis	Meter Kubik/Hari	N/A		N/A		N/A		1.00	400,000,000	1.00	500,000,000	1.00	600,000,000	1.00	700,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang dibangun															
1.03.07.2.01.0036	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Unit	N/A		N/A		N/A		1.00	400,000,000	1.00	500,000,000	1.00	600,000,000	1.00	700,000,000
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	86.35	21,553,063,505	86.95	20,905,573,555	87.00	24,453,884,000	87.05	24,950,200,000	87.10	25,661,200,000	87.15	26,343,700,000	87.20	26,678,200,000
			Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3.34		3.49		3.64		3.79		3.94		4.09		4.24	
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	2.29		3.51		3.66		3.81		3.96		4.11		4.26	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	90.75	20,266,933,797	91.00	19,863,134,985	91.25	22,713,481,428	91.50	23,209,797,428	91.75	23,920,797,428	92.00	24,603,297,428	92.25	24,937,797,428

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	90.34		90.44		90.54		90.64		90.74		90.84		90.94	
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	74.36		75.00		81.00		82.00		83.00		84.00		85.00	
			Nilai kematangan organisasi	Angka	43.00		43.25		43.50		44.00		45.00		46.00		47.00	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100.00	149,340,000	100.00	277,450,723	100.00	60,000,000	100.00	60,000,000	100.00	60,000,000	100.00	60,000,000	100.00	60,000,000
			Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat	%	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Daerah dengan DPA															
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3.00	95,064,000	3.00	178,256,259	4.00	30,000,000	4.00	30,000,000	4.00	30,000,000	4.00	30,000,000	6.00	30,000,000
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	1.00	54,276,000	1.00	99,194,464	8.00	30,000,000	8.00	30,000,000	8.00	30,000,000	8.00	30,000,000	9.00	30,000,000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.00	15,066,753,754	100.00	13,616,494,598	100.00	16,685,884,000	100.00	16,762,200,000	100.00	17,523,200,000	100.00	18,275,700,000	100.00	19,110,200,000
			Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	165.00	14,764,613,754	150.00	13,522,410,667	150.00	16,336,204,000	144.00	16,412,520,000	130.00	17,173,520,000	126.00	17,926,020,000	116.00	18,760,520,000
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Dokumen	12.00	302,140,000	12.00	94,083,931	12.00	349,680,000	12.00	349,680,000	12.00	349,680,000	12.00	349,680,000	12.00	349,680,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Pelaksanaan Tugas ASN															
X.XX.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.00	746,632,499	100.00	873,468,661	100.00	1,296,000,000	100.00	1,296,000,000	100.00	1,296,000,000	100.00	1,296,000,000	100.00	1,296,000,000
X.XX.0 1.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	12,997,000	1.00	17,014,065	10.00	10,000,000	10.00	10,000,000	10.00	10,000,000	10.00	10,000,000	10.00	10,000,000
X.XX.0 1.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8.00	66,207,000	8.00	92,219,883	10.00	313,000,000	10.00	313,000,000	10.00	313,000,000	10.00	313,000,000	10.00	313,000,000
X.XX.0 1.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2.00	21,936,000	2.00	28,076,578	10.00	22,000,000	10.00	22,000,000	10.00	22,000,000	10.00	22,000,000	10.00	22,000,000
X.XX.0 1.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	50.00	247,541,664	50.00	314,787,854	10.00	223,000,000	10.00	223,000,000	10.00	223,000,000	10.00	223,000,000	10.00	223,000,000
X.XX.0 1.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50.00	76,826,600	50.00	67,206,417	50.00	48,000,000	50.00	48,000,000	50.00	48,000,000	50.00	48,000,000	50.00	48,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Lapo rat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	50.00	301,124,235	50.00	300,000,000	50.00	630,000,000	50.00	630,000,000	50.00	630,000,000	50.00	630,000,000	50.00	630,000,000
X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1.00	20,000,000	1.00	54,163,864	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD)	%	39.00	282,025,520	41.00	300,000,000	43.00	500,000,000	45.00	920,000,000	47.00	870,000,000	49.00	800,000,000	51.00	300,000,000
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A		N/A		30.00	100,000,000	30.00	70,000,000	30.00	70,000,000	30.00	50,000,000	30.00	50,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	46.00	261,700,000	9.00	300,000,000	85.00	300,000,000	80.00	250,000,000	70.00	250,000,000	60.00	200,000,000	60.00	200,000,000
X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1.00	20,325,520	N/A		2.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000
X.XX.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	N/A		N/A		N/A		14.00	500,000,000	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000	N/A	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	94.02	3,627,526,224	95.00	4,086,617,887	95.00	3,362,597,428	95.00	3,362,597,428	95.00	3,362,597,428	95.00	3,362,597,428	95.00	3,362,597,428
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	270,236,933	12.00	234,936,371	12.00	280,000,000	12.00	280,000,000	12.00	280,000,000	12.00	280,000,000	12.00	280,000,000
X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	43,200,000	12.00	49,009,207	12.00	81,000,000	12.00	81,000,000	12.00	81,000,000	12.00	81,000,000	12.00	81,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	3,314,089,291	12.00	3,802,672,309	12.00	3,001,597,428	12.00	3,001,597,428	12.00	3,001,597,428	12.00	3,001,597,428	12.00	3,001,597,428
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	56.00	394,655,800	58.00	709,103,116	60.00	809,000,000	62.00	809,000,000	64.00	809,000,000	66.00	809,000,000	68.00	809,000,000
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	98.47		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	77.00	44,900,000	50.00	349,148,738	79.00	87,000,000	79.00	87,000,000	79.00	87,000,000	79.00	87,000,000	79.00	87,000,000
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit	N/A		N/A		420.00	400,000,000	420.00	400,000,000	420.00	400,000,000	420.00	400,000,000	420.00	400,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.2.09.0002	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya															
X.XX.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	N/A		20.00	69,011,811	20.00	55,000,000	20.00	55,000,000	20.00	55,000,000	20.00	55,000,000	20.00	55,000,000
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7.00	77,500,000	1.00	180,000,000	5.00	150,000,000	5.00	150,000,000	5.00	150,000,000	5.00	150,000,000	5.00	150,000,000
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10.00	9,780,000	1.00	10,942,567	10.00	12,000,000	10.00	12,000,000	10.00	12,000,000	10.00	12,000,000	10.00	12,000,000
X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A		N/A		1.00	5,000,000	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10.00	262,475,800	10.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000
UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Sokaraja																		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	90.75	128,344,856	91.00	88,447,295	91.25	130,000,000	91.50	130,000,000	91.75	130,000,000	92.00	130,000,000	92.25	130,000,000
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	90.34		90.44		90.54		90.64		90.74		90.84		90.94	
			Nilai kematangan organisasi	Angka	43.00		43.65		44.30		44.95		45.60		46.25		46.90	
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	74.36		75.00		76.50		78.00		79.50		81.00		82.50	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	89.32		95.80		96.00		96.20		96.40		96.60		96.80	

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	100.00		100.00	1,800,000	100.00	1,800,000	100.00	1,800,000	100.00	1,800,000	100.00	1,800,000	100.00	1,800,000
			Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12.00		12.00	1,800,000	12.00	1,800,000	12.00	1,800,000	12.00	1,800,000	12.00	1,800,000	12.00	1,800,000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.00	50,818,284	100.00	44,084,943	100.00	52,545,466	100.00	52,650,000	100.00	54,900,000	100.00	56,450,000	100.00	57,800,000
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10.00	850,000	10.00	1,215,500	10.00	893,500	10.00	900,000	10.00	950,000	10.00	1,000,000	10.00	1,200,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10.00	17,229,784	10.00	17,648,943	10.00	15,187,766	10.00	15,500,000	10.00	16,000,000	10.00	16,450,000	10.00	16,700,000
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10.00	1,152,000	10.00	1,183,500	10.00	2,272,000	10.00	2,350,000	10.00	2,400,000	10.00	2,450,000	10.00	2,600,000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10.00	23,936,500	10.00	22,131,000	10.00	26,237,000	10.00	26,550,000	10.00	26,900,000	10.00	27,350,000	10.00	27,500,000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50.00	900,000	50.00	673,000	50.00	1,955,200	50.00	1,000,000	50.00	1,100,000	50.00	1,200,000	50.00	1,300,000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50.00	6,750,000	50.00	1,233,000	50.00	6,000,000	50.00	6,350,000	50.00	7,550,000	50.00	8,000,000	50.00	8,500,000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100.00	63,915,072	100.00	42,062,352	100.00	61,152,534	100.00	67,900,000	100.00	65,150,000	100.00	64,450,000	100.00	62,950,000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Tersedianya Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Lap	12.00	7,967,952	12.00	9,093,600	12.00	10,639,164	12.00	10,700,000	12.00	10,800,000	12.00	10,950,000	12.00	11,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.2.08.0002	Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia	Laporan														
X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	Laporan	12.00		12.00		12.00		12.00	1,500,000	12.00	1,550,000	12.00	1,600,000	12.00	1,650,000
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	Laporan	12.00	55,947,120	12.00	32,968,752	12.00	50,513,370	12.00	55,700,000	12.00	52,800,000	12.00	51,900,000	12.00	50,300,000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	56.00	13,611,500	58.00	500,000	60.00	14,502,000	62.00	7,650,000	64.00	8,150,000	66.00	7,300,000	68.00	7,450,000
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	98.47		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Tersedia	Unit	1.00	11,856,500	1.00		1.00	11,552,000	1.00	3,150,000	1.00	3,450,000	1.00	4,000,000	1.00	4,100,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		dan Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitas															
X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	15.00		15.00		15.00		15.00	1,500,000	15.00	1,500,000	15.00		15.00	
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10.00	1,755,000	10.00	500,000	10.00	2,950,000	10.00	3,000,000	10.00	3,200,000	10.00	3,300,000	10.00	3,350,000
UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Sumpiuh																		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka		126,638,600		49,020,125		130,000,000		130,000,000		130,000,000		130,000,000		130,000,000
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%														
			Nilai kematangan organisasi	Angka														
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%														

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%														
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%				1,800,000		2,400,000		2,400,000		2,500,000		2,500,000		2,600,000
			Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%														
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	N/A		12.00	1,800,000	12.00	2,400,000	12.00	2,400,000	12.00	2,500,000	12.00	2,500,000	12.00	2,600,000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		63,032,000		39,122,625		92,427,548		105,860,000		104,650,000		102,650,000		102,450,000
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	2.00	508,500	N/A		3.00	546,548	3.00	546,548	3.00	550,000	3.00	550,000	3.00	600,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Bangunan Kantor	gan Bangunan Kantor	an Bangunan Kantor yang Disediakan															
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12.00	20,762,000	12.00	3,274,375	12.00	26,267,500	12.00	49,699,952	12.00	47,500,000	12.00	45,000,000	12.00	39,700,000
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12.00	1,417,500	12.00	672,500	8.00	1,452,500	12.00	1,452,500	12.00	1,500,000	12.00	1,500,000	12.00	1,550,000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12.00	34,181,000	12.00	34,481,000	4.00	49,071,000	4.00	49,071,000	4.00	50,000,000	4.00	50,000,000	4.00	55,000,000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12.00	163,000	N/A		2.00	90,000	2.00	90,000	2.00	100,000	2.00	100,000	2.00	100,000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	6,000,000	12.00	694,750	12.00	15,000,000	12.00	5,000,000	12.00	5,000,000	12.00	5,500,000	12.00	5,500,000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		61,908,400		7,700,000		14,050,000		14,050,000		15,100,000		15,100,000		15,200,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap ora n	12.00	7,990,000	12.00	7,700,000	12.00	13,000,000	12.00	13,000,000	12.00	14,000,000	12.00	14,000,000	12.00	14,000,000
X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lap ora n														
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap ora n	12.00	53,918,400	12.00		12.00	1,050,000	12.00	1,050,000	12.00	1,100,000	12.00	1,100,000	12.00	1,200,000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%		1,698,200		397,500		21,122,452		7,690,000		7,750,000		9,750,000		9,750,000
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%														

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12.00	1,465,000	5.00	297,500	4.00	2,690,000	4.00	2,690,000	4.00	2,750,000	4.00	2,750,000	4.00	2,750,000
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12.00	233,200	1.00	100,000	1.00	18,432,452	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000	1.00	7,000,000	1.00	7,000,000
UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Banyumas																		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	90.75	101,075,225	91.00	68,006,625	91.25	130,000,000	91.50	130,000,000	91.75	130,000,000	92.00	130,000,000	92.25	130,000,000
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	90.34		90.44		90.54		90.64		90.74		90.84		90.94	
			Nilai kematangan organisasi	Angka	43.00		43.65		44.30		44.95		45.60		46.25		46.90	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	89.32		95.80		96.00		96.20		96.40		96.60		96.80	

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	74.36		75.00		76.50		78.00		79.50		81.00		82.50	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	100.00	1,800,000	100.00	1,800,000	100.00	1,800,000	100.00	1,800,000	100.00	1,800,000	100.00	1,800,000	100.00	1,800,000
			Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12.00	1,800,000	12.00	1,800,000	12.00	1,800,000	12.00	1,800,000	12.00	1,800,000	12.00	1,800,000	12.00	1,800,000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.00	61,249,885	100.00	31,426,045	100.00	81,751,500	100.00	73,027,500	100.00	81,751,500	100.00	73,027,500	100.00	81,751,500

Program, Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3.00	917,000	3.00	508,250	3.00	3,343,000	3.00	3,343,000	3.00	3,343,000	3.00	3,343,000	3.00	3,343,000
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7.00	17,859,885	7.00	2,366,375	7.00	24,807,500	7.00	24,015,500	7.00	24,807,500	7.00	24,015,500	7.00	24,807,500
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	9.00	6,774,000	9.00	1,401,000	9.00	10,959,000	9.00	9,147,000	9.00	10,959,000	9.00	9,147,000	9.00	10,959,000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	9.00	24,699,000	9.00	25,290,420	9.00	28,042,000	9.00	27,022,000	9.00	28,042,000	9.00	27,022,000	9.00	28,042,000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2.00	800,000	N/A		1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30.00	10,200,000	30.00	1,860,000	30.00	12,600,000	30.00	7,500,000	30.00	12,600,000	30.00	7,500,000	30.00	12,600,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100.00		100.00		100.00		100.00	8,754,000	100.00		100.00	8,754,000	100.00	
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A		N/A		N/A		2.00	8,754,000	N/A		2.00	8,754,000	N/A	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100.00	34,185,340	100.00	34,780,580	100.00	39,658,500	100.00	39,658,500	100.00	39,658,500	100.00	39,658,500	100.00	39,658,500
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	7,561,000	12.00	7,182,000	12.00	7,287,400	12.00	7,287,400	12.00	7,287,400	12.00	7,287,400	12.00	7,287,400
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	26,624,340	12.00	27,598,580	12.00	32,371,100	12.00	32,371,100	12.00	32,371,100	12.00	32,371,100	12.00	32,371,100
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100.00	3,840,000	100.00		100.00	6,790,000	100.00	6,760,000	100.00	6,790,000	100.00	6,760,000	100.00	6,790,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A		N/A		N/A		1.00	1,200,000	N/A		1.00	1,200,000	N/A	
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan	Unit	9.00	3,840,000	N/A		9.00	6,790,000	9.00	5,560,000	9.00	6,790,000	9.00	5,560,000	9.00	6,790,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara															
UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Cilongok																		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	90.34	127,736,375	90.44	100,328,625	90.54	130,000,000	90.64	130,000,000	90.74	130,000,000	90.84	130,000,000	90.94	130,000,000
			IKM Perangkat Daerah	Angka	90.75		91.00		91.25		91.50		91.75		92.00		92.25	
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	74.35		75.00		76.50		78.00		79.50		81.00		82.50	
			Nilai kematangan organisasi	Angka	43.00		43.65		44.30		44.95		45.60		46.25		46.90	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	89.32		95.80		96.00		96.20		96.40		96.60		96.80	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	100.00		100.00	1,800,000	100.00	2,400,000	100.00	2,400,000	100.00	2,400,000	100.00	2,400,000	100.00	2,400,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Perangkat Daerah	Perangkat Daerah															
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	N/A		12.00	1,800,000	12.00	2,400,000	12.00	2,400,000	12.00	2,400,000	12.00	2,400,000	12.00	2,400,000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.00	59,334,375	100.00	58,749,125	100.00	77,851,000	100.00	77,851,000	100.00	77,851,000	100.00	77,851,000	100.00	77,851,000
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	1,020,000	1.00	1,656,000	1.00	1,886,000	1.00	1,886,000	1.00	1,886,000	1.00	1,886,000	1.00	1,886,000
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7.00	19,499,175	7.00	19,456,725	7.00	25,530,500	7.00	25,530,500	7.00	25,530,500	7.00	25,530,500	7.00	25,530,500
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2.00	1,584,000	2.00	1,381,000	2.00	2,305,000	2.00	2,305,000	2.00	2,305,000	2.00	2,305,000	2.00	2,305,000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	Paket	12.00	27,822,500	12.00	29,736,000	12.00	39,978,000	12.00	39,978,000	12.00	39,978,000	12.00	39,978,000	12.00	39,978,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Kantor yang Disediakan															
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1.00	1,158,700	1.00	819,400	1.00	2,001,500	1.00	2,001,500	1.00	2,001,500	1.00	2,001,500	1.00	2,001,500
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	55.00	8,250,000	38.00	5,700,000	41.00	6,150,000	41.00	6,150,000	41.00	6,150,000	41.00	6,150,000	41.00	6,150,000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	65,362,000	100.00	37,629,500	100.00	43,409,000	100.00	43,409,000	100.00	43,409,000	100.00	43,409,000	100.00	43,409,000
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	12,550,000	12.00	11,139,500	12.00	11,195,000	12.00	11,195,000	12.00	11,195,000	12.00	11,195,000	12.00	11,195,000
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	52,812,000	12.00	26,490,000	12.00	32,214,000	12.00	32,214,000	12.00	32,214,000	12.00	32,214,000	12.00	32,214,000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Optimalnya Pengadaan Barang Milik	Persentase Pengadaan Barang Milik	%	100.00	3,040,000	100.00	2,150,000	100.00	6,340,000	100.00	6,340,000	100.00	6,340,000	100.00	6,340,000	100.00	6,340,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah															
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4.00	2,840,000	3.00	2,150,000	5.00	3,340,000	5.00	3,340,000	5.00	3,340,000	5.00	3,340,000	5.00	3,340,000
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.00	200,000	N/A		1.00	3,000,000	1.00	3,000,000	1.00	3,000,000	1.00	3,000,000	1.00	3,000,000
Laboratorium Konstruksi dan Peralatan																		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%		491,144,856		484,208,375		570,402,572		570,402,572		570,402,572		570,402,572		570,402,572
			Nilai kematangan organisasi	Nilai														
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%														
			IKM Perangkat Daerah	Angka														

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%														
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		139,973,736		90,593,875		160,049,572		160,049,572		160,049,572		160,049,572		160,049,572
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10.00	2,429,000	10.00	920,000	10.00	2,424,000	10.00	2,424,000	10.00	2,424,000	10.00	2,424,000	10.00	2,424,000
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10.00	58,778,736	10.00	14,781,275	10.00	44,344,572	10.00	44,344,572	10.00	44,344,572	10.00	44,344,572	10.00	44,344,572
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10.00	2,443,000	10.00		10.00	1,771,000	10.00	1,771,000	10.00	1,771,000	10.00	1,771,000	10.00	1,771,000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10.00	13,288,000	10.00	11,310,000	10.00	14,475,000	10.00	14,475,000	10.00	14,475,000	10.00	14,475,000	10.00	14,475,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50.00		50.00	597,600	50.00	2,900,000	50.00	2,900,000	50.00	2,900,000	50.00	2,900,000	50.00	2,900,000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50.00	63,035,000	50.00	62,985,000	50.00	94,135,000	50.00	94,135,000	50.00	94,135,000	50.00	94,135,000	50.00	94,135,000
X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A		N/A		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%		4,120,000		1,930,000		4,120,000		4,120,000		4,120,000		4,120,000		4,120,000
			Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%														

Program, Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit														
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit														
X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1.00	4,120,000	N/A	1,930,000	2.00	4,120,000	1.00	4,120,000	1.00	4,120,000	1.00	4,120,000	1.00	4,120,000
X.XX.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit														
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		79,251,120		118,588,500		138,137,000		138,137,000		138,137,000		138,137,000		138,137,000
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12.00	32,854,000	12.00	32,101,500	12.00	28,250,000	12.00	28,250,000	12.00	28,250,000	12.00	28,250,000	12.00	28,250,000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Tersedianya Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Lap														

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.2.08.0003	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan	ora n														
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap ora n	12.00	46,397,120	12.00	86,487,000	12.00	109,887,000	12.00	109,887,000	12.00	109,887,000	12.00	109,887,000	12.00	109,887,000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%		267,800,000		273,096,000		268,096,000		268,096,000		268,096,000		268,096,000		268,096,000
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%														
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit														

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit														
X.XX.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit														
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5.00	35,200,000	5.00	35,000,000	5.00	20,000,000	5.00	20,000,000	5.00	20,000,000	5.00	20,000,000	5.00	20,000,000
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit														

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit														
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	N/A	232,600,000	N/A	238,096,000	N/A	248,096,000	N/A	248,096,000	N/A	248,096,000	N/A	248,096,000	N/A	248,096,000
UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Jatilawang																		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	90.75	101,772,428	91.00	84,791,075	91.25	130,000,000	91.50	130,000,000	91.75	130,000,000	92.00	130,000,000	92.00	130,000,000
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	90.34		90.44		90.54		90.64		90.74		90.84		90.94	
			Nilai kematangan organisasi	Angka	43.00		43.65		44.30		44.95		45.60		46.25		46.90	
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	74.36		75.00		76.50		78.00		79.50		81.00		82.50	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan	%	89.32		95.80		96.00		96.20		96.40		96.60		96.80	

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Pemerintah Daerah															
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.00		100.00	600,000	100.00	1,800,000	100.00	1,800,000	100.00	1,800,000	100.00	1,800,000	100.00	1,800,000
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1.00		4.00	600,000	12.00	1,800,000	12.00	1,800,000	12.00	1,800,000	12.00	1,800,000	12.00	1,800,000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.00	64,108,072	100.00	49,276,915	100.00	81,932,400	100.00	81,932,400	100.00	81,932,400	100.00	81,932,400	100.00	81,932,400
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	1,090,500	1.00		1.00	1,161,000	1.00	1,161,000	1.00	1,161,000	1.00	1,161,000	1.00	1,161,000
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00	18,719,318	3.00	4,787,500	6.00	25,896,500	6.00	25,896,500	6.00	25,896,500	6.00	25,896,500	6.00	25,896,500

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1.00	2,888,303	1.00		1.00	3,960,000	1.00	3,960,000	1.00	3,960,000	1.00	3,960,000	1.00	3,960,000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3.00	34,125,000	3.00	38,455,540	3.00	38,230,000	3.00	38,230,000	3.00	38,230,000	3.00	38,230,000	3.00	38,230,000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1.00	984,951	1.00		1.00	984,900	1.00	984,900	1.00	984,900	1.00	984,900	1.00	984,900
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	14.00	6,300,000	13.00	6,033,875	26.00	11,700,000	26.00	11,700,000	26.00	11,700,000	26.00	11,700,000	26.00	11,700,000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100.00	34,510,920	100.00	34,914,160	100.00	39,745,520	100.00	39,745,520	100.00	39,745,520	100.00	39,745,520	100.00	39,745,520
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	7,539,600	12.00	7,279,600	12.00	9,698,000	12.00	9,698,000	12.00	9,698,000	12.00	9,698,000	12.00	9,698,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	26,971,320	12.00	27,634,560	12.00	30,047,520	12.00	30,047,520	12.00	30,047,520	12.00	30,047,520	12.00	30,047,520
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	3,153,436	100.00		100.00	6,522,080	100.00	6,522,080	100.00	6,522,080	100.00	6,522,080	100.00	6,522,080
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3.00	2,920,000	3.00		3.00	4,420,000	3.00	4,420,000	3.00	4,420,000	3.00	4,420,000	3.00	4,420,000
X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.00	233,436	1.00		1.00	2,102,080	1.00	2,102,080	1.00	2,102,080	1.00	2,102,080	1.00	2,102,080
UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Ajibarang																		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalnya layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	90.34	94,975,825	90.44	81,723,325	90.54	130,000,000	90.64	130,000,000	90.74	130,000,000	90.84	130,000,000	90.94	130,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Nilai kematangan organisasi	Angka	43.00		43.65		44.30		44.95		45.60		46.25		46.90	
			IKM Perangkat Daerah	Angka	90.75		91.00		91.25		91.50		91.75		92.00		92.25	
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	74.36		75.00		76.50		78.00		79.50		81.00		82.50	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	89.32		95.80		96.00		96.20		96.40		96.60		96.80	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.00		100.00	1,800,000	100.00	1,800,000	100.00	1,800,000	100.00	1,800,000	100.00	1,800,000	100.00	1,800,000
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	N/A		12.00	1,800,000	12.00	1,800,000	12.00	1,800,000	12.00	1,800,000	12.00	1,800,000	12.00	1,800,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.00	57,771,613	100.00	57,046,225	100.00	105,322,900	100.00	105,322,900	100.00	105,322,900	100.00	105,322,900	100.00	105,322,900
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	333,000	1.00	566,000	1.00	3,080,000	1.00	3,080,000	1.00	3,080,000	1.00	3,080,000	1.00	3,080,000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	29,838,000	1.00	44,754,500	1.00	47,874,500	1.00	47,874,500	1.00	47,874,500	1.00	47,874,500	1.00	47,874,500
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1.00	1,246,500	1.00	432,000	1.00	1,140,000	1.00	1,140,000	1.00	1,140,000	1.00	1,140,000	1.00	1,140,000
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	23,354,113	1.00	10,834,225	1.00	35,612,100	1.00	35,612,100	1.00	35,612,100	1.00	35,612,100	1.00	35,612,100
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.00	150,000	N/A		1.00	15,000,000	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1.00	2,850,000	1.00	459,500	1.00	2,616,300	1.00	2,616,300	1.00	2,616,300	1.00	2,616,300	1.00	2,616,300
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100.00	32,984,212	100.00	19,257,100	100.00	19,257,100	100.00	19,257,100	100.00	19,257,100	100.00	19,257,100	100.00	19,257,100
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	11,280,000	12.00	12,160,803	12.00	12,160,803	12.00	12,160,803	12.00	12,160,803	12.00	12,160,803	12.00	12,160,803
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1.00	21,704,212	1.00	7,096,297	1.00	7,096,297	1.00	7,096,297	1.00	7,096,297	1.00	7,096,297	1.00	7,096,297
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100.00	4,220,000	100.00	3,620,000	100.00	3,620,000	100.00	3,620,000	100.00	3,620,000	100.00	3,620,000	100.00	3,620,000
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan	Unit	1.00	4,220,000	1.00	3,620,000	1.00	3,620,000	1.00	3,620,000	1.00	3,620,000	1.00	3,620,000	1.00	3,620,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara															
UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Purwokerto																		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai kematangan organisasi	Angka		114,441,543		85,913,125		130,000,000		130,000,000		130,000,000		130,000,000		130,000,000
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%														
			IKM Perangkat Daerah	Angka														
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%														
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%														

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%				1,800,000		2,160,000		2,160,000		2,160,000		2,160,000		2,160,000
			Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%														
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	N/A		12.00	1,800,000	12.00	2,160,000	12.00	2,160,000	12.00	2,160,000	12.00	2,160,000	12.00	2,160,000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		75,616,750		48,795,367		77,395,800		77,395,800		77,395,800		77,395,800		77,395,800
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	525,250	1.00	209,370	1.00	1,158,300	1.00	1,158,300	1.00	1,158,300	1.00	1,158,300	1.00	1,158,300

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	25,381,000	1.00	3,874,500	1.00	21,848,500	1.00	21,848,500	1.00	21,848,500	1.00	21,848,500	1.00	21,848,500
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1.00	2,018,000	1.00	1,905,000	1.00	3,074,000	1.00	3,074,000	1.00	3,074,000	1.00	3,074,000	1.00	3,074,000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	45,492,500	1.00	42,456,497	1.00	43,615,000	1.00	43,615,000	1.00	43,615,000	1.00	43,615,000	1.00	43,615,000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1.00	1,600,000	1.00	200,000	1.00	2,300,000	1.00	2,300,000	1.00	2,300,000	1.00	2,300,000	1.00	2,300,000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	600,000	1.00	150,000	2.00	5,400,000	2.00	5,400,000	2.00	5,400,000	2.00	5,400,000	2.00	5,400,000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		31,425,500		32,509,003		37,884,200		37,884,200		37,884,200		37,884,200		37,884,200
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Tersedianya Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	12.00	13,918,000	12.00	15,284,000	12.00	15,284,200	12.00	15,284,200	12.00	15,284,200	12.00	15,284,200	12.00	15,284,200

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.2.08.0002	Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia															
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	Laporan	12.00	17,507,500	12.00	17,225,003	12.00	22,600,000	12.00	22,600,000	12.00	22,600,000	12.00	22,600,000	12.00	22,600,000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%		7,399,293		2,808,755		12,560,000		12,560,000		12,560,000		12,560,000		12,560,000
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%														
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12.00	3,570,000	4.00	690,000	2.00	8,560,000	2.00	8,560,000	2.00	8,560,000	2.00	8,560,000	2.00	8,560,000
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.00	3,829,293	1.00	2,118,755	1.00	4,000,000	1.00	4,000,000	1.00	4,000,000	1.00	4,000,000	1.00	4,000,000
UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik																		

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	N/A		N/A		90.54	260,000,000	90.64	260,000,000	90.74	260,000,000	90.84	260,000,000	90.94	260,000,000
			Nilai kematangan organisasi	Nilai	N/A		N/A		43.50		44.00		45.00		46.00		47.00	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	N/A		N/A		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
			IKM Perangkat Daerah	Angka	N/A		N/A		91.25		91.50		91.75		92.00		92.25	
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A		N/A		81.00		82.00		83.00		84.00		85.00	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	N/A		N/A		100.00	2,000,000	100.00	2,000,000	100.00	2,000,000	100.00	2,000,000	100.00	2,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	N/A		N/A		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	N/A		N/A		1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	N/A		N/A		100.00	37,000,000	100.00	37,000,000	100.00	37,000,000	100.00	37,000,000	100.00	37,000,000
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A		N/A		1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A		N/A		1.00	11,000,000	1.00	11,000,000	1.00	11,000,000	1.00	11,000,000	1.00	11,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A		N/A		1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	N/A		N/A		1.00	1,000,000	1.00	1,000,000	1.00	1,000,000	1.00	1,000,000	1.00	1,000,000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A		N/A		1.00	1,000,000	1.00	1,000,000	1.00	1,000,000	1.00	1,000,000	1.00	1,000,000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A		N/A		12.00	20,000,000	12.00	20,000,000	12.00	20,000,000	12.00	20,000,000	12.00	20,000,000
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	%	N/A		N/A		100.00	3,000,000	100.00	3,000,000	100.00	3,000,000	100.00	3,000,000	100.00	3,000,000
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit														
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan	Unit	N/A		N/A		1.00	1,000,000	1.00	1,000,000	1.00	1,000,000	1.00	1,000,000	1.00	1,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.2.07.0006			Mesin Lainnya yang Disediakan															
X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A		N/A		1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A		N/A		100.00	114,000,000	100.00	114,000,000	100.00	114,000,000	100.00	114,000,000	100.00	114,000,000
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	N/A		N/A		12.00	2,000,000	12.00	2,000,000	12.00	2,000,000	12.00	2,000,000	12.00	2,000,000
X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A		N/A		1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A		N/A		1.00	110,000,000	1.00	110,000,000	1.00	110,000,000	1.00	110,000,000	1.00	110,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	N/A		N/A		60.00	104,000,000	62.00	104,000,000	64.00	104,000,000	66.00	104,000,000	68.00	104,000,000
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	N/A		N/A		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A		N/A		1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	N/A		N/A		1.00	20,000,000	1.00	20,000,000	1.00	20,000,000	1.00	20,000,000	1.00	20,000,000
X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A		N/A		1.00	80,000,000	1.00	80,000,000	1.00	80,000,000	1.00	80,000,000	1.00	80,000,000

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
					Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A		N/A		1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000

Keterangan Warna

: Tujuan

: Sasaran

: Program

: Kegiatan

: Sub Kegiatan

Tabel 4.1c Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					Target Akhir
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rata-Rata Capaian Kinerja Infrastruktur	%	66,587	67,964	69,383	71,684	73,987	75,332
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	71,444	72,694	73,944	75,194	76,444	77,694
Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berdasarkan Dokumen Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Masyarakat jasa konstruksi yang dibina	%	59,030	62,790	66,560	70,320	74,080	77,850
Persentase Capaian Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air	%	66,693	67,568	68,443	69,318	70,193	71,068
Persentase Capaian Kinerja Infrastruktur Cipta Karya	%	29,883	30,873	32,082	37,702	43,325	44,165
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	86.95	87.00	87.05	87.10	87.15	87.20
Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3.49	3.64	3.79	3.94	4.09	4.24
Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3.51	3.66	3.81	3.96	4.11	4.26

Tabel 4.1d Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan						
				Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	79.54	80.25	80.97	81.70	82.45	83.21	83.98
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum Jaringan Perpipaan (JP)	%	30.24	31.73	33.22	34.72	36.21	37.70	39.19
		Persentase rumah tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	17.12	24.76	32.39	40.03	47.66	55.30	62.94
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	2.46	4.24	8.24	12.24	16.24	20.24	24.24

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan						
				Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	93.24	93.65	94.08	94.53	94.99	95.48	95.98
		Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif Sektor Air Limbah	Ton CO2eq	7,514.77	41,887.38	54,571.71	68,773.58	84,642.69	102,347.74	122,078.64
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	58.87	60.25	61.25	62.25	63.25	64.25	65.25
		Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	%	55.50	56.50	57.50	58.50	59.50	60.50	61.50
		Persentase Bangunan Penyedia Air Baku Dalam Kondisi Baik	%	81.52	82.82	83.52	84.52	85.52	86.52	87.52
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan	%	70.50	71.00	71.50	72.00	72.50	73.00	73.50

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan						
				Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Kabupaten/Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi								
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase rata - rata capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	68.18	68.64	69.07	69.50	69.92	70.35	70.78
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	70.15	70.85	71.55	72.25	72.95	73.65	74.35
		Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	19.13	19.13	19.93	20.73	21.53	22.33	23.13
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan kabupaten yang dipelihara	%	71.44	71.57	71.69	71.81	71.94	72.06	72.18

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan						
				Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Persentase panjang jalan kabupaten yang dibangun, direkonstruksi dan ditingkatkan kapasitasnya	%	1.62	3.14	4.97	6.80	8.63	10.46	12.31
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil yang dilatih	%	61.44	65.17	68.91	72.64	76.37	80.10	83.84
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	94.77	95.42	96.08	96.73	97.39	98.04	98.69
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	94.85	95.10	95.36	95.62	95.88	96.13	96.39
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan	%	47.83	47.83	47.83	52.17	56.52	60.87	65.22

Program,Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan						
				Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Infrastruktur Permukiman Strategis yang disediakan	%	N/A	N/A	N/A	33.33	66.67	100.00	100.00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Perangkat Daerah	Angka	90.75	91.00	91.25	91.50	91.75	92.00	92.25
		Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	90.34	90.44	90.54	90.64	90.74	90.84	90.94
		Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	74.36	75.00	81.00	82.00	83.00	84.00	85.00
		Nilai kematangan organisasi	Angka	43.00	43.25	43.50	44.00	45.00	46.00	47.00
		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

V. PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas yang kami susun. Selanjutnya akan dipedomani dan digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen lainnya, yaitu seperti :

- a. Dokumen Rencana Kerja setiap tahun yaitu untuk tahun 2025 sampai 2029.
- b. Menyusun Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA – SKPD).

Rencana Strategis juga berguna untuk bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2030. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

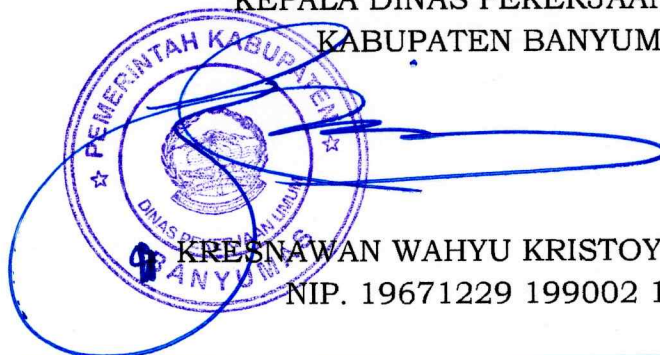
1. Setiap unsur pada Dinas Pekerjaan Umum agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan pada Renstra.
2. Seluruh ASN di Dinas Pekerjaan Umum dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sehingga akan selalu terjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami mengharapkan dengan penyusunan Rencana Strategis ini kiranya dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dengan baik, dapat melayani masyarakat dengan memuaskan serta dipertanggung jawabkan.

Terima kasih.

Ditetapkan di : Purwokerto
pada tanggal : 19 September 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO, ST., MSi.
NIP. 19671229 199002 1 002

